



PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

COLLABORATIVE RESILIENCE: STAKEHOLDERS FUELING POSITIVE BEHAVIOR, THINKING, AND MARGINS



LAPORAN TERINTEGRASI

2024

INTEGRATED REPORT

SINGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan prospektif yang mencakup kondisi keuangan, operasional, proyeksi, serta rencana bisnis Perseroan. Pernyataan tersebut mengandung risiko yang tidak seluruhnya berada dalam kendali PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (selanjutnya disebut “Perusahaan”). Meskipun Perusahaan telah menyusun asumsi berdasarkan informasi yang tersedia pada saat penyusunan, terdapat berbagai faktor eksternal yang berpotensi menyebabkan hasil aktual berbeda dari estimasi. Dengan demikian, Perusahaan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbedaan yang mungkin timbul.

Dalam laporan ini, istilah “Perusahaan”, “Perseroan”, dan “kami” merujuk pada PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, entitas yang bergerak di sektor properti.

This Annual Report contains forward-looking statements regarding the Company’s financial condition, operational performance, projections, and business plans. These statements involve inherent risks that may not be fully within the control of PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (hereinafter referred to as “the Company”). While the Company has formulated assumptions based on information available at the time of preparation, external factors may lead to material differences between actual results and expectations. Accordingly, the Company bears no responsibility for any such discrepancies.

In this report, the terms “the Company”, “Perseroan”, and “we” refer to PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, a property-sector entity.

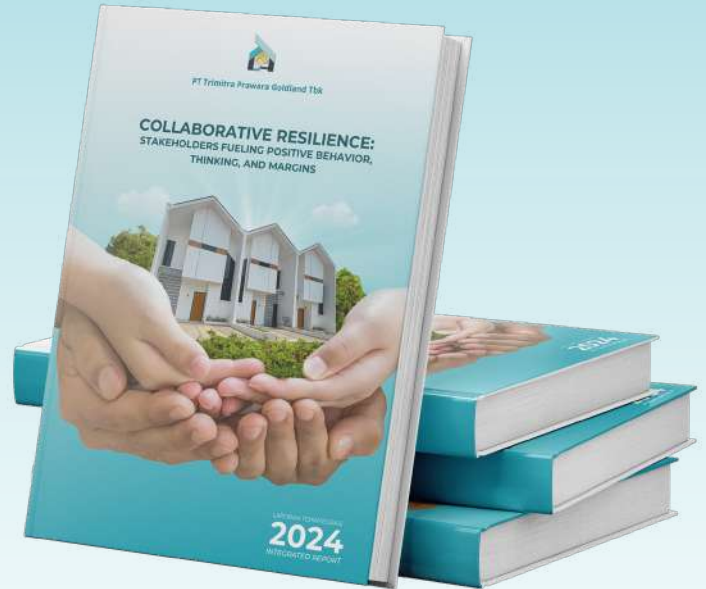
The report is published in both Indonesian and English. The English translation is provided for convenience as an unofficial version. In the event of inconsistencies between the two versions, the Indonesian text shall prevail. All information, including numerical formatting, adheres to standard Indonesian language conventions in both language versions.

PENJELASAN TEMA:

Theme Explanation:

Ketahanan Kolaboratif: Kontribusi Pemangku Kepentingan Memacu Perubahan Positif pada Perilaku, Pola Pikir, dan Margin

Collaborative Resilience: Stakeholders Fueling Positive Behavior, Thinking, and Margins



Tahun 2024 telah menggarisbawahi betapa pentingnya ketangguhan dalam mengarungi era yang ditandai oleh kompleksitas dan ketidakpastian, khususnya bagi sektor properti di Indonesia. Ketidakstabilan politik seputar Pemilu membawa dampak pada goyahnya kepercayaan konsumen dan melambatnya aktivitas pasar. Dengan latar belakang ini, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk menganut etos ketangguhan kolaboratif—sebuah filosofi yang berlandaskan pada kekuatan kolektif para pemangku kepentingan untuk mendorong pemikiran adaptif, mendorong perubahan perilaku positif, dan mempertahankan margin bahkan di tengah turbulensi. Laporan Tahunan ini mencerminkan perjalanan kami melalui tantangan-tantangan ini, merayakan kemitraan dan inovasi yang telah memperkuat tekad kami dan memosisikan kami untuk meraih peluang-peluang yang muncul.

Meski industri properti menghadapi tekanan sepanjang 2024, dengan calon pembeli yang cenderung memilih untuk menunggu dan memantau kondisi yang ada, tim manajemen kami tetap fokus mencari celah pertumbuhan. Volatilitas politik memang berdampak pada penjualan, namun juga memunculkan peluang untuk berinovasi. Melalui transformasi digital—mulai dari platform interaksi pelanggan berbasis AI hingga tur properti virtual imersif—kami mengubah cara berkomunikasi dengan klien, menyebarkan informasi, dan menonjolkan nilai di pasar yang ragu bertransaksi. Langkah ini tidak hanya meredakan tekanan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi kelincahan jangka panjang, membuktikan bahwa tantangan bisa memicu kreativitas.

Sebagai refleksi atas tahun 2024, laporan ini menegaskan bahwa kolaborasi pemangku kepentingan adalah landasan ketangguhan kami. Pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan mitra komunitas bersama mendorong pergeseran pola pikir menuju solusi proaktif dan pertumbuhan berkelanjutan. Ke depan, kami berkomitmen memperkuat kemitraan ini, meyakini bahwa tujuan bersama dan adaptabilitas akan terus menjadi penggerak kesuksesan di tengah perubahan. Melalui prinsip ketangguhan kolaboratif, kami mempertegas visi: mengubah tantangan menjadi katalisator inovasi, memastikan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk tetap menjadi pemimpin terpercaya di sektor properti Indonesia.

The year 2024 has underscored the indispensable role of resilience in navigating an era marked by complexity and unpredictability, particularly for Indonesia's property sector. As political uncertainties surrounding the nation's general election reverberated through the economy, consumer confidence wavered, and market activity slowed. Against this backdrop, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk embraced the ethos of collaborative resilience—a philosophy anchored in the collective strength of stakeholders to drive adaptive thinking, foster positive behavioral shifts, and sustain margins even amid turbulence. This Annual Report reflects our journey through these challenges, celebrating the partnerships and innovations that have fortified our resolve and positioned us to seize emergent opportunities.

While the property development industry faced headwinds in 2024, with prospective buyers adopting a cautious "wait-and-see" approach, our management team remained steadfast in identifying pathways to growth. Political volatility undeniably impacted sales momentum, yet it also revealed latent opportunities to innovate. By leveraging digital transformation—from AI-driven customer engagement platforms to immersive virtual property tours—we redefined how we connect with clients, disseminate information, and showcase value in a market hesitant to transact. These initiatives not only mitigated short-term pressures but also laid the groundwork for long-term agility, proving that adversity can catalyze creativity.

As a reflection on the year, this report underscores how stakeholder collaboration has been the cornerstone of our resilience. Shareholders, customers, employees, and community partners have collectively fueled a mindset shift toward proactive problem-solving and sustainable growth. Looking ahead, we remain committed to nurturing these alliances, recognizing that shared purpose and adaptability will continue to drive our ability to thrive in evolving landscapes. Through this lens of collaborative resilience, we reaffirm our vision: to transform challenges into catalysts for innovation, ensuring that PT Trimitra Prawara Goldland Tbk remains a trusted leader in Indonesia's property sector.

PENGANTAR ATAS LAPORAN TERINTEGRASI

Introduction To The Integrated Report

Pada tahun 2024, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk menerbitkan Laporan Tahunan Terintegrasi sebagai wujud komitmen dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, sekaligus merefleksikan praktik tata kelola perusahaan (corporate governance) dan keberlanjutan aspek finansial. Pelaporan terpadu ini selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten/Perusahaan Publik, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 terkait Format dan Muatan Laporan Tahunan.

Kehadiran Laporan Tahunan Terintegrasi ini juga menjadi media bagi Perseroan untuk menyampaikan komitmennya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebuah agenda global dengan 17 pilar utama. Melalui laporan ini, Perseroan berupaya menyajikan seluruh informasi wajib sesuai regulasi, dilengkapi penanda numerik dan alfabetis (merujuk Lampiran II POJK 51/POJK.03/2017) untuk memudahkan pembaca dalam melacak referensi terkait. Daftar lengkap kesesuaian konten laporan dengan acuan regulasi dapat ditemukan pada bagian akhir dokumen.

Data keuangan dalam laporan ini disajikan dalam satuan Rupiah (kecuali disebutkan lain) dan telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Rama Wendra. Laporan Tahunan tersedia dalam dua bahasa—Indonesia dan Inggris—dengan penyajian data kuantitatif mengikuti prinsip komparabilitas (perbandingan minimal dua tahun berturut-turut). Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan menganalisis tren kinerja Perseroan secara lebih komprehensif.

In 2024, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk published its Integrated Annual Report as part of its commitment to ensuring compliance with applicable regulations in Indonesia, while reflecting sound corporate governance and sustainable financial practices. This integrated reporting aligns with Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 29/POJK.04/2016 on Annual Reports for Issuers/Public Companies, POJK No. 51/POJK.03/2017 on Sustainable Finance Implementation, and OJK Circular Letter (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Format and Content of Annual Reports.

The Integrated Annual Report also serves as a platform for the Company to communicate its dedication to advancing the Sustainable Development Goals (SDGs), a global initiative encompassing 17 core pillars. The report comprehensively discloses all mandatory information in accordance with regulatory requirements, incorporating alphanumeric markers (referencing Annex II of POJK 51/POJK.03/2017) to facilitate cross-referencing. A detailed compliance checklist, mapping the report's content to regulatory benchmarks, is provided in the appendix.

Financial data within this report is presented in Indonesian Rupiah (IDR) (unless otherwise specified) and has been audited by Rama Rama Wendra Public Accounting Firm. The Annual Report is published in both Indonesian and English, with quantitative data adhering to the principle of comparability (spanning at least two consecutive years). This approach enables stakeholders to conduct trend analyses of the Company's performance with clarity and precision.

Periode, Cakupan, dan Batasan Pelaporan

Laporan Tahunan Terintegrasi 2024 PT Trimitra Prawara Goldland Tbk mencakup evaluasi kinerja keuangan, operasional, dan keberlanjutan Perseroan selama periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Data serta informasi yang disajikan merefleksikan capaian dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun tersebut.

Akses dan Ketersediaan

Laporan ini dapat diakses dalam bentuk cetak (buku) maupun versi digital yang tersedia untuk diunduh melalui situs web resmi Perseroan di <https://trimitraprawaraland.co.id/>.

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk membuka ruang untuk masukan, saran, maupun tanggapan dari para pemangku kepentingan terkait konten laporan ini, sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas.

Reporting Period, Scope, and Limitations

The 2024 Integrated Annual Report of PT Trimitra Prawara Goldland Tbk encompasses an evaluation of the Company's financial, operational, and sustainability performance for the reporting period from January 1, 2024 to December 31, 2024. The data and insights presented reflect the achievements and challenges encountered throughout the year.

Accessibility

This report is accessible in printed format (hardcopy) and as a downloadable digital version on the Company's official website: <https://trimitraprawaraland.co.id/>.

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk welcomes feedback, suggestions, and inquiries regarding the content of this Integrated Annual Report, reaffirming its commitment to transparency and accountability to stakeholders.

Atas nama Direksi,

On behalf of the Board of Directors,



Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak

Direktur Utama/ President Director

Daftar isi

Table Of Content

Sanggahan & Batasan
Tanggung Jawab

Disclaimer

Penjelasan tema

Explanation of theme

Penjelasan tema

Introduction to the Integrated Report

08 Kilas Kinerja 2024

2024 Performance Overview

09. Ikhtisar Keuangan
Financial Highlight

10. Ikhtisar Operasional
Operational Overview

10. Rasio-Rasio & Pertumbuhan Tahunan
Ratios & Annual Growth

11. Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan
Average Annual Growth

12. Informasi Saham
Stock Information

14. Aktifitas Perdagangan Saham
Stock Trading Activity

15 Laporan Manajemen

Management Report

16. Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

22. Laporan Direksi
Board of Directors Report

27 Profil Perusahaan

Company Profile

28. Profil PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
Profile of PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

28. Informasi Umum Perseroan
General Information of the Company

30. Riwayat Singkat Perseroan
Brief History of the Company

31. Jejak Langkah
Footsteps

32. Peristiwa Penting Tahun 2024
Important Events in 2024

33. Penghargaan & Sertifikasi
Awards & Certifications

34. Visi, Misi & Nilai Perseroan
Vision, Mission & Values

35. Kegiatan Usaha
Business Activities

36. Strategi Jangka Panjang
Long-term Strategy

37. Keanggotaan Profesional
Professional Membership

37. Struktur Organisasi
Organization Structure

38. Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

40. Profil Komisaris Independent
Board of Directors Profile

42. Sumber Daya Manusia
Human Resources

45. Pengembangan Teknologi Informasi
Information Technology Development

45. Pemegang Saham
Shareholders

47. Entitas Anak
Subsidiary

47. Lembaga & Profesi Penunjang
Pasar Modal
*Capital Market Supporting
Institutions & Professions*

47. Kronologi Pencatatan Saham
Stock Listing Chronology

49 Analisis & pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

50. Analisa Ekonomi & Industri
Economic & Industry Analysis

51. Tinjauan Industry Property
Industrial Overview

52. Analisa Segmen Usaha
Business Segment Analysis

53. Analisa Keuangan
Financial Analysis

60. Analisa Laba Rugi
Profit and Loss Analysis

62. Analisa Arus Kas
Cash Flow Analysis

65. Kemampuan Membayar Hutang
Debt Service Capability

66. Struktur Modal
Capital Structure

67. Prospek Usaha
Business Outlook

- 68. Perbandingan Target & Realisasi Tahun 2024
Comparison of Target & Realization Year 2024
- 68. Proyeksi 2025
2025 Projection
- 69. Dividen
Dividend
- 69. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Proceeds from Public Offering
- 70. Informasi Material
Material Information
- 70. Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Changes in Laws & Regulations
- 70. Perubahan Kebijakan Akuntansi & Laporan Keuangan
Changes in Accounting Policies & Financial Statements
- 71** **Tata Kelola Perusahaan**
Corporate Governance
- 72. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Policy
- 78. Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
- 86. Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 87. Direksi
Board of Directors
- 105. Komite Audit
Audit Committee
- 109. Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee
- 111. Sekretaris Perusahaan
Company Secretary
- 114. Unit Audit Internal
Internal Audit Unit
- 116. Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 117. Sistem Manajemen Resiko
Risk Management System
- 130. Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan
Important Cases Faced by the Company
- 130. Kode Etik & Budaya Perseroan
Code of Ethics & Corporate Culture
- 131. Sistem Laporan Pelanggaran
Violation Reporting System
- 131. Kebijakan Perdagangan Orang Dalam
Insider Trading Policy
- 132. Kebijakan Anti Korupsi & Anti Fraud
Anti-Corruption & Anti-Fraud Policy
- 132. Kebijakan Seleksi untuk Pemasok & Vendor
Supplier & Vendor Selection Policy

- 132. Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Kreditor
Creditors' Rights Fulfillment Policy
- 132. Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance

141 **Laporan Keberlanjutan** *Sustainability Report*

- 142. Tentang Laporan Berkelanjutan
About the Sustainability Report
- 143. Profil Perusahaan
Company Profile
- 144. Sambutan / Penjelasan Direktur Utama
Remarks / Explanation of President Director
- 145. Strategi Berkelanjutan
Sustainability Strategy
- 145. Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance Overview
- 147. Tata Kelola Berkelanjutan
Sustainable Governance
- 148. Kinerja Berkelanjutan
Sustainable Performance
- 149. Kinerja Sosial
Social Performance
- 155. Kinerja Lingkungan
Environmental Performance
- 158. Pelibatan Pemangku Kepentingan
Stakeholder Engagement
- 163. Target Dan Pengembangan Di 2025
Target And Development In 2025
- 163. Komitmen Keberlanjutan
Commitment To Sustainability
- 164. Pengembangan Teknologi & Informasi
Technology & Information Development
- 164. Pengembangan Asset & Fasilitas
Asset & Facility Development
- 164. Keanggotaan Asosiasi
Association Membership
- 165. Data/Indeks Pengungkapan Kriteria POJK No.51/POJK.03/2017
Data/Index Disclosure Criteria POJK No.51/POJK.03/2017
- 168. Aksesibilitas & Umpan Balik
Accessibility & Feedback
- 169. Pernyataan Tanggung Jawab Direksi & Komisaris Atas Laporan Tahunan & Keberlanjutan Tahun 2024
Statement of Directors & Commissioners Responsibility for Annual & Sustainability Report 2024
- 170. Referensi
Reference
- 171. Lampiran
Attachment

172 **Laporan Keuangan** *Financial Report*

BAB
01



KILAS KINERJA
2024
2024 PERFORMANCE OVERVIEW

IKHTISAR KEUANGAN

Financial

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk tetap konsisten dalam upayanya untuk menghadirkan hunian berkualitas bagi para pelanggan. Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan proyek dan fasilitas pendukung guna menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat secara luas. Ringkasan pencapaian Perseroan selama tahun 2024, beserta perbandingan dengan pencapaian lima tahun sebelumnya, dapat ditemukan pada uraian berikut ini.

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk remains committed to delivering high-quality housing for its customers through consistent efforts. The Company continuously undertakes the development of projects and supporting facilities to ensure the availability of supply for the broader community. A summary of the Company's achievements throughout 2024, along with comparisons over the past five years, can be found in the following presentation.

LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan Rp)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (in million IDR)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Lancar Current Asset	89.810	80.088	101.836	100.819	98.231
Aset Tidak Lancar Non-Current Asset	10.328	12.290	13.593	12.953	8.712
Total Aset Total Asset	100.138	92.378	115.428	113.773	106.944
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	26.602	12.338	20.465	19.277	15.860
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	309	1.747	15.345	14.905	13.429
Total Liabilitas Total Liabilities	26.911	14.086	35.810	34.182	29.289
Ekuitas Equity	73.227	78.292	79.618	79.590	77.654
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	100.138	92.378	115.428	113.773	106.944



IKHTISAR OPERASIONAL

Operational Highlights

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (dalam jutaan Rp)

Statement Of Profit And Loss And Other Comprehensive Income (In Million Idr)

Uraian/Description	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Usaha Revenue	40.309	55.019	42.519	23.653	14.195
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(27.232)	(38.804)	(28.692)	(14.605)	(8.753)
Laba Bruto Gross Profit	13.078	16.215	13.827	9.049	5.441
Beban Usaha Operating Expenses	6.415	6.454	(8.639)	(6.120)	(5.021)
Laba Usaha Operating Profit	6.663	9.762	5.458	2.928	421
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	3.391	5.524	2.152	163	(2.109)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive income for the Year	3.472	5.558	2.138	122	(1.935)
Laba Per Saham (Rp) Earnings Per Share	5,79	4,42	1,72	0,13	(1,69)

RASIO-RASIO DAN PERTUMBUHAN TAHUNAN

Ratios And Annual Growth

Uraian/Description	PERTUMBUHAN (%) GROWTH (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Usaha Revenue	(56,93)	36,49	(22,72)	(44,37)	(39,99)
Laba Usaha Operating Profit	(70,58)	46,51	(44,08)	(46,36)	(85,64)
Laba Bersih Net Profit	(82,42)	62,89	(61,03)	(92,44)	(100)
Total Aset Total Assets	11,48	(7,75)	24,95	(1,43)	(6,00)
Total Liabilitas Total Liabilities	(36,38)	(47,66)	154,23	(4,55)	(14,31)
Total Ekuitas Total Equity	54,07	6,92	1,69	(0,04)	(2,43)



Rasio-Rasio Keuangan

Financial Ratios

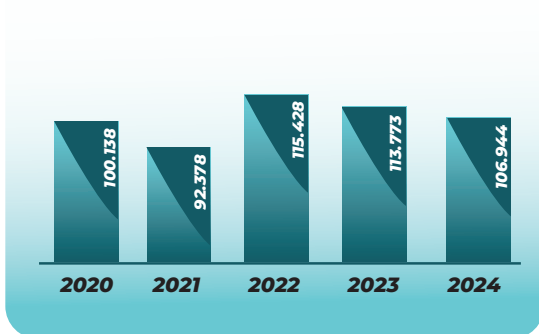
Uraian/Description	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Lancar Current Ratio	3,38x	6,49x	4,98x	5,23x	6,19x
Marjin Laba Tahun Berjalan Net Profit Margin	8,41%	10,04%	5,06%	0,69%	(14,86%)
Tingkat Pengembalian Aset Return on Assets	3,47%	5,98%	1,86%	0,11%	(1,97)
Tingkat Pengembalian Modal Return on Equity	4,63%	7,06%	2,70%	0,15%	(2,72)
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	36,75%	17,99%	44,98%	42,95%	37,72%
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset Debt to Assets Ratio	26,87%	15,25%	31,02%	30,04%	27,39

RATA-RATA PERTUMBUHAN TAHUNAN

Compound Of Annual Growth

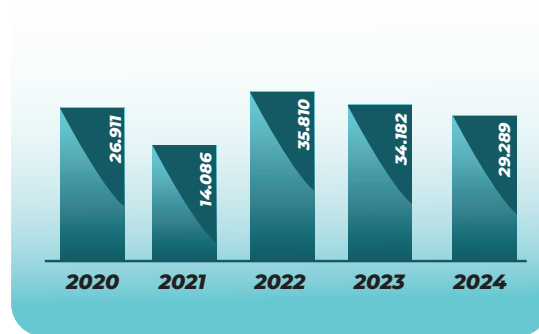
Total Aset (Juta/Rp)

Total Assets (Million/IDR)



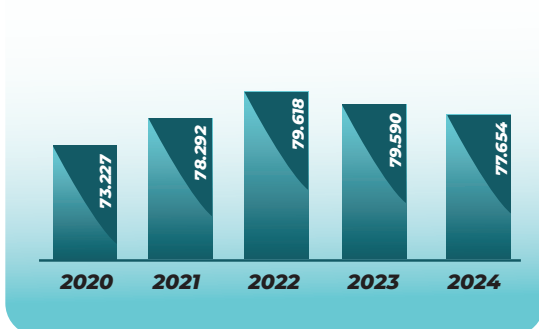
Total Liabilitas (Juta/Rp)

Total Liabilitas (Million/IDR)



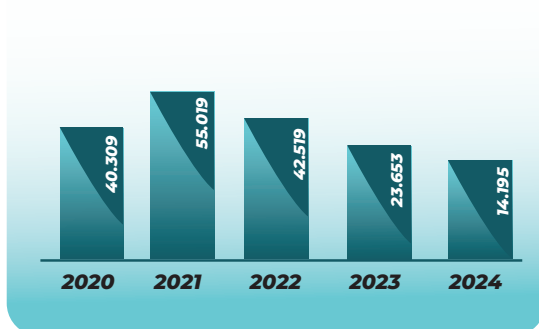
Ekuitas

Equity



Pendapatan Usaha

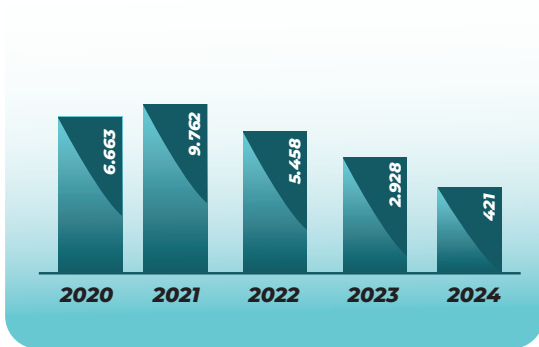
Revenue





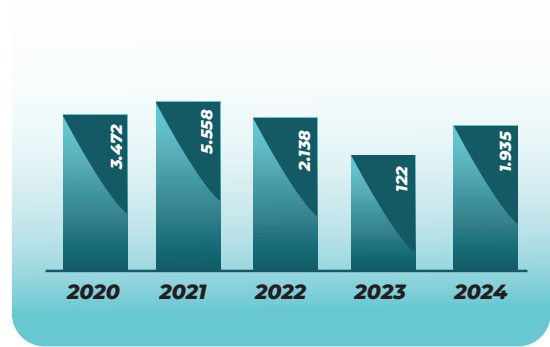
Laba Usaha (Juta/Rp)

Operating Profit (Million/IDR)



Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Juta/Rp)

Total Comprehensive Income for the Year (Million IDR)



INFORMASI SAHAM

Shares Information

Sepanjang tahun 2024, Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan kinerja yang cukup resilien meskipun menghadapi tantangan global dan momentum politik domestik. BEI mencatat 187 penawaran umum, termasuk 35 emiten baru, dengan total nilai penghimpunan dana mencapai Rp251,04 triliun, melampaui target Rp200 triliun.

IHSG sendiri ditutup pada level 7.036,57 pada 27 Desember 2024, dengan kapitalisasi pasar meningkat sebesar 5,05% year-to-date (ytd) menjadi Rp12.191 triliun. IHSG juga sempat mencapai titik tertinggi sepanjang masa di level 7.905 pada 19 September 2024.

Data mengenai performa saham Perseroan dengan kode perdagangan ATAP, termasuk analisis perbandingan antara tahun 2024 dan 2023, dapat ditemukan dalam tabel dan grafik yang disediakan.

Throughout 2024, the Indonesia Stock Exchange (IDX) showed quite resilient performance despite facing global challenges and domestic political momentum. IDX recorded 187 public offerings, including 35 new issuers, with a total fundraising value reaching IDR251.04 trillion, exceeding the target of IDR200 trillion.

The JCI itself closed at 7,036.57 on December 27, 2024, with market capitalization increasing by 5.05% year-to-date (ytd) to IDR12,191 trillion. The JCI also reached an all-time high of 7,905 on September 19, 2024.

Data regarding the performance of the Company's shares with the trading code ATAP, including a comparative analysis between 2024 and 2023, can be found in the tables and graphs provided.

2024	Harga Saham/Share Price			Jumlah Saham Beredar Number of Outstanding Stock	Volume Perdagangan Trading Volume	Kapitalisasi Pasar (juta/Rp) Market Capitalization (in million/IDR)
	Terendah Low	Tertinggi High	Penutupan Close			
Triwulan 1 Q1	50	54	26	1.250.000.000	1.926	32.500.000.000
Triwulan 2 Q2	50	50	50	1.250.000.000	11	62.500.000.000
Triwulan 3 Q3	32	55	30	1.250.000.000	247.200	37.500.000.000
Triwulan 4 Q4	25	27	25	1.250.000.000	1.072	31.250.000.000

2023	Harga Saham/Share Price			Jumlah Saham Beredar Number of Outstanding Stock	Volume Perdagangan Trading Volume	Kapitalisasi Pasar (juta/Rp) Market Capitalization (in million/IDR)
	Terendah Low	Tertinggi High	Penutupan Close			
Triwulan 1 Q1	51	82	58	1.250.000.000	669.227.606	72.500.000.000
Triwulan 2 Q2	54	74	63	1.250.000.0001	17.919.9357	8.750.000.000
Triwulan 3 Q3	57	78	61	1.250.000.0008	0.435.6377	6.250.000.000
Triwulan 4 Q4	50	78	52	1.250.000.0004	7.599.916	65.000.000.000

*Pergerakan harga saham Perseroan pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik

*The movement of the Company's share price in 2024 can be viewed in the following graph:



AKTIVITAS PERDAGANGAN SAHAM

Shares Trading Activities

Selama tahun 2024, Perseroan tidak menjadi objek pengawasan khusus atau mendapat notasi istimewa dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, hingga akhir tahun tersebut, Perseroan tidak pernah dikenai sanksi terkait aktivitas perdagangan saham di BEI, termasuk penghentian sementara perdagangan atau penghapusan pencatatan.

Aksi Korporasi

Di sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melakukan tindakan korporasi yang akan memperbesar jumlah saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia

Sanksi Perdagangan Saham

Di tahun 2024, Perseroan tidak dikenakan sanksi yang dapat mengubah status pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, entah itu berupa penangguhan perdagangan sementara atau penghapusan pencatatan.

During 2024, the Company will not be the object of special supervision or receive special notation from the Indonesian Stock Exchange (BEI). In addition, until the end of that year, the Company had never been subject to sanctions related to share trading activities on the IDX, including temporary suspension of trading or delisting.

Corporate Action

Throughout 2024, the Company will not take any corporate actions that will increase the number of shares circulating on the Indonesian Stock Exchange.

Stock Trading Sanctions

In 2024, the Company will not be subject to sanctions that could change the listing status of its shares on the Indonesia Stock Exchange, whether in the form of temporary trading suspension or delisting.



02 LAPORAN MANAJEMEN

BAB MANAGEMENT REPORT



LAPORAN DEWAN KOMISARIS *Report of the Board of Commissioners*



H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE

Komisaris Utama
President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga PT Trimitra Prawara Goldland Tbk dapat menyelesaikan tahun 2024 dengan baik. Kami mewakili Dewan Komisaris mohon perkenan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Direksi atas kepemimpinan mereka yang efektif dalam mewujudkan rencana kerja Perseroan dan strategi di tengah berbagai tantangan secara ekonomi dan bisnis.

Honorable Shareholders and Stakeholders,

Thank God for all the blessings and grace that have been bestowed upon all of us by God Almighty so that PT Trimitra Prawara Goldland Tbk can finish 2024 well. On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our gratitude and appreciation to the Board of Directors for their effective leadership in realizing the Company's work plans and strategies amidst various economic and business challenges.

Tinjauan Umum

Bank Dunia memproyeksikan ekonomi global tumbuh pada angka 2,4% pada tahun 2024, terbebani oleh tekanan inflasi yang terus-menerus, kebijakan moneter yang ketat, dan ketidakpastian geopolitik seperti konflik Ukraina yang berkepanjangan dan ketegangan di Timur Tengah. Negara-negara maju, khususnya AS dan Zona Euro, menghadapi pertumbuhan yang lemah (1-1,5%) karena biaya pinjaman yang tinggi dan belanja konsumen yang lemah, sementara pasar negara berkembang seperti India dan Vietnam tetap relatif cerah dengan pertumbuhan di atas 5%. Namun, risiko seperti harga energi yang tidak stabil, gangguan terkait iklim, dan tekanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah mengancam pemulihan. Bank Dunia menekankan bahwa reformasi struktural, diversifikasi perdagangan, dan investasi hijau sangat penting untuk mengurangi risiko stagnasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi nasional tumbuh 4,9% secara tahunan pada Q1 2024, didorong oleh konsumsi domestik yang tangguh (55% dari PDB) dan investasi publik dalam proyek infrastruktur seperti Ibu Kota Negara (IKN). Namun, pertumbuhan sedikit melambat dibandingkan dengan 2023 (5,1%) karena ketidakpastian kebijakan terkait pemilu dan melemahnya permintaan ekspor untuk komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Inflasi tetap stabil pada 3,1% (dalam kisaran target BI), didukung oleh harga pangan yang terkendali, meskipun volatilitas rupiah dan suku bunga yang tinggi (BI-Rate sebesar 6%) membatasi ekspansi sektor swasta. BPS menyoroti bahwa kejelasan kebijakan pasca-pemilu dan percepatan industrialisasi hilir akan menjadi penting untuk mencapai target pertumbuhan 5% tahun ini di tengah tantangan global.

Corporate Action

The World Bank projects the global economy to grow at a modest 2.4% in 2024, weighed down by persistent inflationary pressures, tight monetary policies, and geopolitical uncertainties such as the prolonged Ukraine conflict and Middle East tensions. Advanced economies, particularly the U.S. and Eurozone, face subdued growth (1-1.5%) due to high borrowing costs and weak consumer spending, while emerging markets like India and Vietnam remain relative bright spots with growth above 5%. However, risks such as volatile energy prices, climate-related disruptions, and debt distress in low-income countries threaten recovery. The World Bank emphasizes that structural reforms, trade diversification, and green investment are critical to mitigating stagnation risks.

According to Indonesia's Central Statistics Agency (BPS), the national economy grew 4.9% year-on-year in Q1 2024, driven by resilient domestic consumption (55% of GDP) and public investment in infrastructure projects like the Nusantara Capital City (IKN). However, growth moderated slightly compared to 2023 (5.1%) due to election-related policy uncertainty and weaker export demand for commodities like coal and palm oil. Inflation remained stable at 3.1% (within BI's target range), supported by controlled food prices, though rupiah volatility and high interest rates (BI-Rate at 6%) constrained private sector expansion. BPS highlights that post-election policy clarity and accelerated downstream industrialization will be pivotal to achieving the year's 5% growth target amid global headwinds.



Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Tahun 2024 menjadi tahun penuh dinamika bagi sektor properti, di tengah situasi politik nasional dan tantangan makroekonomi global. Meski industri properti dikenal sebagai sektor “tahan banting”, perilaku wait-and-see masyarakat akibat ketidakpastian politik dan fluktuasi suku bunga (BI-Rate 6%) berdampak pada penurunan permintaan properti kelas menengah. Namun, urbanisasi yang tinggi tetap mendorong kebutuhan hunian terjangkau, meski penyediaan hunian representatif di pusat kota menghadapi kendala kompleks, seperti keterbatasan kuota KPR bersubsidi dari perbankan (faktor uncontrollable) dan profil keuangan calon pembeli yang tidak

Di tengah tantangan inflasi (3,5%) dan daya beli yang tertekan, Dewan Komisaris mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, Dewan Direksi telah menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Perseroan, khususnya dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama periode tersebut. Perseroan berhasil memanfaatkan peluang melalui penguatan digitalisasi pemasaran dan insentif pemerintah (PPN-DTP), yang berkontribusi pada peningkatan transaksi unit komersial. Kinerja tahun ini menegaskan ketangguhan model bisnis Perseroan dalam menghadapi volatilitas pasar.

Assessment Of The Performance Of The Board Of Directors

The year 2024 proved to be a dynamic period for the property sector, amid national political developments and global macroeconomic challenges. Although the property industry is often regarded as a “resilient sector,” the wait-and-see attitude among the public, driven by political uncertainty and interest rate fluctuations (BI-Rate at 6%), led to a decline in demand for mid-range properties. Nevertheless, high urbanization continued to drive the need for affordable housing, despite the complexities faced in providing representative housing in city centers, such as limited quotas for subsidized mortgages from banks (uncontrollable factors) and the financial profiles of prospective buyers failing to meet credit requirements.

Amid inflation challenges (3.5%) and weakened purchasing power, the Board of Commissioners noted that throughout 2024, the Board of Directors made significant contributions to the progress of the Company, particularly in overcoming various challenges encountered during the period. The Company successfully seized opportunities by strengthening digital marketing efforts and leveraging government incentives (VAT-DTP), which contributed to increased commercial unit transactions. This year’s performance underscores the resilience of the Company’s business model in navigating market volatility.

Prospek Usaha Tahun 2025

Menurut World Bank dan IMF, pertumbuhan ekonomi global pada 2025 diproyeksikan stabil di kisaran 2.7–3%, lebih tinggi dibandingkan 2024 (2.4%), seiring penurunan inflasi dan normalisasi suku bunga di AS dan Eropa. Sektor teknologi hijau (green tech) dan energi terbarukan akan menjadi penggerak utama, didorong investasi senilai \$1,7 triliun dalam transisi energi (data IEA). Namun, risiko seperti ketegangan geopolitik (Taiwan, Timur Tengah), perlambatan Tiongkok (proyeksi IMF: 4,5% pada 2025), dan utang negara berkembang tetap menjadi tantangan. IMF menekankan pentingnya diversifikasi rantai pasok dan pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas.

Tahun 2025 berpotensi menjadi tahun pemulihan struktural bagi Indonesia jika kebijakan pasca-Pemilu 2024 fokus pada reformasi investasi dan stabilitas makro. Sementara global tetap rentan gejolak, kombinasi demografi muda, kekayaan sumber daya, dan momentum transisi energi bisa menjadikan Indonesia bright spot di Asia Tenggara.

Untuk menghadapi kondisi di atas, Perseroan perlu menyiapkan strategi yang mampu memberikan dukungan finansial bagi para pengembang dan calon pembeli rumah. Langkah ini mencakup pengawasan ketat terhadap aktivitas spekulatif di sektor properti, pemanfaatan kebijakan yang tepat serta dukungan regulasi, dan pengembangan properti yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan serta keterjangkauan harga.

Business Prospects In 2025

According to the World Bank and IMF, global economic growth in 2025 is projected to remain stable at around 2.7–3%, higher than in 2024 (2.4%), driven by declining inflation and the normalization of interest rates in the US and Europe. The green technology and renewable energy sectors are expected to be the main drivers of growth, supported by \$1.7 trillion in energy transition investments (IEA data). However, risks such as geopolitical tensions (Taiwan, the Middle East), China's economic slowdown (IMF projection: 4.5% in 2025), and mounting debt in developing countries remain key challenges. The IMF emphasizes the importance of supply chain diversification and leveraging AI to boost productivity.

The year 2025 holds the potential to be a period of structural recovery for Indonesia, provided that post-2024 election policies focus on investment reform and macroeconomic stability. While global uncertainties persist, a combination of a young population, abundant natural resources, and momentum in the energy transition could position Indonesia as a bright spot in Southeast Asia.

To address these conditions, the Company needs to prepare strategies that provide financial support to both developers and prospective homebuyers. This includes closely monitoring speculative activities in the property sector, leveraging appropriate policies and regulatory support, and developing properties that prioritize environmental sustainability and affordability.



Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Dewan Komisaris dengan penuh kebanggaan menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai prioritas utama dalam menjalankan operasional Perseroan. Kami memposisikan GCG sebagai pondasi fundamental untuk menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan bisnis, sekaligus menjadi kerangka acuan dalam pengambilan keputusan strategis yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemegang saham, mitra bisnis, hingga karyawan. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, proses pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta budaya kerja yang mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika tertinggi.

Sebagai bentuk implementasi nyata, Perseroan telah menginisiasi sejumlah langkah kunci, antara lain pembentukan komite khusus untuk pengawasan bidang strategis, penyelenggaraan pelatihan berkala bagi anggota Dewan dan jajaran direksi mengenai praktik GCG terkini, serta evaluasi secara berkala terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja operasional. Kami yakin bahwa pendekatan sistematis ini tidak hanya memperkuat fondasi tata kelola, tetapi juga menegaskan posisi Perseroan sebagai teladan yang konsisten dalam menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.

Implementation Of Good Corporate Governance

The Board of Commissioners proudly reports on the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a top priority in running the Company's operations. We position GCG as a fundamental foundation to maintain integrity, transparency, and business sustainability, as well as a reference framework in strategic decision-making that considers the interests of all stakeholders—from shareholders, business partners, to employees. This commitment is realized through consistent policies, transparent and accountable decision-making processes, and a work culture that prioritizes compliance with regulations and the highest ethical standards.

As a form of real implementation, the Company has initiated a number of key steps, including the formation of a special committee for strategic field supervision, holding periodic training for members of the Board and the board of directors on the latest GCG practices, and periodic evaluation of the level of compliance and operational performance. We believe that this systematic approach not only strengthens the foundation of governance, but also confirms the Company's position as a consistent role model in creating added value for stakeholders and driving long-term sustainable growth.



Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direksi, seluruh jajaran karyawan, dan mitra bisnis atas dukungan yang konsisten dan luar biasa. Kami yakin bahwa dengan kolaborasi dan dukungan tersebut, Perseroan akan terus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan meraih pertumbuhan yang konsisten di masa depan.

Closing Statement

The Board of Commissioners extends its sincere appreciation to all stakeholders for the trust they have placed in us. We also express our gratitude to the Board of Directors, all employees, and business partners for their consistent and remarkable support. We are confident that with this collaboration and support, the Company will continue to create sustainable added value and achieve consistent growth in the future.

Atas Nama Dewan Komisaris

On behalf of the Board of Commissioners

H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE

Komisaris Utama
/President Commissioner



LAPORAN DIREKSI
Board Of Directors' Report



Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak

Direktur Utama
President Director



Yang Terhormat Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan,

Dengan rasa syukur yang mendalam, Dewan Direksi dengan bangga mempersembahkan Laporan Tahunan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk yang menguraikan berbagai pencapaian, hambatan, serta tekad kuat kami dalam memenuhi tanggung jawab korporasi kepada seluruh pihak terkait. Melalui dokumen ini, kami berupaya memberikan tinjauan komprehensif mengenai performa Perseroan sepanjang tahun 2024, termasuk inisiatif strategis yang telah diimplementasikan untuk memastikan perkembangan berkelanjutan dan penciptaan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang senantiasa diberikan kepada PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, dan menyatakan tekad kami untuk senantiasa berupaya mencapai keunggulan dan kesuksesan jangka panjang.

Dear Honorable Shareholders and Stakeholders,

With profound gratitude, the Board of Directors proudly presents the Annual Report of PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, which outlines our achievements, challenges, and steadfast commitment in fulfilling our corporate responsibilities to all related parties. Through this report, we aim to provide a comprehensive overview of the Company's performance throughout 2024, including the strategic initiatives we have implemented to ensure sustainable growth and value creation for all stakeholders. We extend our deepest appreciation for the continuous support and trust placed in PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, and reaffirm our determination to persistently pursue excellence and long-term success.

Tinjauan Kinerja Perseroan

Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi Perseroan, terutama akibat ketidakpastian politik selama Pemilu dan tekanan ekonomi global yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Volatilitas suku bunga dan inflasi material konstruksi turut mempengaruhi margin operasional. Namun, melalui strategi konsolidasi yang fokus pada efisiensi biaya, optimalisasi digital marketing, serta pemanfaatan insentif pemerintah (PPN-DTP), Perseroan berhasil mempertahankan pertumbuhan penjualan di segmen hunian terjangkau dan meningkatkan realisasi proyek strategis.

Perseroan juga merespons tantangan dengan memperkuat kolaborasi fintech untuk alternatif pembiayaan, serta inovasi produk berbasis kebutuhan generasi milenial, seperti konsep smart home dan desain instagrammable. Langkah-langkah ini, ditambah dengan penguatan tata kelola (GCG), menjadi fondasi untuk menghadapi dinamika pasar di 2025, sekaligus memastikan kesiapan Perseroan dalam menyambut peluang pemulihan ekonomi dan program pemerintah di sektor properti.

Prospek Usaha Tahun 2025

Prospek industri properti Indonesia pada tahun 2025 diprediksi menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan, didorong oleh berbagai faktor utama. Pemerintah berperan besar melalui pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dan pembentukan Kementerian Perumahan yang baru, yang berfokus pada penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui insentif PPN-DTP dan KPR bersubsidi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 5,1–5,3% menurut World Bank diperkirakan akan meningkatkan daya beli kelas menengah. Urbanisasi yang pesat, dengan 56% populasi diproyeksikan tinggal di kawasan perkotaan pada 2025, serta peningkatan jumlah penduduk milenial (usia 25–40 tahun), akan mendorong permintaan hunian terjangkau di daerah suburban yang memiliki akses ke transportasi massal seperti LRT, MRT, dan Jabodebek. Di sisi lain, adopsi teknologi proptech

Company Performance Review

The year 2024 presented significant challenges for the Company, primarily due to political uncertainty during the General Election and global economic pressures that impacted consumer purchasing power. Volatility in interest rates and rising construction material inflation also affected operational margins. However, through a consolidation strategy focused on cost efficiency, digital marketing optimization, and leveraging government incentives (VAT-DTP), the Company successfully maintained sales growth in the affordable housing segment and improved the realization of strategic projects.

The Company responded to these challenges by strengthening fintech collaborations for alternative financing solutions and introducing innovative products tailored to millennial needs, such as smart home concepts and instagrammable designs. These measures, combined with enhanced corporate governance (GCG), laid the foundation to navigate market dynamics in 2025 while positioning the Company to capitalize on economic recovery opportunities and government property sector initiatives.

Business Prospects In 2025

The outlook for Indonesia's property industry in 2025 is predicted to show a significant recovery, driven by several key factors. The government plays a major role through the implementation of the 3 Million Houses Program and the establishment of a new Ministry of Housing, which focuses on providing subsidized housing for low-income communities (MBR) through VAT-DTP incentives and subsidized mortgages (KPR). In addition, economic growth, which is projected to reach 5.1–5.3% according to the World Bank, is expected to boost the purchasing power of the middle class. Rapid urbanization, with 56% of the population projected to live in urban areas by 2025, coupled with the increasing number of millennials (aged 25–40), will drive demand for affordable housing in suburban areas with access to mass transportation such as LRT, MRT, and Jabodebek. On the other hand, the adoption of proptech technologies such as AI, virtual reality



seperti AI, virtual reality (VR), dan platform digital akan memperluas jangkauan pasar properti dan meningkatkan efisiensi transaksi.

Beberapa segmen properti diperkirakan menjadi motor pertumbuhan utama. Permintaan terhadap hunian terjangkau, terutama rumah subsidi (FLPP) dan rumah cluster dengan harga di bawah Rp500 juta, akan tetap dominan dan menguasai sekitar 70% pasar. Di sektor properti komersial, pertumbuhan data center, gudang logistik, dan ruang kerja bersama (co-working space) akan semakin pesat, seiring dengan ekspansi e-commerce dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital.

Namun demikian, sektor properti juga menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya suku bunga acuan (BI-Rate). Jika Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga di kisaran 6%, maka beban cicilan KPR akan tetap tinggi, sehingga dapat menghambat kemampuan beli masyarakat berpenghasilan rendah dan menekan permintaan di segmen rumah subsidi.

Secara keseluruhan, dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, serta pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, tahun 2025 berpotensi menjadi tahun yang positif bagi sektor properti Indonesia. Namun, pelaku industri tetap harus waspada terhadap tantangan suku bunga tinggi serta ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi daya beli dan investasi.

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan hunian, serta berupaya aktif untuk mendengar aspirasi dan memberikan nilai tambah melalui peningkatan infrastruktur publik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, Perseroan juga berperan aktif dalam berbagai inisiatif pengembangan masyarakat, khususnya dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi, dengan fokus pada pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

(VR), and digital platforms will expand the reach of the property market and enhance transaction efficiency.

Several property segments are expected to become the main growth drivers. Demand for affordable housing, particularly subsidized houses (FLPP) and cluster homes priced below IDR 500 million, will remain dominant, accounting for around 70% of the market. In the commercial property sector, the growth of data centers, logistics warehouses, and co-working spaces will accelerate, in line with the expansion of e-commerce and the growth of digital micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs).

Nevertheless, the property sector also faces challenges that must be anticipated. One major challenge is the high benchmark interest rate (BI-Rate). If Bank Indonesia maintains interest rates at around 6%, the mortgage burden will remain high, potentially hindering the purchasing ability of low-income communities and suppressing demand in the subsidized housing segment.

Overall, with the synergy between government policies, technological advancements, as well as economic growth and urbanization, 2025 has the potential to be a positive year for Indonesia's property sector. However, industry players must remain cautious of the challenges posed by high interest rates and global uncertainties that could impact purchasing power and investment levels.

The Company remains committed to fulfilling the fundamental housing needs of the community and actively strives to listen to aspirations and deliver added value by enhancing public infrastructure that benefits all segments of society. Additionally, the Company actively engages in various community development initiatives, particularly in accelerating economic recovery efforts, with a focus on empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).



Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Bagi Dewan Direksi, implementasi Good Corporate Governance (GCG) bukan sekadar kewajiban formal, melainkan pilar utama yang menopang perkembangan dan kelangsungan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Dengan konsisten menerapkan berbagai kebijakan dan praktik terbaik, kami menjamin bahwa seluruh proses pengambilan keputusan senantiasa mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholders, didukung oleh prinsip transparansi dan pertanggungjawaban yang ketat. Keyakinan kami teguh bahwa penerapan GCG secara menyeluruh akan mendorong pencapaian kinerja puncak sekaligus memperkokoh relasi dengan semua pihak yang berkepentingan.

Komitmen nyata kami dalam implementasi GCG diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pembentukan komite khusus, penyelenggaraan program pelatihan berkelanjutan bagi SDM, serta pemantauan berkala atas tingkat kepatuhan dan capaian kinerja korporasi. Kami secara konsisten berupaya menyempurnakan praktik GCG guna menciptakan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan dan seluruh stakeholders. Keyakinan kami tetap kuat bahwa Perseroan akan terus menjadi rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang unggul.

Implementation Of Good Corporate Governance

For the Board of Directors, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is not merely a formal obligation, but rather a fundamental pillar supporting the company's sustainable growth and business continuity. Through consistent application of policies and best practices, we ensure all decision-making processes carefully consider stakeholder interests, underpinned by strict principles of transparency and accountability. We firmly believe that comprehensive GCG implementation will drive peak performance while strengthening relationships with all relevant parties.

Our tangible commitment to GCG implementation is demonstrated through strategic initiatives, including the establishment of dedicated committees, continuous employee training programs, and regular monitoring of corporate compliance and performance. We persistently strive to refine GCG practices to deliver optimal added value for the company and all stakeholders. We maintain firm confidence that the Company will continue to serve as a benchmark for exemplary corporate governance practices.



Penutup

Atas nama Dewan Direksi, dengan penuh ketulusan kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham, mitra strategis, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kepercayaan yang tak ternilai kepada Perseroan. Ungkapan terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada Dewan Komisaris beserta jajaran pendukungnya, serta seluruh karyawan yang telah berkontribusi dengan dedikasi luar biasa dalam mendorong kemajuan Perseroan sepanjang tahun 2024.

Tak lupa, kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat atas segala bentuk dukungannya. Kami bertekad untuk senantiasa berinovasi dan berkomitmen penuh dalam menciptakan pertumbuhan berkelanjutan yang mampu memberikan nilai unggul bagi seluruh pemangku kepentingan.

Closing Statement

On behalf of the Board of Directors, we sincerely extend our deepest gratitude to all shareholders, strategic partners, and stakeholders for their invaluable trust and unwavering support to the Company. We also express our profound appreciation to the Board of Commissioners and their supporting teams, as well as all employees who have demonstrated exceptional dedication in driving the Company's progress throughout 2024

Furthermore, we gratefully acknowledge the support from the Government and society at large. We remain steadfast in our commitment to innovate and deliver sustainable growth that creates superior value for all stakeholders.

Atas nama Direksi,

On behalf of the Board of Directors,

Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak
Direktur Utama/ President Director

BAB

03



PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND TBK

**PROFIL
PERUSAHAAN**
COMPANY PROFILE



PROFIL PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND TBK

Profile Of Pt Trimitra Prawara Goldland Tbk

Sebagai pengembang properti yang konsisten berkembang, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk berfokus pada penyediaan hunian bersubsidi berkualitas tinggi bagi kalangan masyarakat menengah. Dengan visi yang menyelaraskan estetika arsitektur dengan prinsip keberlanjutan, kami menghadirkan kawasan residensial terpadu yang didesain secara holistik. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, kami meyakini bahwa rumah adalah wadah bagi kebahagiaan dan kenangan yang terukir, bukan sekadar struktur fisik. Oleh karena itu, kami berkomitmen menghadirkan solusi hunian yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui desain inklusif dan lingkungan yang menginspirasi.

As a steadily growing property developer, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk is dedicated to delivering high-quality subsidized housing solutions for Indonesia's middle-class communities. Guided by a vision that harmonizes architectural aesthetics with sustainable principles, we craft holistic residential communities designed to foster connection and well-being. We believe a home transcends its physical structure—it is where life's cherished moments unfold and legacies begin. Driven by this human-centric philosophy, we are committed to creating functional living spaces that not only address practical needs but also elevate lifestyles through inclusive design and inspiring environments.

INFORMASI PERSEROAN

Company Information



Nama Perseroan

Name of the Company

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

23 Maret 2015

March 23rd, 2015



Dasar Pendirian

Legal Standing

Akta Pendirian PT Trimitra Prawara Goldland, Tbk No. 13 tanggal 23 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Kota Bogor, memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014092.AH.01.01 tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015, dan terdaftar dalam daftar Perseroan No. AHU-0036507.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 39 dan Tambahan Berita Negara No. 27165 Tahun 2015. ("Akta Pendirian").

Deed of Establishment of PT Trimitra Prawara Goldland Tbk No. 13 on March 23, 2015, which was made in the presence of Dede Munajat, SH., Notary in Bogor City, obtaining approval from the Minister Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU 0014092 AH.01.01 of 2015 dated 27 March 2015 and registered in the register of Companies No. AHU-0036507.AH01.11 Year 2015 dated 27 March 2015, and has been announced in State Gazette No. 39 and Supplement to State Gazette No. 27165 Of 2015. ("Deed of Establishment").



Akta Perubahan Terakhir

Latest Amendment

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 139 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Christina S.H., M.Hum., M.Kn. notaris di Jakarta Barat, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0048003.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Juli 2020, serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU AH.01.03-0288988 tanggal 14 Juli 2020.

The Company's articles of association have been amended several times, the latest amendment is based on Deed No. 139 dated July 13, 2020, made before Christina S.H., M.Hum., M.Kn. notary in West Jakarta, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHU-0048003.AH.01.02.TAHUN 2020 dated July 14, 2020, has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter No. AHU AH.01.03-0288988 July 14, 2020



Bidang Usaha

Line of Business

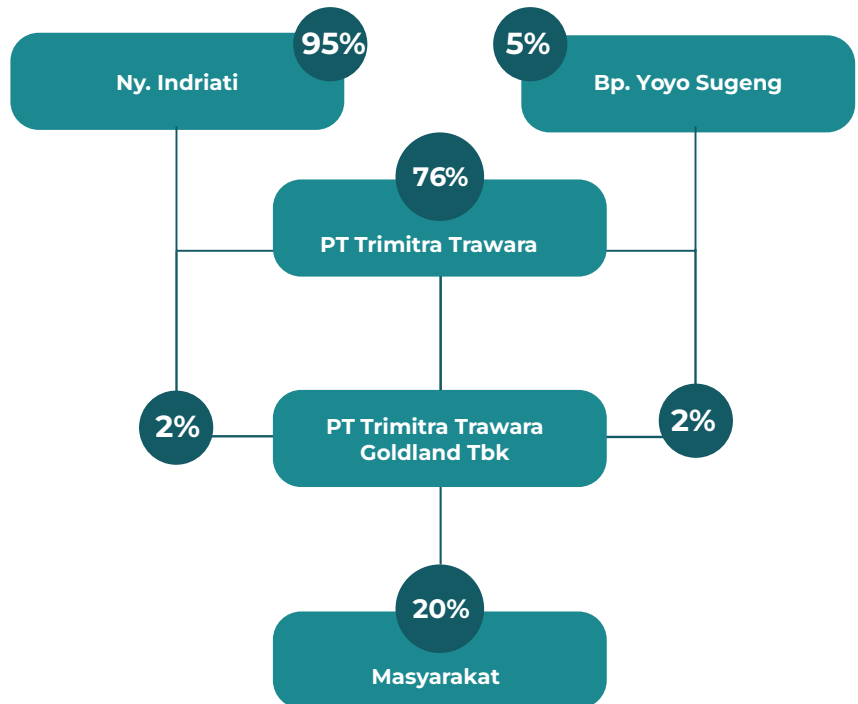
Pengembang Properti

Property Developer



Pemegang Saham

Shareholders



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham dengan nominal Rp40 (empat puluh Rupiah) per saham.

IDR160,000,000,000 (one hundred and sixty billion Rupiah) consisting of 4,000,000,000 (four billion) shares with a nominal value of IDR40 (forty Rupiah) per share.



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh miliar) saham dengan nominal Rp40 (empat puluh Rupiah) per saham.

IDR50,000,000,000 (fifty billion Rupiah) consisting of 1,250,000,000 (one billion two hundred and fifty million) shares with a nominal value of IDR40 (forty Rupiah) per share.



Bursa Efek
Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange



Kode Perdagangan
Ticker Code

ATAP
ATAP



Akses Informasi
Information Access

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
Jl. H. Junaedi No.1 RT 12 RW 03, Cipete Selatan,
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410
Telepon : +62251 8574836
E-mail : corscec.tpg@gmail.com
Website : www.trimitraprawaraland.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN *Corporate Brief History*

Sejak berdirinya pada 23 Maret 2015, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk telah menjadi bagian integral dalam pembangunan hunian inklusif bagi beragam lapisan masyarakat Indonesia. Komitmen ini tercermin dari rangkaian proyek perumahan yang tidak hanya menjawab kebutuhan fisik, tetapi juga memperkuat fondasi sosial-ekonomi komunitas. Puncak perjalanan korporat Perseroan ditandai dengan transformasi menjadi entitas publik pada tahun 2020 melalui Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), sebuah pencapaian yang mencerminkan kepercayaan publik yang semakin kuat.

Dari izin lokasi awal seluas 200.000 m², Perseroan membuktikan kapasitas operasionalnya dengan menyelesaikan pembangunan 69.682 m² kawasan hunian dalam tahun pertama. Ekspansi berkelanjutan kemudian mendorong perluasan izin lokasi hingga 933.000 m² pada 2019, membuka jalan bagi pengembangan proyek strategis di wilayah seperti Sawangan dan Cibungbulang, Jawa Barat, pada 2021. Setiap tahap pertumbuhan ini tidak hanya memperluas portofolio properti, tetapi juga memperkuat posisi Perseroan sebagai pengembang yang responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.

Since its establishment on March 23, 2015, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk has played an integral role in delivering inclusive housing solutions for diverse segments of Indonesian society. This steadfast commitment is reflected in its portfolio of residential projects, which not only address physical housing needs but also strengthen the socio-economic foundations of communities. A pivotal milestone in the Company's journey was its transformation into a public entity in 2020 through an Initial Public Offering (IPO), a testament to growing public trust in its vision and execution.

Starting with an initial land permit of 200,000 m², the Company demonstrated its operational capacity by completing 69,682 m² of residential developments within its first year. Sustained expansion efforts led to the extension of land permits to 933,000 m² by 2019, paving the way for strategic projects in areas such as Sawangan and Cibungbulang, West Java, in 2021. Each phase of growth has not only expanded the Company's property portfolio but also reinforced its position as a market-responsive developer attuned to evolving societal needs.



JEJAK LANGKAH

Milestones

Perseroan berhasil menyelesaikan pembangunan unit hunian seluas 69.682 m², menandai pencapaian operasional pertama.

The Company successfully delivered 69,682 m² of residential units, marking its first operational milestone.

- Dinobatkan sebagai “Mitra Pengembang Terbaik” oleh Bank Tabungan Negara (BTN) atas kolaborasi yang luar biasa.
- Meraih penghargaan “Penjualan Terbanyak & Purchase Agreement” dari APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia).
- Recognized as “Best Developer Partner” by Bank Tabungan Negara (BTN) for Best Development Partner.
- Awarded “Highest Sales Volume & Purchase Agreement” by APERSI (Indonesian Real Estate Association).

- Mengantongi persetujuan regulator untuk memasarkan Unit Rumah Subsidi, memperluas aksesibilitas.
- Mencapai tonggak korporat penting melalui Penawaran Umum Perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia.
- Secured regulatory approval to market Subsidized Housing Units, broadening accessibility.
- Achieved a landmark corporate milestone with its Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange.

Dianugerahi gelar “Developer dengan Realisasi Kredit Tertinggi” oleh BTN, menegaskan keandalan finansial.

Honored by BTN as “Developer with Highest Credit Realization”, underscoring financial reliability.

- Membuka cluster baru di wilayah Cibungbulang Town Hills, segmentasi komersial 2 lantai.
- Meluncurkan konsep baru perumahan subsidi yang lebih trendi dengan spesifikasi di atas standar.
- Peresmian fasilitas umum berupa rumah ibadah di perumahan Cibungbulang Town Hills.
- Dirut Perseroan mendapatkan penghargaan sebagai **Indonesia Most Powerful Women 2024**.
- Opening a new cluster in the Cibungbulang Town Hills area, 2 -storey commercial segmentation.
- Launch a new concept of more trendy subsidized housing with specifications above standards.
- The inauguration of public facilities in the form of houses of worship in Cibungbulang Town Hills housing.
- The Director of the Company received an award as **Indonesia Most Powerful Women 2024**.

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (TPGL) didirikan pada 23 Maret 2015, memulai proyek perdananya dengan pengembangan properti hunian tapak seluas 130.400 m² berdasarkan izin lokasi awal seluas 200.000 m².

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk was established on 23 March 2015, launching its inaugural project with the development of landed residential properties spanning 130,400 m² under an initial land permit of 200,000 m²

- Memperluas izin lokasi dari 183.000 m² menjadi 383.000 m², mencerminkan pertumbuhan strategis.
- Menyelesaikan pengembangan hunian seluas 183.000 m², menunjukkan kemampuan eksekusi yang skalabel.
- Expanded land permits from 183,000 m² to 383,000 m², reflecting strategic growth.
- Completed residential developments across 183,000 m², demonstrating scalable execution.

Izin lokasi kembali ditingkatkan dari 550.000 m² menjadi 933.000 m², memperkuat kapasitas Perseroan untuk proyek berskala besar.

Further increased land permits from 550,000 m² to 933,000 m², solidifying the Company’s capacity for large-scale projects.

- Meluncurkan Sawangan Residences (19.000 m²) di Depok, Jawa Barat, menasar gaya hidup urban modern.
- Menyelesaikan 30.400 m² unit hunian di Cibungbulang Town Hill, memperkuat infrastruktur komunitas.
- Launched Sawangan Residences (19,000 m²) in Depok, West Java, targeting modern urban living.
- Delivered 30,400 m² of residential units at Cibungbulang Town Hill, enhancing community infrastructure.

- Mengakuisisi tambahan lahan seluas ±2 hektare di Cibungbulang Town Hills untuk ekspansi masa depan.
- Mengamankan izin pengembangan seluas ±15 hektare di Bekasi, menandakan penetrasi pasar yang strategis.
- Acquired ±2 hectares of additional land at Cibungbulang Town Hills for future expansion.
- Secured permits for a ±15-hectare development in Bekasi, signaling strategic market penetration.



PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2024 *Significant Events In 2024*



Ibu Indriati selaku Direktur Utama PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk, mendapatkan penghargaan dengan kategori Indonesia Most Powerful Women 2024 in Providing Affordable Residential to Improve Quality of Life dalam ajang Indonesia Most Powerful Women Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Herstory



Mrs. Indriati, as the President Director of PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk, received an award in the category of Indonesia Most Powerful Women 2024 in Providing Affordable Residential to Improve Quality of Life at the Indonesia Most Powerful Women Awards 2024 event organized by Herstory.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards And Certifications





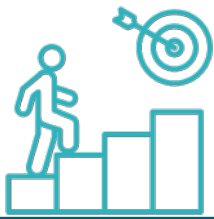
VISI DAN MISI

Corporate Vision And Mission



VISI/ Vision

- Menjadi perusahaan Developer yang terdepan dalam berkarya, bermanfaat bagi pemegang saham dan seluruh stakeholders yang terkait serta dipercaya oleh masyarakat;
- Menjadi perusahaan Developer yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman khususnya dunia digital;
- Menjadi perusahaan Developer yang berkontribusi dalam pertumbuhan Ekonomi.
- *Becoming a Developer company that is at the forefront of work, beneficial to shareholders and all relevant stakeholders, and trusted by the community;*
- *Becoming a Developer company that can adapt to the times, especially the digital world;*
- *Becoming a Developer company that contributes to economic growth*



MISI/ Mission

- Melakukan usaha di bidang pembangunan hunian murah untuk memenuhi ketimpangan antara kebutuhan dan penawaran hunian yang masih timpang;
- Membangun hunian terjangkau bagi masyarakat dengan lokasi yang strategis;
- Melakukan penambahan land bank pada wilayah-wilayah strategis;
- Berkomitmen meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan nilai tambah serta manfaat bagi perusahaan;
- Bekerja sama dan membangun aliansi strategis dengan mitra yang mempunyai mutual benefit;
- Memperluas bidang usaha lainnya yang menunjang industri properti;
- Bersinergi dengan peraturan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dan dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan.
- *Conducting business in the field of low-cost housing development to fill the gap between housing needs and supply which is still unequal;*
- *Building affordable housing for people in strategic locations;*
- *Performing additional land banks in strategic areas;*
- *Committed to increase the ability of Human Resources (HR) to provide added value and benefits to the company;*
- *Cooperating and building strategic alliances with partners who have mutual benefits;*
- *Expanding other business fields that support the property industry;*
- *Synergizing with government regulations to improve people's welfare by carrying out developments that are environmentally friendly and can contribute positively to the environment.*

KEGIATAN USAHA Business Activities

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direksi, seluruh jajaran karyawan, dan mitra bisnis atas dukungan yang konsisten dan luar biasa. Kami yakin bahwa dengan kolaborasi dan dukungan tersebut, Perseroan akan terus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan meraih pertumbuhan yang konsisten di masa depan.

The Board of Commissioners extends its sincere appreciation to all stakeholders for the trust they have placed in us. We also express our gratitude to the Board of Directors, all employees, and business partners for their consistent and remarkable support. We are confident that with this collaboration and support, the Company will continue to create sustainable added value and achieve consistent growth in the future.

Nama Proyek Project Name	Pengelolaan Administrator	Jenis Properti Property Type	Jumlah Unit Number of Units	Dipasarkan sejak Marketed since
Buana Amali Residences	Perseroan	Komersial	28	2015
Cibungbulang Town Hill (CITOH)	Perseroan	Hunian dan Komersial	3.060	2016
Bumi Abhirama Residence	Perseroan	Komersial	125	2021

Sebaran proyek properti Perseroan hingga 31 Desember 2024 dapat dilihat pada bagan berikut:

The distribution of the Company’s property projects until 31 December 2024 showed in the following chart:


DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO



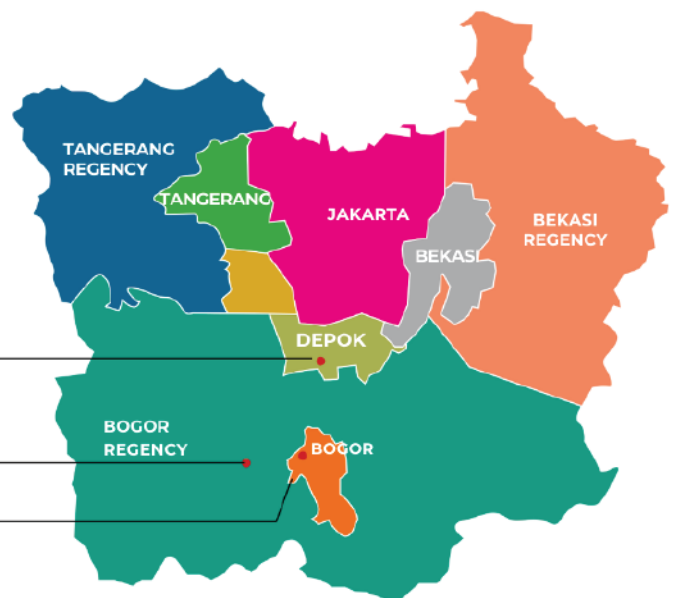
Bumi Abhirama Residence Komersil 125 Unit Sawangan, Kota Depok



Cibungbulang Town Hill Subsidi 3.060 Unit Cibungbulang Kab. Bogor



Buana Amali Residence Komersil 28 Unit Cimanggu, Kota Bogor



Hingga akhir tahun 2024, Perseroan telah melakukan perluasan lahan siap bangun untuk Perumahan Citoh, di Bogor serta ekspansi lahan di daerah Bekasi seluas ±15Ha.

Until the end of 2024, the Company has expanded ready-to-build land for Citoh Housing, in Bogor as well as land expansion in the Bekasi area covering an area of ±15Ha.



Strategi Jangka Panjang

Berdasarkan perkembangan sektor properti Indonesia dalam dekade terakhir—yang ditandai oleh pertumbuhan permintaan hunian terjangkau, meningkatnya kesadaran lingkungan, dan disrupsi digital pascapandemi—Perseroan merancang strategi jangka panjang berbasis tiga pilar utama:

1. Fokus pada Hunian Terjangkau dan Berkelanjutan

Memanfaatkan momentum program pemerintah seperti One Million Houses dan permintaan masyarakat urban, Perseroan akan mengembangkan klaster perumahan ramah lingkungan dengan harga kompetitif di wilayah penyangga kota besar (seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Cikarang). Proyek ini akan mengintegrasikan teknologi hemat energi (seperti panel surya dan sistem daur ulang air) serta aksesibilitas transportasi publik untuk memenuhi kebutuhan generasi muda dan keluarga baru.

2. Diversifikasi ke Aset Komersial yang Tahan Resesi

Belajar dari fluktuasi pasar properti 2018-2023, Perseroan akan memperkuat portofolio di segmen aset logistik (gudang pintar) dan pusat data (data centers), yang permintaannya terus tumbuh seiring ekspansi e-commerce dan digitalisasi UMKM. Kolaborasi dengan penyedia teknologi akan menjadi kunci dalam menghadirkan solusi smart warehouse berstandar global.

3. Transformasi Digital untuk Ketahanan Bisnis

Dengan mengadopsi proptech seperti platform virtual reality untuk tur properti dan sistem manajemen berbasis AI, Trimitra bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Strategi ini juga mencakup pengembangan ecosystem terintegrasi—dari pembiayaan syariah via fintech hingga layanan pascabeli—untuk membangun loyalitas pelanggan jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, Perseroan tidak hanya merespons tren pasar, tetapi juga membangun ketahanan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global dan transisi menuju ekonomi hijau.

Long-Term Strategy

Based on the development of the Indonesian property sector in the last decade—marked by the growth in demand for affordable housing, increasing environmental awareness, and post-pandemic digital disruption—the Company has designed a long-term strategy based on three main pillars:

1. Focus on Affordable and Sustainable Housing

Utilizing the momentum of government programs such as One Million Houses and demand from urban communities, the Company will develop environmentally friendly housing clusters with competitive prices in buffer areas of large cities (such as Tangerang, Depok, and Cikarang). This project will integrate energy-efficient technologies (such as solar panels and air recycling systems) and public transportation accessibility to meet the needs of the younger generation and new families.

2. Diversification into Recession-Resistant Commercial Assets

Learning from the 2018-2023 property market, the Company will strengthen its portfolio in the logistics asset segment (smart warehouses) and data centers, whose demand continues to grow along with the expansion of e-commerce and the digitalization of MSMEs. Collaboration with technology providers will be key in presenting global-standard smart warehouse solutions.

3. Digital Transformation for Business Resilience

By adopting proptech technologies such as a virtual reality platform for property tours and an AI-based management system, Trimitra aims to improve operational efficiency and customer experience. This strategy also includes the development of an integrated ecosystem—from sharia financing through fintech to after-sales services—to build long-term customer loyalty.

Through this approach, the Company is not only responding to market trends but also building business resilience amidst the global economy and the transition to a green economy.

Keanggotaan Profesional

Professional Membership

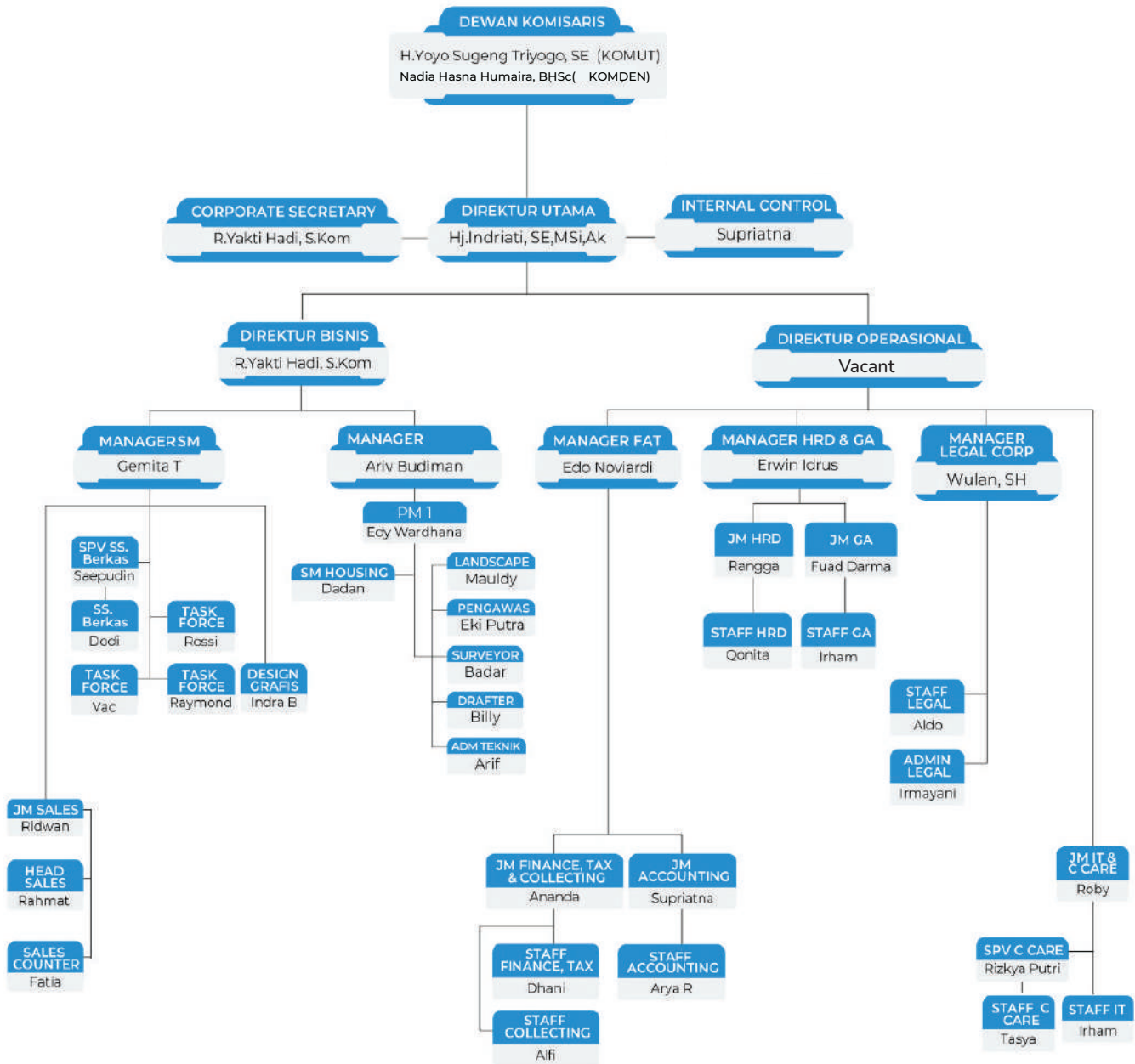
Nama Asosiasi Association Name	Keanggotaan Sejak Membersio Since	Masa Berlaku Validity period
ASPRUMNAS	2023	Sekarang / Now

Struktur Organisasi

Perseroan merupakan perusahaan tunggal dan melaksanakan aktivitas sebagai pengembang properti. Untuk itu Perseroan memiliki struktur organisasi yang memenuhi kebutuhan untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Hingga 31 Desember 2024, struktur organisasi Perseroan dapat dilihat pada bagan berikut:

Organizational Structure

The Company is a single company and carries out activities as a property developer. For this reason, the Company has an organizational structure that meets the needs to continue to grow and develop in a sustainable manner. As of December 31, 2024, the Company's organizational structure showed in the following chart:





H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE
Komisaris Utama
President Commissioner

Usia/Age

50 Tahun
Years Old

Kewarganegaraan/Nationality

Indonesia

Domisili/Domicile

Bogor

Mulai Menjabat/Starting Service

Tahun 2015, berdasarkan keputusan pemegang saham pada tanggal 23 Maret 2015

2015, based on shareholder decision on March 23rd 2015

Pendidikan/Education

Sarjana dari STIE Bungaya, Makassar, pada tahun 2000

Bachelor from STIE Bungaya, Makassar, in 2000

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

- Pemilik dan Komisaris utama PT Trimitra Prawara Developer sejak tahun 2009.
- Pemilik dan Komisaris Utama PT. BPR Syariah MITRA AMANAH sejak tahun 2014.
- Direktur PT. Mitra Alkhanka Niaga Kulineri sejak tahun 2019.
- Owner and main commissioner of PT Trimitra Prawara Developer since 2009.
- Owner and Head Commissioner of PT. BPR Syariah MITRA AMANAH since 2014.
- Director of PT. Partner of Alkhanka Niaga Culinary since 2019.

Pengalaman Sebelumnya /Previous Experience

- Berkarir dan pernah memangku jabatan strategis di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Pegawai Divisi Akunting Cabang Makassar pada tahun 1996.
- Pegawai Divisi Kredit Cabang Palangkaraya antara tahun 2005 - 2008.
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah 2
- Has a career and has held strategic positions at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as an employee of the Makassar Branch Accounting Division in 1996.
- Employee of the Palangkaraya Branch Credit Division between 2005 - 2008.
- Trusted as a Member of the Regional People's Representative Council of Central Kalimantan Province. Central Kalimantan Electoral District 2.

Hubungan Afiliasi /Affiliation Relationship

Terdapat hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur Utama

There is a family relationship between the President Commissioner and the President Director.

Nadia Hasna Humaira, BHSc

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Usia/Age

27 Tahun
Years Old

Kewarganegaraan/Nationality

Indonesia

Domisili/Domicile

Bogor



Mulai Menjabat/Starting Service

Tahun 2024, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2024

2024, based on General Meeting of Shareholders held in 2024

Pendidikan/Education

- Sarjana di bidang Politik dari International Islamic University Malaysia.
- Bachelor's degree in Politics from International Islamic University Malaysia.
- Kini sedang menyelesaikan Program Magister Manajemen Bisnis di Prasetya Mulya Business School, Jakarta.
- Currently completing her Master's degree in Business Management at Prasetya Mulya Business School, Jakarta.

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

- Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.
- Deputy General Treasurer of the PPP Central Leadership Council.
- Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud (Komite Penjadwalan dan Narasumber Media) sejak tahun 2023.
- Ganjar-Mahfud Winning Team (Media Scheduling and Resource Committee) since 2023.
- Ketua Bidang Pemenangan Dapil Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 2020-2023.
- Chair Person of the Regional Winning Division of the Central Leadership Council of the Partai Persatuan Pembangunan 2020-2023.
- Bendahara Umum pada Gerakan Pemuda Ka'bah 2020-2023.
- General Treasurer at the Ka'bah Youth Movement 2020-2023.
- Kepala Sekertariat Pusat Kendali Digital Partai Persatuan Pembangunan 2020-2023.
- Head of the Secretariat of Digital Control Center for Partai Persatuan Pembangunan 2020-2023.

Pengalaman Sebelumnya /Previous Experience

- Co-Owner Hafa Mountain View sejak 2021.
- Co-Owner of Hafa Mountain View since 2021.
- Co-Founder Srikandi Polo Club 2021-2022.
- Co-Founder for Srikandi Polo Club 2021-2022.
- Magang sebagai Protokol Spesialis di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019.
- Intern as Protocol Specialist in 2019 at the West Java Provincial Government.
- Guru Sukarelawan Sekolah Pengungsi Rohingya, ICAN Malaysia.
- Volunteer Teacher for the Rohingya Refugee School, ICAN Malaysia.
- Wakil Ketua bidang Urusan Wanita dan Kemerdekaan Ekonomi KNPI DPD Jawa Barat 2021-2024.
- Deputy Chairperson for Women's Affairs and Economic Independence of KNPI DPD West Java 2021-2024.
- Wakil Ketua Asosiasi Bogor Olahraga Menembak Perbakin 2021-2025.
- Deputy Chairperson of the Bogor Association of Shooting Sports Perbakin 2021-2025.

Hubungan Afiliasi /Affiliation Relationship

Tidak terdapat hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

There is no affiliation with shareholders, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

PROFIL DIREKSI
Board Of Directors' Profile



Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak

Direktur Utama
President Director

Usia/Age

50 Tahun
Years Old

Kewarganegaraan/Nationality

Indonesia

Domisili/Domicile

Bogor

Mulai Menjabat/Starting Service

Tahun 2015, berdasarkan keputusan pemegang saham pada tanggal 23 Maret 2015. *2015, based on shareholder decision on March 23rd 2015*

Pendidikan/Education

- Sarjana Ekonomi dari dari Universitas Hassanudin, Makassar, pada tahun 2005.
- Magister Sains dari Universitas Hassanudin tahun 2013-2015.
- *Bachelor of Economics from Hassanudin University, Makassar, in 2005.*
- *Master of Science from Hassanudin University in 2013-2015.*

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

Direktur Utama PT Trimitra Prawara sejak tahun 2015. *President Director of PT Trimitra Prawara since 2015.*

Pengalaman Sebelumnya /Previous Experience

- Dosen Muda Fakultas Ekonomi, Universitas 45 Makassar antara tahun 2001-2005.
- Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Palangkaraya antara tahun 2006- 2008.
- *Young Lecturer at the Faculty of Economics, University 45 Makassar between 2001-2005.*
- *Extraordinary Lecturer at the Faculty of Economics, Muhammadiyah University, Palangkaraya between 2006-2008.*

Hubungan Afiliasi /Affiliation Relationship

Terdapat hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur Utama. *There is a family relationship between the President Commissioner and the President Director.*



Rachmat Yaktihadi

Direktur
Director

Usia/Age

43 Tahun
Years Old

Kewarganegaraan/Nationality

Indonesia

Domisili/Domicile

Bogor



Mulai Menjabat/Starting Service

Tahun 2019 berdasarkan keputusan pemegang saham pada tanggal 24 Juni 2019.

2019 based on the decision of shareholders on June 24, 2019.

Pendidikan/Education

Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Pakuan, Bogor, pada tahun 2006.

Bachelor of Computer Science from Pakuan University, Bogor, in 2006.

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

Tidak Ada

There isn't any

Pengalaman Sebelumnya /Previous Experience

- Mentor, Primagama antara tahun 2006-2008.
- Dosen, Bina Sarana Informatika antara tahun 2008-2010.
- Account Officer, PT Bank Cimb Niaga Tbk antara tahun 2010-2011.
- Credit Officer, PT Bank CIMB Niaga Tbk antara tahun 2011-2012.
- Sub Branch Credit Manager, PT Bank Mega Tbk antara tahun 2012-2013.
- Administration Sales Section Head, PT Lima Karya Anak Mandiri antara tahun 2013-2016
- Senior Leader Sales and Marketing Perseroan antara tahun 2016 -2019.

- Mentor, Primagama between 2006-2008.
- Lecturer, Bina Sarana Informatics between 2008-2010.
- Account Officer, PT Bank CIMB Niaga Tbk Antara in 2010-2011.
- Credit Officer, PT Bank CIMB Niaga Tbk Antara 2011-2012.
- Sub Branch Credit Manager, PT Bank Mega Tbk Antara 2012-2013.
- Administration Sales Section Head, PT Lima Karya Anak Mandiri Antara 2013-2016
- Senior Leader of Sales and Marketing of the Company Antara 2016-2019.

Hubungan Afiliasi /Affiliation Relationship

Tidak terdapat hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

There is no affiliate relationship with shareholders, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors.



SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Hingga pada akhir tahun 2024, Perseroan memiliki 43 karyawan. Berikut adalah rincian komposisi karyawan Perseroan dan perbandingannya selama tiga tahun terakhir:

Hingga pada akhir tahun 2024, Perseroan memiliki 43 karyawan. Berikut adalah rincian komposisi karyawan Perseroan dan perbandingannya selama tiga tahun terakhir:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan
Employees Composition Based on Position

Kategori/Category	2022	2023	2024
Direktur/Director	2	2	2
Manajer/Manager	4	4	4
Penyelia/Supervisor	3	4	4
Staf/Staff	23	16	16
Non Staf/Non Staf	11	17	17
Jumlah/Total	43	43	43



Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Employees Composition Based on Education

Kategori/Category	2022	2023	2024
Pasca Sarjana/ Master	2	2	2
Sarjana/Bachelor	23	14	14
Akademi/ College	2	1	1
SMU & SMK/High School	12	21	21
SD & SMP/ Elementary School	12	5	5
Jumlah/Total	43	43	43

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia
Employees Composition Based on Age

Kategori/Category	2022	2023	2024
> 55	0	0	0
44-55	7	5	5
31-45	21	4	4
21-30	14	16	16
<21	1	18	18
Jumlah/Total	43	43	43



Komposisi Karyawan Berdasarkan Status
Employees Composition Based on Employment Status

Kategori/Category	2022	2023	2024
Tetap/Permanent	5	7	7
Kontrak/Contract	38	36	36
Jumlah/Total	43	43	43

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja
Employees Composition Based on Work Location

Kategori/Category	2022	2023	2024
Kantor Pusat/ Head Office	11	15	15
Kantor Proyek/ Project Office	32	28	28
Jumlah/Total	43	43	43

Program Pengembangan Kompetensi

Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi internal dengan melibatkan karyawan dalam berbagai inisiatif strategis yang beragam. Langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa Perseroan senantiasa memiliki tim unggul yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan bisnis. Selain itu, Perseroan juga menyediakan peluang bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak eksternal.

Competency Development Program

The Company is committed to enhance internal competencies by engaging employees in a variety of strategic initiatives. This effort aims to ensure that the Company consistently has an outstanding team to support the acceleration of business growth. Furthermore, the Company also provides opportunities for employees to participate in various training and development programs, both those organized internally and through collaborations with external parties.



Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan tidak hanya berkomitmen untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, tetapi juga berupaya memastikan kepatuhan penuh terhadap seluruh regulasi ketenagakerjaan. Informasi lebih lengkap mengenai kegiatan terkait hubungan industrial dapat ditemukan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, khususnya di sub bagian yang membahas Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja.

Pengembangan Teknologi Informasi

I. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TI

- Peningkatan Security Data Center Perseroan dengan implementasi Redundant Server.
- Peningkatan skalabilitas akses data Perseroan dengan Private Cloud.
- Peningkatan Aplikasi ERP (Enterprise Resources Planning) Perseroan.

II. PENGEMBANGAN SDM

- Peningkatan Kompetensi Karyawan dengan Pelatihan Aplikasi ERP E-IPRO & CRM.
- Peningkatan pengetahuan karyawan dengan Mengikuti Seminar & Training Teknologi Informasi terkini yang relevan.

Industrial Relations And Employee Well-Being

The Company is committed not only to fostering harmonious industrial relations but also to ensuring full compliance with all employment regulations. Further details regarding activities related to industrial relations can be found in the Corporate Social Responsibility section, particularly under the subsection discussing Responsibilities for Employment, Health, and Occupational Safety.

Information Technology Development

I. IT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

- Increasing the Company's Security Data Center with the implementation of Redundant Server.
- Increasing the Company's data access scalability with a private cloud.
- Improving the Company's ERP (Enterprise Resources Planning) application.

II. HR DEVELOPMENT

- Improving employees' competencies with E-IPRO & CRM ERP Application Training.
- Increasing employee knowledge by attending relevant information technology seminars & training.

PEMEGANG SAHAM

Shareholders

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek, per 31 Desember 2024 komposisi kepemilikan saham Perseroan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Based on the Register of Shareholders issued by PT Bima Registra as the Securities Administration Bureau, as of 31 December 2024 the composition of the Company's share ownership can be seen in the following tables:

Tabel Pemilikan Saham Pengendali Berdasarkan Daftar Pemilikan Saham per 31 Desember 2024

Table of Controlling Share Ownership Based on Register of Share Ownership as of 31 December 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Nominal	%
PT Trimitra Prawara	950.000.000	38.000.000.000	76,00%
Jumlah	950.000.000	38.000.000.000	76,00%



Tabel Pemilikan Saham oleh Direksi dan Komisaris per 31 Desember 2024

Table of Share Ownership by Directors and Commissioners as of 31 December 2024

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Saham Number of Shares	Nominal	%
Dewan Komisaris				
H. Yoyo Sugeng triyogo	Komisaris Utama	24.960.000	3.319.680.000	2,00%
Jumlah		24.960.000	3.319.680.000	2,00%
Direksi				
Hj. Indriati, S.E., M.Si.,Ak.	Direktur Utama	25.040.000	3.330.320.000	2,00%
Jumlah		50.000.000	6.650.000.000	2,00%

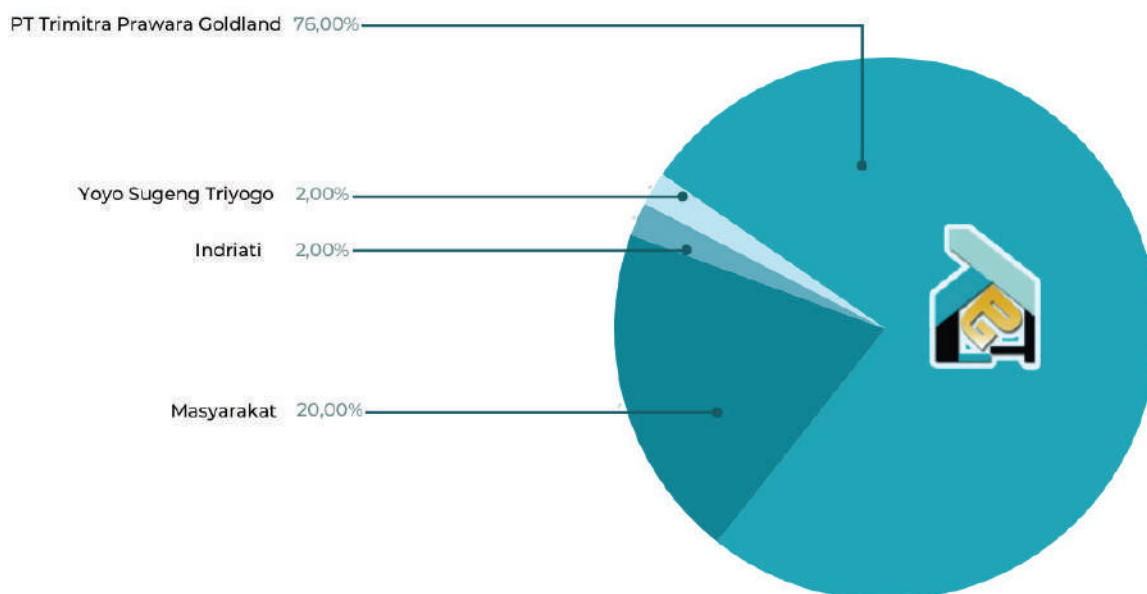
Tabel Pemilikan Saham Berdasarkan Komposisi Lokal dan Asing per 31 Desember 2024

Table of Share Ownership Based on Local and Foreign Composition as of 31 December 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Nominal	%
Domestik			
Individu	3.744	145.790.100	11,66%
Institusi	2	1.009.500.000	80,76%
Asing			
Individu	1	1.000	0,00%
Institusi	2	94.708.900	7,58%
Jumlah	3.749	1.250.000.000	100,00

Struktur pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada bagan berikut:

The structure of the Company's shareholders as of 31 December 2024 showed in the following chart:





Entitas Anak

Perseroan berdiri sebagai entitas bisnis independen yang tidak terafiliasi dengan entitas anak asosiasi, atau kemitraan usaha bersama manapun.

Kronologi Pencatatan Saham

Pada tahun 2020, Perseroan sukses merayakan momen penawaran umum perdana dan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Ikhtisar perjalanan pencatatan saham Perseroan tersaji dalam tabel berikut:

Subsidiaries

The company was established as an independent business entity that was not affiliated with a subsidiary, association, or a joint business partnership

Share Listing Chronology

In 2020, the company successfully celebrated the moment of the initial public offering and registered its shares on the Indonesia Stock Exchange. Overall recording of the Company's shares are presented in the following table:

Nama Efek/ Securities Name	Tempat Pencatatan/ Listing Location	Tanggal/ Date	Jumlah Efek Tercatat/ Number of Listed Securities
Saham Pendiri/Founder Shares	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	11 Desember 2020/ December 11th, 2020	1.000.000.000
Saham Hasil IPO/IPO Shares	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	11 Desember 2020/ December 11th, 2020	250.000.000
Jumlah Saham tercatat per 31 Desember 2020/ Total The number of shares was recorded as of December 31st, 2020			1.250.000.000

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Institution And Professions

Kronologi Pencatatan Saham

KAP Rama Wendra
Ruko Darwin Timur No. 50, Jl. Scientia Square
Barat, Gading Serpong Tangerang 15810
Tel: (021) 798 5757 Fax : (021) 798 1957

Konsultan Hukum

Wardhana Kristanto Lawyers
Pulomas Office Park Building II, 3rd floor
Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No.2
Jakarta 13210, Indonesia
Tel: +62 21 2937 8870 Fax. : +62 21 4786

Share Listing Chronology

KAP Rama Wendra
Ruko Darwin Timur No. 50, Jl. Scientia Square
Barat, Gading Serpong Tangerang 15810 Tel:
(021) 798 5757 Fax : (021) 798 1957

Legal Consultant

Wardhana Kristanto Lawyers
Pulomas Office Park Building II, 3rd floor Suite
#01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No.2 Jakarta
13210, Indonesia



Notaris

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M. Kn.
Jl. KH Zainul Arifin No. 2 Komplek Ketapang
Indah Blok B-2 No. 4-5, Jakarta - 11140
Telp. 021-6345668, Fax 021-6345666 Email
: christina#notarischristina.com

Biro Administrasi Efek

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp : 021-2598 4818
Fax : 021-2598 4819

Notary

*Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M. Kn.
Jl. KH Zainul Arifin No. 2 Komplek Ketapang
Indah Blok B-2 No. 4-5, Jakarta - 11140
Telp. 021-6345668, Fax 021-6345666 Email
: christina#notarischristina.com*

Share Registrar

*PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp : 021-2598 4818
Fax : 021-2598 4819*

04

BAB



ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS



ANALISA EKONOMI DAN INDUSTRI PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2024

Economic And Industrial Analysis Indonesian Economy In 2024

Perekonomian Indonesia pada 2024 diproyeksikan tumbuh sekitar 4,8–5,2%, didorong oleh konsumsi domestik yang tangguh (55% PDB) dan investasi di sektor infrastruktur serta hilirisasi sumber daya. Namun, ketidakpastian global seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, tekanan inflasi pasca-kenaikan harga energi, dan kenaikan suku bunga global tetap menjadi risiko. Sektor ekspor, terutama komoditas (batubara, CPO), berpotensi tertekan jika permintaan global melemah, sementara pariwisata dan UMKM diharapkan menjadi penyangga pertumbuhan.

Tahun 2024 juga menjadi tahun politik dengan Pemilu Presiden yang berpotensi memicu volatilitas jangka pendek. Kebijakan pemerintah cenderung fokus pada program populis untuk meraih dukungan, seperti subsidi energi dan bantuan sosial, yang berisiko meningkatkan defisit APBN di atas batas 3% PDB. Di sisi lain, investor mungkin mengambil sikap wait-and-see hingga terbentuk kepastian kepemimpinan baru, sehingga realisasi investasi (PMA/PMDN) berpotensi melambat pada semester I-2024.

Bank Indonesia diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di kisaran 6% untuk menahan inflasi (diprediksi 3,2–3,6%) dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun, tekanan pada rupiah tetap ada akibat arus modal asing yang fluktuatif, terutama jika ketegangan geopolitik (Perang Ukraina, Laut China Selatan) memicu risiko safe-haven flow. Sektor properti dan konstruksi mungkin terdampak kenaikan suku bunga kredit, meski permintaan hunian subsidi dan proyek strategis (IKN, tol trans-Sumatera) masih menjadi pendorong.

Pasca-Pemilu, fokus ekonomi akan bergantung pada agenda pemerintahan baru. Jika kebijakan pro-bisnis dan reformasi struktural (seperti penyederhanaan perizinan, peningkatan SDM, dan percepatan transisi energi) dapat diakselerasi, pertumbuhan 2025 berpeluang lebih optimis. Namun, ketidaksielarasan antara

Indonesia's economy in 2024 is projected to grow by approximately 4.8–5.2%, driven by robust domestic consumption (55% of GDP) and investments in infrastructure and resource downstreaming. However, global uncertainties such as China's economic slowdown, inflationary pressures following energy price hikes, and rising global interest rates remain significant risks. The export sector, particularly commodities (coal, CPO), may face challenges if global demand weakens, while tourism and MSMEs are expected to act as growth buffers.

The year 2024 will also be a political year with the Presidential Election, which could trigger short-term volatility. Government policies are likely to focus on populist programs to gain support, such as energy subsidies and social assistance, which risk increasing the state budget deficit beyond the 3% of GDP threshold. On the other hand, investors may adopt a wait-and-see approach until new leadership is confirmed, potentially slowing investment realization (both FDI and domestic investment) in the first half of 2024.

Bank Indonesia is expected to maintain the BI-Rate at around 6% to curb inflation (projected at 3.2–3.6%) and stabilize the rupiah exchange rate. However, the rupiah may still face pressure due to fluctuating foreign capital flows, especially if geopolitical tensions (Ukraine War, South China Sea) trigger safe-haven flows. The property and construction sectors might be affected by rising credit interest rates, although demand for subsidized housing and strategic projects (IKN, Trans-Sumatra toll roads) will remain growth drivers.

Post-election, the economic focus will depend on the new government's agenda. If pro-business policies and structural reforms (such as licensing simplification, human capital development, and energy transition acceleration) can be expedited, growth prospects for 2025 could be more optimistic. However, discrepancies between



janji kampanye dan realisasi kebijakan berisiko memicu ketidakpercayaan pasar. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas di tengah tahun yang sarat dinamika politik.

Tinjauan Industri Properti

Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi industri properti Indonesia, dipengaruhi oleh ketidakpastian politik seiring penyelenggaraan Pemilu Presiden dan perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan sektor ini diproyeksikan moderat di kisaran 3,5–4%, lebih rendah dibandingkan pra-pandemi (rata-rata 5% pada 2018–2019), terutama akibat penurunan permintaan properti komersial dan residensial kelas menengah-atas. Volatilitas nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan BI yang tetap tinggi (6%) membatasi daya beli masyarakat, sementara kebijakan pemerintah yang cenderung populis—seperti fokus pada subsidi energi—mengalihkan alokasi APBN dari insentif perumahan.

Di sisi permintaan, preferensi konsumen bergeser ke hunian terjangkau (affordable housing) dan subsidi (FLPP), sejalan dengan tekanan inflasi yang memengaruhi daya beli. Data menunjukkan peningkatan minat pada unit berharga di bawah Rp500 juta (70% total transaksi Q1-2024), sementara properti premium mengalami penurunan penjualan hingga 15%. Namun, industri tetap mendapat dukungan dari program pemerintah seperti perluasan akses KPR bersubsidi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang mendorong permintaan properti infrastruktur pendukung di Kalimantan Timur.

campaign promises and policy implementation risk eroding market confidence. Collaboration among the government, businesses, and society will be key to maintaining stability amidst a politically dynamic year.

Industrial Overview

2024 was a challenging year for the Indonesian property industry, influenced by political uncertainty as the Presidential Election is held and the global economic slowdown. The sector's growth is projected to moderate in the range of 3.5–4%, lower than pre-pandemic (averaging 5% in 2018–2019), mainly due to the decline in demand for commercial and upper-middle class residential properties. Rupiah exchange rate volatility and BI's benchmark interest rate which remains high (6%) limit people's purchasing power, while government policies that tend to be populist—such as focusing on energy subsidies—divert the allocation of the State Budget from housing incentives.

On the demand side, consumer preferences are shifting to affordable housing and subsidies (FLPP), in line with inflationary pressures that affect purchasing power. Data shows an increase in interest in units priced below IDR500 million (70% of total transactions in Q1-2024), while premium properties experienced a decline in sales of up to 15%. However, the industry continues to receive support from government programs such as expanding access to subsidized mortgages and the development of the Indonesian Capital City (IKN), which drives demand for supporting infrastructure properties in East Kalimantan.



Dari sisi pasokan, pengembang mengadopsi strategi konsolidasi dengan fokus pada proyek low-risk dan kolaborasi teknologi. Penggunaan platform digital (VR property tour, AI-driven marketing) dan skema pembayaran fleksibel meningkat untuk menjangkau generasi muda. Tren keberlanjutan juga mulai diadopsi, meski terbatas pada proyek strata atas, seperti penggunaan material ramah lingkungan dan desain hemat energi. Di tengah tekanan likuiditas, beberapa pengembang besar berekspansi ke segmen landed house dan apartemen hemat energi di wilayah penyangga Jakarta (Bogor, Depok, Bekasi) yang masih memiliki permintaan stabil.

Prospek 2025 akan sangat bergantung pada stabilitas pasca Pemilu dan kemampuan pemerintah baru merealisasikan reformasi struktural. Jika kebijakan pro-bisnis (seperti percepatan perizinan dan insentif pajak) diterapkan, industri properti berpotensi pulih dengan pertumbuhan sekitar 4,5%. Namun, ketidakpastian regulasi dan fluktuasi harga material konstruksi (terutama semen dan baja) tetap menjadi tantangan utama. Kolaborasi antara pengembang, fintech, dan pemerintah dalam skema pembiayaan inovatif akan menjadi kunci transisi menuju industri yang lebih adaptif dan inklusif.

Analisa Segmen Usaha

Perseroan memiliki dua segmen usaha, dengan kontribusi terhadap pendapatan sebagai berikut:

From the supply side, developers are adopting a consolidation strategy with a focus on low-risk projects and technology collaboration. The use of digital platforms (VR property tours, AI-driven marketing) and flexible payment schemes are increasing to reach the younger generation. Sustainability trends are also starting to be adopted, although limited to upper-class projects, such as the use of environmentally friendly materials and energy-efficient designs. Amid liquidity pressures, several large developers are expanding into the landed house and energy-efficient apartment segments in the Jakarta buffer zone (Bogor, Depok, Bekasi) which still have stable demand.

The 2025 outlook will depend heavily on post-election stability and the new government's ability to implement structural reforms. If pro-business policies (such as accelerated licensing and tax incentives) are implemented, the property industry has the potential to recover with growth of around 4.5%. However, regulatory uncertainty and fluctuations in construction material prices (especially cement and steel) remain major challenges. Collaboration between developers, fintech, and government in innovative financing schemes will be key to the transition to a more adaptive and inclusive industry.

Business Segment Analysis

The Company has two business segments, with the following contribution to income:

	2024	2023	Perubahan	%
Penjualan Rumah Tinggal <i>Sale of Houses</i>	13.780.837.839	23.330.181.487	(9.549.343.648)	(40,93%)
Sewa <i>Rent</i>	414.194.433	323.277.778	90.916.655	28,12%
Jumlah <i>Total</i>	14.195.032.272	23.653.459.265	(9.458.426.993)	(39,99%)



Analisa Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan diaudit secara independen oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan nomor No: 00010/3.0360/AU.1/03/1806-3/1/II/2025 pada tanggal 28 Februari 2025. Auditor memberikan opini wajar dalam semua hal material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024 dan dibandingkan dengan tahun 2023. Penting untuk dicatat bahwa laporan keuangan ini merupakan bagian integral dari analisis keuangan yang sedang dilakukan.

Aset

Pada 2024, total aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 6% (Rp6,828 miliar) dibandingkan 2023, terutama dipicu oleh penurunan signifikan pada aset tidak lancar sebesar 32,74% (Rp4,240 miliar) dan penurunan moderat aset lancar sebesar 2,57% (Rp2,587 miliar). Penurunan total aset ini mencerminkan dinamika portofolio dan strategi operasional Perseroan dalam merespons kondisi pasar.

Pada kategori aset lancar, komponen utama seperti kas dan setara kas turun 26,7% (Rp2,927 miliar). Seiring dengan meningkatnya kolektibilitas aset keuangan lancar lainnya pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 48,11% (Rp4,2 miliar). Namun, terdapat peningkatan pada persediaan real estat sebesar 4,95% (Rp3,281 miliar) dan uang muka yang naik 8,5% (Rp1,258 miliar), mengindikasikan fokus pada akumulasi stok properti dan peningkatan aktivitas pra-penjualan.

Di sisi aset tidak lancar, semua pos akun tidak mengalami pergerakan rasio yang signifikan, dimana seluruh komponen merupakan beban penyusutan dan amortisasi. Sementara itu, tanah belum dikembangkan tetap stabil tanpa perubahan nilai. Penurunan ini dapat merefleksikan strategi optimasi aset atau efisiensi operasional jangka panjang.

Financial Analysis

The financial statements have been prepared and independently audited by Rama Wendra Public Accounting Firm with the number No: 00010/3.0360/AU.1/03/1806-3/1/II/2025 on February 28, 2025. The auditor provided a fair opinion in all material respects in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia on the Company's Financial Statements for the year 2024 and compared to the year 2023. It is important to note that these financial statements are an integral part of the ongoing financial analysis.

Asset

In 2024, the Company's total assets decreased by 6% (IDR6,828 billion) compared to 2023, mainly driven by a significant decrease in non-current assets of 32.74% (IDR4,240 billion) and a moderate decrease in current assets of 2.57% (IDR2,587 billion). This decrease in total assets reflects the dynamics of the Company's portfolio and operational strategy in responding to market conditions.

In the current assets category, the main components such as cash and cash equivalents decreased by 26.7% (IDR2,927 billion). Along with the increasing collectibility of other current financial assets in 2024, there was a decrease of 48.11% (IDR4,2 billion). However, there was an increase in real estate inventory of 4.95% (IDR3,281 billion) and down payments which increased by 8.5% (IDR1,258 billion), indicating a focus on property stock accumulation and increased pre-sales activities.

For non-current assets, all account items showed no significant ratio movements, with all components consisting of depreciation and amortization expenses. Meanwhile, undeveloped land remained stable with no change in value. This decline may reflect an asset optimization strategy or long-term operational efficiency measures.



Secara keseluruhan, kinerja aset Perseroan pada 2024 menunjukkan pergeseran fokus dari aset likuid dan investasi jangka panjang ke penguatan persediaan properti serta peningkatan aktivitas pra-penjualan. Meski total aset menurun, struktur ini mungkin mencerminkan penyesuaian strategis untuk memitigasi tantangan pasar dan mempersiapkan pertumbuhan di tahun mendatang.

Overall, the Company's asset performance in 2024 shows a shift in focus from liquid assets and long-term investments to strengthening property inventory and increasing pre-sales activities. Although total assets decreased, this structure may reflect a strategic adjustment to mitigate market challenges and prepare for growth in the coming year.

	2024	2023	Perubahan Change	%
Aset Asset				
Aset Lancar Current Assets				
Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents	8.035.323.770	10.962.350.659	(2.927.026.889)	(26,70%)
Aset keuangan lancar lainnya - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Other current financial assets - net of allowance for impairment losses	4.530.072.511	8.730.514.159	(4.200.441.648)	(48,11%)
Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes	1.654.250	1.914.000	(259.750)	(13,57%)
Persediaan real estat Real estate inventory	69.608.341.015	66.326.375.332	3.281.965.683	4,95%
Uang muka Down payment	16.056.272.567	14.798.158.446	1.258.114.121	8,50%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	98.231.664.113	100.819.312.596	(2.587.648.483)	(2,57%)



	2024	2023	Perubahan Change	%
Aset Asset				
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets				
Tanah yang belum Dikembangkan <i>Undeveloped land</i>	3.602.233.092	3.602.233.092	0	0%
Properti investasi <i>Investment property</i>	818.157.633	864.957.633	(46.800.000)	(5,41%)
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan <i>Fixed assets - net of accumulated depreciation</i>	7.706.794.865	8.144.943.599	(438.148.734)	(5,38%)
Aset tak berwujud <i>Intangible assets</i>	187.852.291	341.216.041	(153.363.750)	(13,57%)
Persediaan real estat <i>Real estate inventory</i>	69.608.341.015	66.326.375.332	3.281.965.683	(44,95%)
Jumlah Aset Tidak <i>Total Non-Current</i>	8.712.804.789	12.953.350.365	(4.240.545.576)	(32,74%)
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	98.231.664.113	100.819.312.596	(2.587.648.483)	(2,57%)

Liabilitas

Pada 2024, total liabilitas jangka pendek Perseroan turun 17,72% (Rp3.416 miliar), terutama akibat penurunan utang bank jangka pendek (-13,65%) dan pendapatan diterima di muka (-37,5%). Utang pajak juga berkurang drastis (-98,79%), menunjukkan efisiensi manajemen perpajakan. Namun, utang usaha naik Rp230 juta dan utang lain-lain pihak ketiga naik Rp57 juta, yang perlu diwaspadai sebagai potensi tekanan likuiditas.

Liabilities

In 2024, the Company's total short-term liabilities decreased by 17.72% (IDR3,416 billion), mainly due to a decrease in short-term bank loans (-13.65%) and unearned income (-37.5%). Tax payables also decreased drastically (-98.79%), indicating efficient tax management. However, trade payables increased by IDR230 million and other third-party payables increased to IDR57 million, which need to be watched out for as potential liquidity pressures.



Di sisi liabilitas jangka panjang, total kewajiban menjadi 9,9% karena pelunasan hutang bank, dan penghapusan utang pihak berelasi (dari Rp195 juta menjadi Rp0). Liabilitas imbalan pasca kerja juga turun 60,9%, mencerminkan penyesuaian program tunjangan karyawan. Penurunan ini memperkuat struktur modal jangka panjang, meski perlu dipastikan tidak menghambat investasi strategis.

Secara keseluruhan, total liabilitas Perseroan turun 14,31% (Rp4.892 miliar) pada 2024, menandakan upaya konservatif dalam pengelolaan utang. Namun, kenaikan utang usaha dan pihak ketiga menggambarkan masih stabilnya kegiatan operasional Perseroan dengan terus melakukan pengembangan dan pembangunan.

On the long -term liabilities, the total obligation becomes 9.9% due to the payment of bank debt, and the elimination of related parties (from Rp195 million to Rp0). Post employment reward liabilities also fell 60.9%, reflecting the adjustment of the employee allowance program. This decline strengthens the long-term capital structure, although it should be ensured that it does not hamper strategic investment.

Overall, the Company's total liabilities decreased by 14.31% (Rp4.892 billion) in 2024, demonstrating a conservative approach to debt management. However, the increase in trade payables and third-party liabilities reflects the Company's continued operational stability as it maintains its development and construction activities.



	2024	2023	Perubahan Change	%
LIABILITAS DAN EKUITAS <i>LIABILITY AND EQUITY</i>				
Liabilitas Jangka Pendek <i>Short-term liabilities</i>				
Utang usaha <i>Accounts payable</i>	934.155.688	703.738.123	230.417.565	32,74%
Utang bank jangka pendek <i>Short term bank debt</i>	12.650.000.000	14.650.000.000	(2.000.000.000)	(13,65%)
Utang lain-lain pihak ketiga <i>Other payables of third parties</i>	121.622.221	63.726.745	57.895.476	90,85%
Utang usaha <i>Accounts payable</i>	5.086.541	420.263.791	(415.177.250)	(98,79%)
Pendapatan diterima di muka <i>Prepaid income</i>	2.149.491.227	3.439.319.847	(1.289.828.620)	(37,50%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek <i>Total Short Term Liabilities</i>	15.860.355.677	19.277.048.506	(3.416.692.829)	(17,72%)
Liabilitas Jangka Panjang <i>Long Term Liabilities</i>				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: <i>Long-term liabilities net of current maturities:</i>				
Utang bank <i>Bank debt</i>	13.288.800.000	14.441.900.000	(1.153.100.000)	(3,61%)
Utang pihak berelasi <i>Due to related parties</i>	-	195.345.291	0	0
Liabilitas imbalan pasca kerja <i>Post-employment benefit</i>	140.390.467	268.060.031	(127.669.564)	60,9%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang <i>Total of Long-Term Liabilities</i>	13.429.190.467	14.905.305.322	(1.476.114.855)	(2,87%)
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	29.289.546.144	34.182.353.828	(4.892.807.684)	(14,31%)



Ekuitas

Ekuitas Perseroan menunjukkan stabilitas dalam modal saham, dengan nilai issued and fully paid capital tetap sebesar Rp50 miliar pada 2023-2024, tanpa tambahan emisi saham. Namun, saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya (retained earnings undetermined) turun 13,08% (Rp2,2 miliar), sementara saldo laba yang telah ditetapkan naik 25% (Rp100 miliar). Hal ini mengindikasikan realokasi laba untuk keperluan strategis, seperti dividen atau reinvestasi, meski total ekuitas secara keseluruhan turun 2,43% (Rp1,93 miliar) akibat penurunan laba belum ditetapkan dan fluktuasi pendapatan komprehensif.

Pendapatan komprehensif lain (other comprehensive income) membaik signifikan: dari kerugian aktuarial Rp40,79 juta (2023) menjadi keuntungan Rp173,94 juta (2024), mencerminkan perbaikan manajemen risiko aset pensiun atau investasi jangka panjang. Di sisi liabilitas, total liabilitas dan ekuitas turun 6% (Rp6,83 miliar), yang disebabkan oleh penurunan kewajiban utang bank.

Penurunan total ekuitas dan liabilitas menunjukkan upaya Perseroan dalam memperketat struktur keuangan, meski perlu diwaspadai penurunan saldo laba belum ditetapkan. Stabilitas modal saham dan peningkatan laba yang dialokasikan mencerminkan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan. Perseroan perlu mempertahankan momentum positif pendapatan komprehensif dan memastikan alokasi laba yang efektif untuk menjaga kepercayaan investor.

Equity

The company's equity shows stability in share capital, with the value of issued and fully paid capital remaining at IDR50 billion in 2023-2024, without additional share issuance. However, retained earnings undetermined decreased by 13.08% (IDR2.2 billion), while retained earnings increased by 25% (IDR100 billion). This indicates a reallocation of profits for strategic purposes, such as dividends or reinvestment, although total equity as a whole decreased by 2.43% (IDR1.93 billion) due to a decrease in unrealized earnings and fluctuations in comprehensive income.

Other comprehensive income improved significantly: from an actuarial loss of IDR40.79 million (2023) to a profit of IDR173.94 million (2024), reflecting improvements in risk management of pension assets or long-term investments. On the liabilities side, total liabilities and equity decreased by 6% (IDR6.83 billion), which was due to a decrease in short-term liabilities to the bank.

The decrease in total equity and liabilities shows the company's efforts to tighten its financial structure, although it is important to be aware that the decrease in retained earnings has not been determined. The stability of share capital and the increase in allocated profit reflect the focus on sustainable growth. The company needs to maintain the positive momentum of comprehensive income and ensure effective profit allocation to maintain investor confidence.



	2024	2023	Perubahan Change	%
LIABILITAS DAN EKUITAS <i>LIABILITY AND EQUITY</i>				
Ekuitas <i>Equity</i>				
Modal saham - nilai nominal Rp40 per saham pada 31 Desember 2024 dan 2023 <i>Share capital - par value of IDR 40 per share on December 31, 2024 and 2023</i>				
Modal dasar sebanyak 4.000.000.000 saham pada 31 Desember 2024 dan 2023 <i>Authorized capital of 4,000,000,000 shares on December 31, 2024 and 2023</i>				
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.250.000.000 saham pada 31 Desember 2023 dan 2022 <i>Issued and fully paid capital of 1,250,000,000 shares on December 31, 2023 and 2022</i>	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0
Tambahan modal disetor <i>Additional paid-in capital</i>	12.227.500.000	12.227.500.000	0	0
Saldo laba <i>Retain earning</i>				
Telah ditentukan penggunaannya <i>Its use has been determined</i>	500.000.000	400.000.000	100.000.000	25%
Belum ditentukan penggunaannya <i>Its use has not yet been determined</i>	14.682.520.446	16.891.849.593	(2.209.329.147)	(13,08%)



Pendapatan komprehensif lainnya
Other comprehensive income

Keuntungan/ (kerugian) <i>Actuarial gain/(loss)</i>	173.942.906	(40.794.780)	214.737.686	(-526,39%)
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	77.654.922.758	79.590.309.133	(1.935.386.375)	(2,43%)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS <i>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</i>	106.944.468.902	113.772.662.961	(6.828.194.059)	(6,00%)

Analisa Laba Rugi

Pendapatan usaha Perseroan terkontraksi sebesar 39,99% (Rp9,46 miliar) dari Rp23,65 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp14,19 miliar di tahun 2024, seiring dengan penurunan pendapatan usaha, beban pokok penjualan juga mengalami penurunan sebesar 40,07%, sehingga Perseroan mampu mempertahankan Gross Profit Margin secara konsisten di angka 38%.

Pertumbuhan Laba Usaha mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu dari laba Rp162,82 juta (2023) menjadi negatif Rp2,11 miliar (2024). Hal ini terutama dipicu oleh kenaikan beban keuangan berupa biaya bunga pinjaman.

Perseroan mencatat kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar Rp1,94 miliar (2024), berbanding laba Rp122,03 juta (2023). Laba per Saham Dasar (EPS) anjlok dari Rp0,13 (2023) menjadi -Rp1,69 (2024), mencerminkan tantangan serius dalam profitabilitas. Meski terdapat perbaikan pendapatan komprehensif lain (keuntungan aktuarial naik 526,39%), hal ini tidak cukup untuk mengimbangi kerugian operasional.

Profit And Loss Analysis

The Company's operating revenues contracted 39.99%(Rp9.46 billion) from Rp23.65 billion in 2023 to Rp14.19 billion in 2024, in line with the decline in operating revenue, the principal expense also decreased by 40.07%, so the Company was able to maintain a consistent gross profit margin at 38%.

Operating profit growth has decreased compared to last year from Rp162.82 million (2023) to a negative Rp2.11 billion (2024). This is mainly triggered by an increase in financial expenses in the form of loan interest costs.

The Company recorded a comprehensive loss for the current year of Rp1.94 billion (2024), compared to a profit of Rp122.03 million (2023). Basic Earnings per Share (EPS) plunged from Rp0.13 (2023) to -Rp1.69 (2024), reflecting serious challenges in profitability. Although there was an improvement in other comprehensive income (actuarial profit rose 526.39%), this was not enough to offset the operating loss.



	2024	2023	Perubahan Change	%
PENDAPATAN USAHA OPERATING REVENUES	14.195.032.272	23.653.459.265	(9.458.426.993)	(39,99%)
BEBAN POKOK PENJUALAN COST OF GOODS SOLD	(8.753.382.196)	(14.604.926.534)	5.851.544.338	(40,07%)
LABA KOTOR GROSS PROFIT	5.441.650.076	9.048.532.731	(3.606.882.655)	(39,86%)
Beban penjualan Selling expenses	(515.848.462)	(961.665.303)	445.816.841	(46,36%)
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(4.505.236.293)	(5.158.805,279)	(653.568.987)	12,67%
Beban pajak penghasilan final Final income tax expense	(280.810.666)	(535.724.868)	254.914.202	(47,58%)
Beban pajak Tax expense	(368.030.708)	(425.420.095)	57.389.387	(13,49%)
Beban keuangan Financial burden	(2.280.731.446)	(1.798.364.958)	(482.366.488)	26,82%
Pendapatan (beban) lain-lain Other income (expenses)	399.678.218	(5.128.499)	404.806.717	(7893,28%)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX	(2.109.329.281)	162.823.729	(2.272.153.010)	(1395,47%)
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX EXPENSES (BENEFITS)	0	0	0	0
LABA PERIODE BERJALAN PROFIT FOR THE PERIOD	(2.109.329.281)	162.823.729	(2.272.153.010)	(1395,47%)



PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Items that will not be reclassified to profit or loss

Keuntungan/ (kerugian) aktuarial imbalan pasca kerja <i>Actuarial gains/(losses) of post-employment benefits</i>	173.942.906	(40.794.780)	214.737.686	(526,39%)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN <i>TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</i>	(173.942.906)	(40.794.780)	(133.148.126)	326,39%
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN <i>TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR</i>	(1.935.386.375)	122.028.949	(2.057.415.324)	(1.686,01%)
Laba bersih per saham dasar <i>Basic earnings per share</i>	(1,69)	0,13	(2)	(1.400%)

Analisa Arus Kas

Arus kas dari aktivitas operasi membaik signifikan, dari defisit Rp3,43 miliar (2023) menjadi surplus Rp243,11 juta (2024). Ini didorong penurunan pembayaran untuk pengembangan lahan sebesar -45,14%, konstruksi sebesar -33,24%, dan beban operasi sebesar -71,47%. Namun, penerimaan dari pelanggan turun 33,27% (Rp8,53 miliar), mencerminkan penurunan penjualan tanpa ada penagihan piutang yang lambat.

Arus kas investasi menunjukkan penurunan sebesar -53,28%, dengan perolehan aset turun ke Rp21,54 juta (2024). Di sisi pendanaan, perusahaan tidak mengambil pinjaman baru (berbeda dari Rp5,11 miliar di 2023) dan fokus pada pelunasan utang sebesar -38,11%. Pembayaran dividen dihentikan, mengarahkan likuiditas untuk stabilisasi utang.

Kas bersih turun 26,7% ke Rp8,04 miliar (2024), meski penurunan lebih rendah dibanding 2023 yaitu -18,95%. Peningkatan beban bunga

Cash Flow Analysis

Cash flow from operating activities improved significantly, from a deficit of IDR3.43 billion (2023) to a surplus of IDR243.11 million (2024). This was driven by a decrease in payments for land development as big as -45.14%, construction at -33.24%, and operating expenses at -71.47%. However, receipts from customers fell by 33.27% (IDR8.53 billion), reflecting a decrease in sales without slow collection of receivables.

Investing cash flow showed a reduction at -53.28%, with asset acquisition falling to IDR21.54 million (2024). On the funding side, the company did not take new loans (different from IDR5.11 billion in 2023) and focused on debt repayment as big as -38.11%. Dividend payments were stopped, directing liquidity to debt stabilization.

Net cash fell by 26.7% to IDR8.04 billion (2024), although the decline was lower than in 2023 namely -18.95%. Increased loan interest expense

pinjaman (+26,78%) dan penurunan pendapatan operasional menjadi tantangan utama. Strategi penghematan biaya operasi dan pengurangan investasi membantu mitigasi, tetapi perlu peningkatan penjualan atau restrukturisasi utang untuk memperkuat likuiditas jangka panjang.

(+26.78%) and decreased operating income are the main challenges. Operating cost savings and investment reduction strategies help mitigate, but sales growth or debt restructuring are needed to strengthen long-term liquidity.

	2024	2023	Perubahan Change	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flow from Operating Activities</i>				
Penerimaan dari pelanggan <i>Receipt from customers</i>	17.105.645.298	25.634.326.759	(8.528.681.461)	(33,27%)
Pengembangan dan pembelian tanah <i>Development and purchase of land</i>	(3.364.884.646)	(6.133.150.655)	2.768.266.009	(45,14%)
Pembayaran untuk konstruksi dan pemasok <i>Payment for construction and suppliers</i>	5.441.650.076	9.048.532.731	(3.606.882.655)	(39,86%)
Pembayaran beban operasi <i>Payment of operating expenses</i>	(1.546.521.227)	(5.421.078.786)	3.874.557.559	(71,47%)
Pembayaran bunga pinjaman <i>Loan interest payments</i>	(2.280.731.446)	(1.798.964.958)	-481.766.488	26,78%
Pembayaran untuk pajak <i>Payment for taxes</i>	(1.063.758.874)	(1.153.590.056)	89.831.182	(7,79%)
Pembayaran lainnya <i>Other payment</i>	1.091.521.849	(35.338.855)	1.126.860.704	(3.188,73%)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi <i>Net cash flow is used for operating activities</i>	243.111.165	(3.434.166.433)	3.677.277.598	(107,08%)



Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities

Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets	(21.538.054)	(46.102.500)	24.564.446	(53,28%)
Penjualan aset tetap Sale of fixed assets	4.500.000	0	4.500.000	-
Perolehan aset lain-lain Acquisition of other assets	0	0	0	0
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash is used for investing activities	(17.038.054)	(46.102.500)	29.064.446	(63,04%)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities

Penerimaan pinjaman bank Acceptance of bank loans	0	5.113.700.000	(5.113.700.000)	(100%)
Pembayaran pinjaman bank Bank loan payments	(3.153.100.000)	(5.094.900.000)	1.941.800.000	(38,11%)
Penerimaan pihak berelasi Acceptance of related parties	0	0	0	0
Pembayaran pihak berelasi Related party payments	0	0	0	0
Pembayaran dividen Dividend payment	0	(150.000.000)	150.000.000	(100%)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash is provided by financing activities	(3.153.100.000)	(131.200.000)	(3.021.900.000)	2.303,28%
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(2.927.026.889)	(3.611.468.933)	684.442.044	(18,95%)



Kas dan setara kas pada awal tahun <i>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</i>	10.962.350.659	14.573.819.592	(3.611.468.933)	(24,78%)
Kas dan setara kas pada akhir tahun <i>Cash and cash equivalents at the end of the year</i>	8.035.323.770	10.962.350.659	(2.927.026.889)	(26,7%)

Kemampuan Membayar Hutang

Analisa Rasio Solvabilitas Perseroan berada di angka 37,72%. Hal ini mengindikasikan kemampuan Perseroan yang masih sehat dalam memenuhi kewajiban, meskipun secara komprehensif kinerja Perseroan cenderung melandai, namun kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban jatuh tempo masih lancar. Rasio EBITDA Perseroan di tahun 2024 menunjukkan angka positif.

Ability To Pay Debt

The Company's Solvency Ratio Analysis is at 37.72%. This indicates the Company's is still healthy in meeting its obligations, although comprehensively the Company's performance tends to decline, but the ability to meet all maturing obligations is still on track. The Company's EBITDA Ratio in 2024 shows a positive figure.

Rasio Solvabilitas Solvency Ratio

	2024	2023
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas <i>Debt to Equity Ratio</i>	37,72%	44,98%
Rasio Kewajiban terhadap Jumlah Aset <i>Debt to Assets Ratio</i>	27,39%	31,02%
Rasio Ekuitas terhadap Aset <i>Equity to Assets Ratio</i>	72,61%	68,98%
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga/Earned <i>EBITDA to Interest Expense/Earned Ratio</i>	65,00%	296,06%



Struktur Modal

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk menunjukkan peningkatan signifikan dalam struktur modalnya pada tahun 2024, dengan Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio) turun dari 44,98% di 2023 menjadi 37,72% di 2024. Hal ini mencerminkan pengurangan ketergantungan pada pendanaan utang dan penguatan posisi ekuitas dalam struktur permodalan Perseroan. Rasio ini juga tergolong lebih sehat dibandingkan rata-rata industri properti Indonesia yang berkisar 50-60%. Didukung oleh penurunan Rasio Kewajiban terhadap Aset (Debt to Assets Ratio) dari 31,02% menjadi 27,39% dan kenaikan Rasio Ekuitas terhadap Aset (Equity to Assets Ratio) dari 68,98% ke 72,61%, Perseroan semakin mempertegas kemampuannya dalam membiayai aset melalui modal sendiri. Namun, perlu menjadi perhatian penurunan tajam Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga dari 296,06% menjadi 65%, yang mengindikasikan tekanan pada kemampuan menghasilkan pendapatan operasional untuk menutup kewajiban bunga. Secara keseluruhan, struktur modal Perseroan di tahun 2024 menunjukkan posisi yang lebih kuat dan sehat, meskipun perlu peningkatan efisiensi operasional untuk mempertahankan kemampuan membayar kewajiban jangka panjang.

Capital Structure

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk demonstrated significant improvement in its capital structure in 2024, with its Debt to Equity Ratio decreasing from 44.98% in 2023 to 37.72% in 2024. This reflects reduced reliance on debt financing and a stronger equity position in the Company's capital structure. This ratio is also considered healthier compared to the Indonesian property industry average of around 50-60%. Supported by a decrease in the Debt to Assets Ratio from 31.02% to 27.39% and an increase in the Equity to Assets Ratio from 68.98% to 72.61%, the Company further reinforced its ability to finance assets through its own capital. However, attention should be paid to the sharp decline in the EBITDA to Interest Expense Ratio from 296.06% to 65%, indicating pressure on the Company's ability to generate operating income to cover interest obligations. Overall, the Company's capital structure in 2024 showed a stronger and healthier position, though operational efficiency improvements are needed to maintain long-term debt servicing capacity.



Prospek Usaha

Ekonomi global diproyeksikan tumbuh moderat di kisaran 3.1% (IMF), didorong pemulihan sektor manufaktur AS dan Eropa. Sektor teknologi hijau, AI, dan kesehatan digital menjadi motor pertumbuhan utama, meski tantangan seperti ketegangan geopolitik (Taiwan, Timur Tengah) dan transisi energi yang timpang di negara berkembang tetap mengancam stabilitas. Perang dagang AS-China yang berkelanjutan juga berpotensi mengganggu rantai pasok global, terutama untuk industri berbasis ekspor.

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5.3-5.7% pada 2025, dengan fokus pada program downstreaming mineral (nikel, tembaga), pembangunan infrastruktur strategis (IKN, rel Sumatra), dan ekspansi industri digital. Sektor properti diperkirakan tetap tangguh berkat permintaan hunian terjangkau di wilayah penyangga Jabodetabek, sementara energi terbarukan (PLTS, hidrogen hijau) dan agroindustri berkelanjutan menjadi andalan baru. Namun, ketergantungan pada ekspor komoditas (batubara, CPO) dan potensi pelemahan Rupiah tetap menjadi risiko utama. Bank Indonesia (BI) lebih hati-hati, memproyeksikan pertumbuhan 5.0-5.3% akibat tekanan kenaikan suku bunga Fed AS dan perlambatan permintaan ekspor ke China-Eropa.

Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp14.800-15.500/USD, tergantung pada kebijakan moneter Fed AS, harga komoditas global, dan stabilitas politik pasca-Pemilu 2024. BI akan mengoptimalkan intervensi valas dan kerja sama swap agreement untuk mengurangi volatilitas, sekaligus mendorong transaksi non-USD dalam perdagangan. Bagi pelaku usaha, strategi hedging dan diversifikasi pasar ekspor (ke Timur Tengah/Afrika) direkomendasikan untuk memitigasi risiko kurs.

Business Prospect

The global economy is projected to grow moderately in the range of 3.1% (IMF), driven by the recovery of the US and European manufacturing sectors. Green technology, AI, and digital health sectors are the main growth drivers, although challenges such as geopolitical tensions (Taiwan, Middle East) and uneven energy transitions in developing countries continue to threaten stability. The ongoing US-China trade war also has the potential to disrupt the global supply chain, especially for export-based industries.

The Indonesian government is targeting economic growth of 5.3-5.7% in 2025, with a focus on mineral downstreaming programs (nickel, copper), strategic infrastructure development (IKN, Sumatra rail), and digital industry expansion. The property sector is expected to remain resilient thanks to demand for affordable housing in the Jabodetabek buffer zone, while renewable energy (PLTS, green hydrogen) and sustainable agro-industry are new mainstays. However, dependence on commodity exports (coal, CPO) and the potential for Rupiah depreciation remain the main risks. Bank Indonesia (BI) is more cautious, projecting growth of 5.0-5.3% due to pressure from the US Fed's interest rate hike and slowing export demand to China-Europe.

The rupiah is expected to move in the range of Rp14,800-15,500/USD, depending on the US Fed's monetary policy, global commodity prices, and political stability after the 2024 election. BI will optimize foreign exchange intervention and swap agreement cooperation to reduce volatility, while encouraging non-USD transactions in trade. For business actors, hedging strategies and export market diversification (to the Middle East/Africa) are recommended to mitigate exchange rate risk.



Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2024

Pada tahun 2024, Perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp49 miliar atau naik sebesar 2x lipat dari tahun sebelumnya dengan GMP sebesar 35%.

Pada tahun 2025, berdasarkan pengalaman di masa lalu, Perseroan menjadi lebih realistis di dalam mematok target pendapatan. Selain itu dengan dukungan dan program dari Pemerintah saat ini, khususnya pada penyediaan 3 juta Perumahan Subsidi, Perseroan cukup optimis akan terjadinya peningkatan pendapatan pada aset persediaan yang dimiliki Perseroan. Oleh sebab itu di tahun 2025, Manajemen menargetkan penjualan sebesar Rp55 miliar atau meningkat hampir 3x lipat dibandingkan tahun 2024.

Proyeksi 2025

PT. Trimitra Prawira Goldland, Tbk. menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar Rp55 miliar di tahun 2025, melonjak 200% dari capaian tahun sebelumnya. Optimisme ini didasari oleh sinergi antara kebijakan nasional yang progresif, tren global yang menguntungkan, dan strategi inovatif perusahaan. Pemerintah Indonesia terus mendorong program downstreaming mineral dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membuka peluang besar di sektor properti, infrastruktur, dan logistik—bidang yang menjadi tulang punggung bisnis Trimitra. Dukungan insentif fiskal untuk energi terbarukan, seperti PLTS dan biofuel, juga sejalan dengan portofolio hijau perusahaan yang semakin berkembang.

Di tingkat global, permintaan akan produk ramah lingkungan dan teknologi kesehatan (aesthetic tech) terus meningkat, memperkuat posisi Trimitra di pasar ekspor. Transisi energi dunia yang masif turut mendorong investasi di sektor renewable energy dan smart industrial estate, di mana perusahaan telah memulai ekspansi melalui proyek percontohan kawasan industri hijau di Bekasi. Strategi internal Trimitra pun difokuskan

Comparison Between Target And Realization In 2024

In 2024, the Company targeted an income of Rp49 billion or an increase of 2x from the previous year with GMP of 35%.

In 2025, based on past experience, the Company became more realistic in setting revenue targets. In addition, with the support and programs of the current government, especially in the provision of 3 million subsidized housing, the Company is quite optimistic about an increase in income in the Company's inventory assets. Therefore in 2025, Management targeted sales of Rp55 billion or an increase of almost 3x compared to 2024.

2025 Projection

PT. Trimitra Prawira Goldland, Tbk. targets revenue growth of IDR55 billion in 2025, a 200% jump from the previous year's achievement. This optimism is based on the synergy between progressive national policies, favorable global trends, and the company's innovative strategies. The Indonesian government continues to encourage the mineral downstreaming program and the development of the Indonesian Capital City (IKN), which opens up huge opportunities in the property, infrastructure, and logistics sectors—areas that are the backbone of Trimitra's business. Support for fiscal incentives for renewable energy, such as solar power plants and biofuels, is also in line with the company's growing green portfolio.

Globally, demand for environmentally friendly products and health technology (aesthetic tech) continues to increase, strengthening Trimitra's position in the export market. The massive global energy transition has also driven investment in the renewable energy and smart industrial estate sectors, where the company has begun expansion through a pilot green industrial area project in Bekasi. Trimitra's internal strategy is also

pada inovasi, seperti pengembangan data centers, gudang pintar berbasis IoT, dan hunian terjangkau berstandar ESG. Kolaborasi dengan UMKM lokal untuk membangun rantai pasok berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi proptech (AI, virtual reality) menjadi kunci efisiensi operasional.

Pemulihan sektor properti Indonesia, terutama lonjakan permintaan hunian di wilayah penyangga Jabodetabek dan kota berkembang seperti Surabaya dan Medan, menjadi pendorong tambahan. Dengan struktur keuangan yang semakin kokoh, efisiensi biaya operasional, dan komitmen pada tata kelola perusahaan (GCG), Trimitra siap memanfaatkan momentum ekonomi hijau dan digitalisasi. Target Rp55 miliar bukan hanya angka, tetapi refleksi keyakinan bahwa pertumbuhan berkelanjutan lahir dari kolaborasi, inovasi, dan keberanian bertransformasi—nilai yang terus dipegang teguh untuk menciptakan solusi bagi Indonesia dan dunia.

Dividen

Sebagai entitas yang tercatat di bursa efek, Perseroan memiliki komitmen untuk mengalokasikan proporsi laba sebagai dividen kepada pemegang saham. Kebijakan ini senantiasa disesuaikan dengan regulasi perundang-undangan terkait serta memperhatikan kesehatan keuangan perusahaan. Pada tahun 2024, Perseroan memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen guna memprioritaskan penguatan struktur modal dan optimalisasi kinerja operasional.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak diwajibkan untuk melaporkan alokasi dana yang berasal dari hasil penawaran umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

focused on innovation, such as the development of data centers, IoT-based smart warehouses, and affordable housing with ESG standards. Collaboration with local MSMEs to build a sustainable supply chain and the use of proptech technology (AI, virtual reality) are the keys to operational efficiency.

The recovery of Indonesia's property sector, especially the surge in demand for housing in the Jabodetabek buffer zone and developing cities such as Surabaya and Medan, are additional drivers. With an increasingly solid financial structure, operational cost efficiency, and commitment to good corporate governance (GCG), Trimitra is ready to take advantage of the momentum of the green economy and digitalization. The target of IDR 55 billion is not just a number, but a reflection of the belief that sustainable growth is born from collaboration, innovation, and the courage to transform—values that continue to be held firmly to create solutions for Indonesia and the world.

Dividend

As an entity listed on the stock exchange, the Company is committed to allocating a proportion of profits as dividends to shareholders. This policy is always adjusted to the relevant laws and regulations and takes into account the company's financial health. In 2024, the Company decided not to distribute dividends in order to prioritize strengthening the capital structure and optimizing operational performance.

Realization Of The Use Of Public Offering Funds

Throughout 2024, the Company is not required to report the allocation of funds originating from the results of the public offering, in accordance with applicable laws and regulations.



Informasi Material

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak terdapat peristiwa material, transaksi afiliasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang wajib diungkapkan dalam laporan ini.

Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Tidak ada perubahan dalam perundang-undangan yang memiliki dampak signifikan bagi Perseroan pada tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Perseroan mengikuti dan mematuhi semua kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan, termasuk setiap amendemennya. Pada tahun 2023, Perseroan telah mematuhi semua kebijakan akuntansi yang berlaku.

Material Information

Throughout 2024, the Company did not encounter any material events, affiliated transactions, or activities potentially leading to conflicts of interest that require disclosure in this report.

Changes In Provisions Of Legal Regulations

There are no changes in legislation that will have a significant impact on the Company in 2024.

Changes In Accounting Policies And Financial Reporting

The Company follows and complies with all accounting and financial reporting policies, including any amendments. In 2023, the Company complied with all applicable accounting policies.



05

BAB

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE



TATA KELOLA PERUSAHAAN *Corporate Governance*

Perseroan memiliki tanggung jawab untuk mencapai target keuangan dan operasional yang telah ditetapkan. Namun, untuk memperoleh kepercayaan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, Perseroan juga mengemban tanggung jawab dalam menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance – GCG). Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang tepat, Perseroan tidak hanya menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan yang lebih baik, tetapi juga mendorong kinerja yang berkelanjutan dan lebih sehat secara keseluruhan.

The Company has the responsibility to achieve the financial and operational targets that have been set. However, to gain full trust from various stakeholders, the Company also assumes the responsibility of implementing the Principles of Good Corporate Governance (GCG). By implementing appropriate GCG principles, the Company not only creates a better control and regulatory system, but also encourages sustainable and healthier performance overall.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN *Corporate Governance Policy*

Dalam menghadapi tantangan masa yang akan datang, Perseroan menyadari bahwa kinerja sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh angka dan data semata, tetapi juga oleh cara pencapaian tersebut dilakukan dengan tepat. Konsep bisnis yang berkelanjutan bagi Perseroan menggabungkan aspek manfaat ekonomi dengan manfaat sosial sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai warga usaha yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance – GCG) menjadi krusial untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang.

In facing future challenges, the Company realizes that a company's performance is not only determined by numbers and data alone, but also by how these achievements are carried out correctly. The Company's sustainable business concept combines aspects of economic benefits with social benefits as part of its responsibilities as a responsible business citizen. In this case, the application of Good Corporate Governance (GCG) principles is crucial for optimizing company value for shareholders and other stakeholders in the long term.



1. **Transparansi:**

Perseroan harus menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Inisiatif untuk mengungkapkan informasi penting tidak hanya yang disyaratkan oleh peraturan, tetapi juga yang mempengaruhi keputusan pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya harus diambil.

2. **Akuntabilitas:**

Kinerja Perseroan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan adil. Manajemen perusahaan harus berlangsung dengan benar, terukur, dan sejalan dengan kepentingan perusahaan serta memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. **Responsibilitas:**

Perseroan harus mematuhi peraturan dan melaksanakan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan usaha jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab.

4. **Independensi:**

Dalam pelaksanaan GCG, Perseroan harus dikelola secara independen, sehingga setiap organ perusahaan beroperasi tanpa dominasi dari pihak lain dan tidak dapat diintervensi oleh pihak eksternal. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara efektif.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan:**

Dalam setiap langkah pelaksanaan kegiatan, Perseroan diharapkan untuk selalu mengutamakan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini harus dilakukan dengan memegang teguh asas kewajaran dan kesetaraan. Artinya, Perseroan diharapkan untuk menjalankan segala kegiatan bisnisnya dengan memperhatikan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil harus adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, tanpa memihak kepada satu pihak tertentu. Asas kewajaran menekankan

1. **Transparency:**

The Company must maintain objectivity in conducting business by providing material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. Initiatives to disclose important information not only required by regulations, but also that influences the decisions of shareholders, creditors and other stakeholders must be taken.

2. **Accountability:**

The Company's performance must be accountable in a transparent and fair manner. Company management must take place correctly, measurably, and in line with the company's interests and take into account the interests of shareholders and other stakeholders. Accountability is a prerequisite for achieving sustainable performance.

3. **Responsibility:**

The Company must comply with regulations and carry out social and environmental responsibilities. This is important to ensure long-term business continuity and gain recognition as a responsible corporate citizen.

4. **Independence:**

In implementing GCG, the Company must be managed independently, so that each company organ operates without domination from other parties and cannot be intervened by external parties. This is important to ensure the continuity and success of effective implementation of GCG principles.

5. **Fairness and Equality:**

In every step of implementing activities, the Company is expected to always prioritize the interests of shareholders and other stakeholders. This must be done by upholding the principles of fairness and equality. This means that the Company is expected to carry out all its business activities by paying attention that the decisions or actions taken must be fair and balanced for all parties involved, without taking sides in one particular party. The principle of fairness emphasizes the importance of fairness and propriety in every



pentingnya keadilan dan kepatutan dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil, sedangkan asas kesetaraan menegaskan bahwa setiap pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Dengan mematuhi asas-asas ini, Perseroan diharapkan dapat membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnisnya.

action or decision taken, while the principle of equality emphasizes that every stakeholder must be treated fairly and equally without discrimination. By adhering to these principles, the Company is expected to be able to build strong and sustainable relationships with all parties involved in its business activities.

Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dengan pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG), yang mengharuskan Perseroan untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

These principles are integrated with the Environmental, Social, and Governance (ESG) approach, which requires the Company to comply with all applicable regulations and laws, including but not limited to:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK);
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM);
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (UUOJK);
5. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-412/BL/2009 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu (KEP BAPEPAM-LK 412/2009);
6. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-346/BL/2011 Tentang Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (KEP BAPEPAM-LK 346/2011);
7. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-614/BL/2011 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (KEP BAPEPAM-LK 614/2011);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2014 Tentang

1. *Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and as partially amended by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK);*
2. *Law no. 13 of 2003 concerning Employment (Employment Law) and as partially amended by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK);*
3. *Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM);*
4. *Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) (UUOJK);*
5. *Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No. Kep-412/BL/2009 concerning Affiliated Transactions and Certain Conflicts of Interest (KEP BAPEPAM-LK 412/2009);*
6. *Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No. Kep-346/BL/2011 concerning Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies (KEPBAPEPAM-LK 346/2011);*
7. *Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No. Kep-614/BL/2011 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities (KEP BAPEPAM-LK 614/2011);*
8. *Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2014 concerning*



- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (POJK 21/POJK.04/2014); | <i>Implementation of Public Company Governance Guidelines (POJK 21/POJK.04/2014);</i> |
| 9. POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/POJK.04/2014); | 9. <i>POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (POJK 33/POJK.04/2014);</i> |
| 10. POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 34/POJK.04/2014); | 10. <i>POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies (POJK 34/POJK.04/2014);</i> |
| 11. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 35/POJK.04/2014); | 11. <i>POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies (POJK 35/POJK.04/2014);</i> |
| 12. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 8/POJK.04/2015); | 12. <i>POJK No. 8/POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Websites (POJK 8/POJK.04/2015);</i> |
| 13. POJK No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 31/POJK.04/2015); | 13. <i>POJK No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (POJK 31/POJK.04/2015);</i> |
| 14. POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK 55/POJK.04/2015); | 14. <i>POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee (POJK 55/POJK.04/2015);</i> |
| 15. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Piagam Unit Audit Internal (POJK 56/POJK.04/2015); | 15. <i>POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Internal Audit Unit Charter (POJK 56/POJK.04/2015);</i> |
| 16. OJK No. 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 29/POJK.04/2016); | 16. <i>OJK No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies (POJK 29/POJK.04/2016);</i> |
| 17. POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK 51/POJK.03/2017); | 17. <i>POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies (POJK 51/POJK.03/2017);</i> |
| 18. POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/POJK.04/2020); | 18. <i>POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/POJK.04/2020);</i> |
| 19. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/POJK.04/2020); | 19. <i>POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK 16/POJK.04/2020);</i> |



20. POJK No. 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah (POJK 43/POJK.04/2020);

21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka (SEOJK 32/SEOJK.04/2015);

22. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (SEOJK 16/SEOJK.04/2021);

23. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) Sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa Secara Elektronik Dalam Proses Penyelenggaraan RUPS Bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI; serta

24. Berbagai pedoman implementasi GCG antara lain Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Perseroan secara konsisten memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) melalui pembentukan struktur organisasi yang komprehensif. Rangkaian governance ini meliputi:

1. Organ Pengambil Kebijakan:

- RUPS sebagai pemegang otoritas tertinggi
- Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan strategis

2. Struktur Pendukung GCG:

- Komite Audit untuk memastikan integritas laporan keuangan
- Komite Nominasi & Remunerasi yang mengawasi manajemen SDM korporat

20. POJK No. 43/POJK.04/2020 concerning Obligations for Information Disclosure and Corporate Governance for Issuers or Public Companies that Meet the Criteria for Issuers with Small Scale Assets and Issuers with Medium Scale Assets (POJK 43/POJK.04/2020);

21. Financial Services Authority Circular (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance (SEOJK 32/SEOJK.04/2015);

22. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies (SEOJK 16/SEOJK.04/2021);

23. Decision of the Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 of 2020 concerning Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Facility as a Mechanism for Providing Electronic Power of Attorney in the Process of Holding a GMS for Securities Issuers which are Public Companies and whose Shares are held in KSEI Collective Custody; as well as

24. Various GCG implementation guidelines include the Corporate Governance Principles developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

The Company has consistently strengthened its Good Corporate Governance (GCG) framework through a comprehensive organizational structure. This governance system comprises:

1. Policy-Making Bodies:

- The General Meeting of Shareholders (GMS) as the supreme authority
- The Board of Commissioners performing strategic oversight functions

2. GCG Supporting Structure:

- Audit Committee ensuring financial reporting integrity
- Nomination & Remuneration Committee overseeing corporate HR management



3. Eksekusi Operasional:

- Direksi yang mengimplementasikan prinsip GCG dalam bisnis harian
- Didukung oleh Sekretaris Perusahaan untuk transparansi administrasi
- Dikawal oleh Unit Audit Internal untuk optimalisasi proses bisnis

Struktur yang terintegrasi ini memastikan seluruh operasional Perseroan berjalan dengan prinsip:

- Akuntabilitas yang jelas
- Kepatuhan regulasi yang ketat
- Efisiensi operasional yang berkelanjutan

Melalui pendekatan GCG yang holistik ini, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder dengan tata kelola perusahaan kelas dunia.

3. Operational Execution:

- Board of Directors implementing GCG principles in daily operations
- Supported by the Corporate Secretary for administrative transparency
- Guarded by the Internal Audit Unit for business process optimization

This integrated structure ensures all company operations adhere to:

- Clear accountability
- Strict regulatory compliance
- Sustainable operational efficiency

Through this holistic GCG approach, the Company remains committed to creating added value for all stakeholders through world-class corporate governance.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM *General Meeting Of Shareholders*

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berfungsi sebagai lembaga tertinggi Perseroan dengan kewenangan eksklusif yang tidak dapat didelegasikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sesuai kerangka hukum yang berlaku. Tata cara pelaksanaan RUPS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020.

Hak-hak pemegang saham dalam RUPS meliputi:

1. Hak menyampaikan pendapat dan meminta klarifikasi terkait Perseroan
2. Jaminan bahwa seluruh keputusan RUPS harus mengutamakan kepentingan jangka panjang Perseroan

Struktur tata kelola ini menjamin

- Pembagian kewenangan yang jelas antar organ perusahaan
- Kepatuhan regulasi dalam seluruh proses RUPS
- Perlindungan hak pemegang saham sekaligus keberlanjutan korporasi

Ketentuan yang mengatur keputusan RUPS, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, mencakup berbagai hal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Persetujuan terhadap laporan tahunan dan validasi laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan;
2. Penentuan penggunaan laba bersih Perseroan;
3. Pelantikan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan remunerasi untuk mereka;
4. Keputusan mengenai penggabungan, peleburan, atau pemisahan Perseroan;
5. Perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
6. Rencana Perseroan dalam menjalankan transaksi melebihi nilai tertentu dan transaksi yang melibatkan konflik kepentingan.

The Company's General Meeting of Shareholders (GMS) serves as the supreme governing body, exercising exclusive authorities not delegated to the Board of Directors or Board of Commissioners, as established by applicable legal frameworks. The GMS procedures are governed by Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 15/POJK.04/2020 and 16/POJK.04/2020.

Key shareholder rights in the GMS include:

1. *The right to express opinions and request company-related clarifications*
2. *The guarantee that all GMS decisions must prioritize the Company's long-term interests*

This governance structure ensures:

- *Clear separation of authority between governance bodies*
- *Regulatory compliance in all shareholder proceedings*
- *Protection of shareholder rights while maintaining corporate sustainability*

The provisions governing GMS decisions, as stipulated in the applicable regulations and the Company's Articles of Association, cover various matters, including but not limited to:

1. *Approval of the annual report and validation of the Board of Commissioners report and the Company's financial reports;*
2. *Determining the use of the Company's net profit;*
3. *Inauguration and dismissal of members of the Board of Commissioners and Directors and determination of remuneration for them;*
4. *Decisions regarding the merger, consolidation or separation of the Company;*
5. *Changes in the Company's Articles of Association;*
6. *The Company's plans for carrying out transactions exceeding a certain value and transactions involving conflicts of interest.*



RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Sementara itu, RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan kapan saja sesuai kebutuhan. Pada tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan satu kali RUPST pada tanggal 30 Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengumuman mengenai RUPS Tahunan diberikan paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPST, yang jatuh pada tanggal 24 Mei 2024.
2. Pemanggilan untuk RUPS Tahunan diberikan paling lambat 21 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPST, yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2024.

RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, bertempat di Little Amaroossa, Jalan Cipete Raya No. 5, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham dalam Rapat, tercatat bahwa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.107.314.900 saham, yang merupakan 88,5851% dari total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 1.250.000.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

The Annual GMS is held every year, no later than six months after the end of the financial year. Meanwhile, an Extraordinary GMS (EGMS) can be held at any time as needed. In 2024, the Company will hold one AGMS on June 30, 2024, with the following details:

1. *Announcement regarding the Annual GMS is given no later than 14 days before the date of the AGMS, which falls on May 24, 2024.*
2. *The invitation for the Annual GMS is given no later than 21 days before the date of the AGMS, which will be held on June 8, 2024.*

The Annual GMS was held on June 28, 2024, at Little Amaroossa, Jalan Cipete Raya No. 5, Neighborhood Association 017, Community Association 003, Cipete Selatan Village, Cilandak District, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12410. Based on the attendance list of shareholders at the Meeting, it was recorded that the number of shares present or represented at the Meeting was 1,107,314,900 shares, which is 88.5851% of the total shares issued by the Company of 1,250,000,000 shares, which have valid voting rights. In addition, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the Meeting were as follows:



DIREKSI:

Direktur Utama : **Ibu INDRIATI;**
Direktur : **Bapak RACHMAT YAKTIHADI.**

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : **Bapak YOYO SUGENG TRIYOGO;**
Komisaris : **Ibu NADIA HASNA HUMAIRA.**

3. Risalah RUPS Tahunan disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan, yaitu pada tanggal 28 Juni 2024.
4. Keputusan RUPS yang meliputi:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : **Mrs. INDRIATI;**
Director : **Mr. RACHMAT YAKTIHADI.**

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : **Mr. YOYO SUGENG TRIYOGO;**
Commissioner : **Ms. NADIA HASNA HUMAIRA.**

3. The minutes of the Annual GMS are submitted to OJK no later than 30 days after the GMS is held, namely on June 28 2024.
4. GMS resolutions which include:

Agenda 1

Persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan

Approval of the 2023 Annual Report and Financial Report

Keputusan <i>Decision</i>	Realisasi <i>Implementation</i>
<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang di dalamnya terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan pgi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. <p><i>Approve and ratify the Annual Report for the year book ending on December 31, 2023 which consists of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Report on the progress of the management of the Company by the Board of Directors and Report on the progress of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the 2023 financial year.</i> 2. <i>Financial Report and Balance Sheet as well as profit and loss calculations for the financial year ending December 31, 2023</i> 	<p>Telah efektif pada saat ditutupnya RUPS Tahunan.</p> <p><i>Has been effective at the closing of the Annual GMS.</i></p>



Agenda 2

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Determination of the Company's profit and loss for the fiscal year ending on December 31, 2023.

Keputusan <i>Decision</i>	Realisasi <i>Implementation</i>
<p>Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.</p> <p><i>Establishing the use of the Company's net profit for the fiscal year ended December 31, 2023, amounting to Rp 122,000,000 (one hundred twenty-two million rupiah) for the development of the company's business and strengthening the capital structure so that there is no dividend distributed to shareholders.</i></p>	<p>Telah efektif pada saat ditutupnya RUPS Tahunan.</p> <p><i>Has been effective at the closing of the Annual GMS.</i></p>

Agenda 3

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Determination of the amount of salaries and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

Keputusan <i>Decision</i>	Realisasi <i>Implementation</i>
<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><i>Give authority and power to the Company's Board of Commissioners to set salaries and/or honorariums and/or other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2024 (two thousand twenty four), the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.</i></p>	<p>Telah efektif pada saat ditutupnya RUPS Tahunan.</p> <p><i>Has been effective at the closing of the Annual GMS.</i></p>



Agenda 4

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2024.

Keputusan <i>Decision</i>	Realisasi <i>Implementation</i>
<ol style="list-style-type: none"> Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. <p><i>1. Delegating the authority of the appointment of Public Accountants who will audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2024, to the Board of Commissioners of the Company in order to meet the applicable regulations and obtain appropriate public accountants, with the provisions of the criteria and limits of public accountants and appointed public accounting firms are public accountants who have audit experience in the field of business activities of the Company, have adequate human resources.</i></p> <p><i>2. Approve authority to the Board of Commissioners to establish an honorarium and other requirements that are reasonable for the public accountant.</i></p>	<p>Telah efektif pada saat ditutupnya RUPS Tahunan.</p> <p><i>Has been effective at the closing of the Annual GMS.</i></p>

Agenda 5

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Changes in the composition of the Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.

Keputusan <i>Decision</i>	Realisasi <i>Implementation</i>
<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan dengan hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-masing. Menyetujui pengangkatan kembali Ibu INDRIATI selaku Direktur Utama, Bapak RACHMAT YAKTIHADI selaku Direktur, Bapak YOYO SUGENG TRIYOGO selaku Komisaris Utama, dan menyetujui pengangkatan Ibu NADIA HASNA HUMAIRA selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat, yaitu sampai dengan tanggal 27 Juni 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: 	<p>Telah efektif pada saat ditutupnya RUPS Tahunan.</p>



DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Bapak YOYO SUGENG TRIYOGO;
- Komisaris Independen : Ibu NADIA HASNA HUMAIRA. -

DIREKSI:

- Direktur Utama : Ibu INDRIATI;
- Direktur : Bapak RACHMAT YAKTIHADI.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

1. *Approved with respectfully all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who were still in office, as of the closing of the meeting, by giving the acquisition, expenditure and release of full responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who had been dismissed with respect, for the actions of management and supervision carried out by them, as long as their actions are reflected in the annual report and financial statements during their respective term.*
2. *Approved the reappointment of Mrs. INDRIATI as President Director, Mr. RACHMAT YAKTIHADI as Director, Mr. YOYO SUGENG TRIYOGO as President Commissioner, and approved the appointment of Mrs. NADIA HASNA HUMAIRA as Independent Commissioner of the Company, for a new term of office, namely for 5 (five) years from the closing of the Meeting, without reducing the rights of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.*
3. *Determine the composition of members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for the new term of office, for 5 (five) years from the meeting of the meeting, namely until June 27, 2029, by not reducing the rights of the general meeting of the Company's shareholders to dismiss at any time, as follows:*

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner: Mr. Yoyo Sugeng Triyogo;
- Independent Commissioner: Mrs. Nadia Hasna Humaira.

Directors:

- President Director: Ms. Indriati;
- Director: Mr. Rachmat Yaktihadi.

4. Provide power to the Directors of the Company and/or other appointed parties, both together and individually with the rights of substitution, to declare the decision of the fifth events of the meeting, in a separate deed in front of a notary, including notifying the authorized agencies and registering and carrying out the necessary actions in connection with the re-appointment of all members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Has been effective at the closing of the Annual GMS.



Di tahun 2024, Perseroan telah menjalankan semua resolusi yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 30 Juni 2023 yang menetapkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
 - b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 2.152.362.165,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar Rp 150.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. Sisanya sebesar Rp 1.902.362.165,- digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan.

In 2024, the Company has implemented all resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders on 30 June 2023 which stipulated the following decisions:

1. *Approved and ratified the Annual Report for the financial year ending December 31, 2024 which consists of:*
 - a. *Report on the running of the Company's management by the Board of Directors and Report on the Implementation of the Company's supervision by the Board of Commissioners for the 2024 financial year;*
 - b. *Financial Statements and Balance Sheet as well as profit and loss calculations for the financial year ending December 31, 2024; thereby agreeing to provide full acquittal and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the financial year ending December 31, 2024 as long as these actions are reflected in The Company's Annual Report and Annual Financial Report ending December 31, 2024.*
2. *Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2024, which is Rp. 2.152.362.165,- with the following details:*
 - a. *Rp. 100,000,000 is set aside as a general reserve fund to comply with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law;*
 - b. *A total of Rp. 150.000.000 will be distributed as cash dividends to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on the recording date to be determined by the Board of Directors;*
 - c. *The remaining Rp. 1.902.362.165 will be used to develop the business and strengthen the Company's capital structure.*



3. Terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, keputusannya adalah sebagai berikut:
 - a. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017.
 - b. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan atau melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2025, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
 4. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi/ penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 dan tantiem tahun buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Regarding the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2025, the decision is as follows:*
 - a. *Delegating the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2025, to the Company's Board of Commissioners in order to comply with applicable regulations and obtain an appropriate Public Accountant, with the provisions of the criteria and limitations of Public Accountants and Offices The Public Accountant who can be appointed refers to the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017.*
 - b. *Appoint a replacement Public Accountant in the event that the Public Accountant who has been appointed pursuant to the Meeting Resolution for any reason is unable to complete/ carry out an audit of the December 31, 2025 financial statements, including approving the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant .*
 4. *Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration/ income for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024 and tantiem for the 2023 fiscal year for the Board of Directors and Board of Commissioners, the implementation of which will be adjusted to the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.*



DEWAN KOMISARIS

Board Of Commissioners

Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Tugas utama mereka meliputi memberikan nasihat kepada Direksi sambil memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) secara efektif dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris secara rutin memantau kebijakan, kinerja, dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, serta implementasi strategi yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Semua tindakan dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur oleh Pedoman Kerja dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris serta berdasarkan POJK 33/POJK.04/2014.

Detail mengenai tanggung jawab dan wewenang, mekanisme rapat, evaluasi kinerja, penanganan konflik kepentingan, serta proses pemilihan atau penggantian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Hingga akhir tahun 2024, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Komisaris Utama: H. Yoyo Sugeng
Triyogo, SE**

**Komisaris Independen: Nadia Hasna
Humaira**

Profil Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan, sub-bagian Profil Dewan Komisaris.

The Company's Board of Commissioners is responsible for supervision in accordance with applicable regulations and the Company's Articles of Association. Their main duties include providing advice to the Board of Directors while ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG) effectively and sustainably.

The Board of Commissioners regularly monitors the policies, performance and decision-making processes of the Board of Directors, as well as the implementation of strategies determined to meet the expectations of shareholders and other stakeholders. All actions and responsibilities of the Board of Commissioners are regulated by the Work Guidelines and Code of Ethics for the Board of Directors and Board of Commissioners and based on POJK 33/POJK.04/2014.

Details regarding responsibility and authority, meeting mechanisms, performance evaluation, handling conflicts of interest, as well as the process for selecting or replacing members of the Board of Commissioners are regulated in the Board of Commissioners' Guidelines and Work Rules. Until the end of 2024, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

**President Commissioner: H. Yoyo Sugeng
Triyogo, SE**

**Independent Commissioner: Nadia Hasna
Humaira**

The profile of the Board of Commissioners can be seen in the Company Profile section, sub-section of the Board of Commissioners Profile.

KOMISARIS INDEPENDEN *Independent Commissioner*

Perseroan telah menunjuk Komisaris Independen yang bertanggung jawab atas pengawasan dan mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan bahwa setidaknya 33,33% dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Sesuai dengan ketentuan independensi yang diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, Komisaris Independen telah memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Tidak memiliki kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Jika membeli saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Komisaris Independen akan segera memberitahukan Perseroan dalam waktu 3 hari setelah terjadinya transaksi.
2. Tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
3. Tidak memiliki keterkaitan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengontrol, atau mengawasi kegiatan Perseroan, kecuali dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen.
5. Berkomitmen untuk tetap bertindak secara independen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris Independen, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Pemenuhan persyaratan independensi tersebut telah diumumkan oleh Komisaris Independen kepada pemegang saham.

The Company has appointed an Independent Commissioner who is responsible for supervision and representing the interests of minority shareholders. The composition of the members of the Company's Board of Commissioners has met the requirement that at least 33.33% of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. In accordance with the independence provisions regulated in POJK No. 33/POJK.04/2014, the Independent Commissioner has fulfilled the following criteria:

1. *Does not have share ownership either directly or indirectly in the Company. If you buy Company shares, either directly or indirectly, the Independent Commissioner will immediately notify the Company within 3 days after the transaction occurs.*
2. *Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company.*
3. *Has no business connection either directly or indirectly with the Company's business activities.*
4. *Does not have the authority or responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities, except in his capacity as an Independent Commissioner.*
5. *Committed to continuing to act independently in carrying out the supervisory function of the Company's operations while serving as an Independent Commissioner, including in the decision-making process.*

Fulfillment of these independence requirements has been announced by the Independent Commissioner to shareholders.



Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mematuhi seluruh prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG), terutama terkait independensi, dengan menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan dan memastikan kebebasan dari intervensi pihak manapun. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham harus memastikan tidak terjadinya transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, serta senantiasa:

1. Menempatkan kepentingan Perseroan sebagai prioritas utama dan tidak merugikan kondisi keuangan Perseroan dalam situasi adanya benturan kepentingan.
2. Menghindari terlibat dalam pengambilan keputusan ketika terdapat situasi dan kondisi yang menimbulkan benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan secara jelas terkait hubungan kekeluargaan, keuangan, kepemilikan, dan manajemen dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham pengendali, atau pihak lain yang terlibat dalam bisnis Perseroan.
4. Memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara transparan ketika terdapat benturan kepentingan.

Meskipun demikian, terkadang tidak dapat dihindari adanya hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi satu dengan yang lain.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan pemegang saham utama atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris satu dengan yang lain.

Management Of Conflict Of Interest Of The Board Of Commissioners

The Board of Commissioners has the responsibility to comply with all Corporate Governance (GCG) principles, especially regarding independence, by ensuring that there are no conflicts of interest and ensuring freedom from intervention by any party. Therefore, every member of the Board of Commissioners, Directors and shareholders must ensure that no affiliated transactions and conflicts of interest occur, and always:

1. *Placing the Company's interests as the main priority and not harming the Company's financial condition in situations of conflict of interest.*
2. *Avoid being involved in decision making when there are situations and conditions that give rise to a conflict of interest.*
3. *Make clear disclosures regarding familial, financial, ownership and management relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, controlling shareholders or other parties involved in the Company's business.*
4. *Ensure decision making is carried out transparently when there is a conflict of interest.*

However, sometimes it cannot be avoided that there is an affiliate relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders, which includes:

1. *Affiliate relationship between members of the Board of Directors and each other.*
2. *Affiliate relationship between members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
3. *Affiliate relationship between members of the Board of Directors and major or controlling shareholders.*
4. *Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners with each other.*

5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama atau pengendali.

Hingga akhir tahun 2024, terdapat hubungan keluarga antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE sebagai Komisaris Utama dan Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak sebagai Direktur Utama, yang merupakan pasangan suami istri. Keduanya juga merupakan pemegang saham PT Trimitra Prawara, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Dewan Komisaris

Kewenangan, tanggung jawab, dan tugas Dewan Komisaris diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, seperti berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki hak untuk masuk ke bangunan, halaman, atau area lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kerja kantor Perseroan. Mereka berwenang untuk memeriksa semua buku catatan, surat-surat, dan bukti lainnya, melakukan pengecekan dan penyesuaian terhadap keuangan termasuk uang kas, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi berkewajiban memberikan penjelasan atas segala hal yang diminta oleh Dewan Komisaris.
3. Jika seluruh anggota Direksi sementara dipecat oleh Perseroan dan Perseroan tidak memiliki anggota Direksi, maka sementara itu Dewan Komisaris akan bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan. Dalam situasi tersebut, Dewan Komisaris memiliki hak untuk memberikan wewenang sementara kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Jika hanya ada satu anggota Dewan Komisaris, maka semua tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan berlaku juga untuknya.

5. *Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners and major or controlling shareholders.*

Until the end of 2024, there is a family relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company, namely H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE as President Commissioner and Hj. Indriati, S.E. M.Si, Ak as Main Director, who are husband and wife. Both of them are also shareholders of PT Trimitra Prawara, which is the controlling shareholder of the Company.

Duties, Responsibilities And Authorities Of The Board Of Commissioners

The authority, responsibilities and duties of the Board of Commissioners are regulated by the Company's Articles of Association and the Board of Commissioners' Work Guidelines and Rules, as follows:

1. *The Board of Commissioners has the right to enter buildings, grounds or other areas used or controlled by the Company during the Company's office hours. They have the authority to examine all notebooks, letters and other evidence, check and adjust finances including cash, and have the right to know all actions taken by the Board of Directors.*
2. *The Board of Directors and each member of the Board of Directors are obliged to provide explanations on all matters requested by the Board of Commissioners.*
3. *If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed by the Company and the Company does not have any members of the Board of Directors, then in the meantime the Board of Commissioners will be responsible for managing the Company. In such situations, the Board of Commissioners has the right to grant temporary authority to one or more members of the Board of Commissioners for the responsibility of the Board of Commissioners.*
4. *If there is only one member of the Board of Commissioners, then all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in the Company's Articles of Association also apply to him.*



Rapat Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 dan Pedoman serta Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris menegaskan kewajiban Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan rapat setidaknya satu kali setiap dua bulan, serta mengadakan pertemuan bersama dengan Direksi secara berkala, minimal satu kali dalam empat bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal yang telah ditetapkan jika:

1. Dianggap perlu oleh satu atau beberapa anggota Dewan Komisaris; atau
2. Terdapat permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Direksi, dengan menjelaskan topik-topik yang akan dibahas.

Selain itu, Dewan Komisaris dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa melalui rapat, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai proposal-proposal tersebut. Persetujuan dari seluruh anggota Dewan Komisaris harus diberikan secara tertulis dan ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris Perseroan telah menggelar rapat sebanyak 4 kali, dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris mencapai rata-rata 100 persen. Detail kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Meeting Of The Board Of Commissioners

Financial Services Authority Regulation (POJK) no. 33/POJK.04/2014 and the Board of Commissioners' Work Guidelines and Code of Conduct emphasize the obligation of the Board of Commissioners to hold meetings at least once every two months, as well as holding joint meetings with the Board of Directors periodically, at least once every four months. Board of Commissioners meetings can be held outside the established schedule if:

1. Considered necessary by one or more members of the Board of Commissioners;
- or
2. There is a written request from one or more members of the Board of Directors, explaining the topics to be discussed.

In addition, the Board of Commissioners can make legal and binding decisions without going through a meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing regarding the proposals. Approval from all members of the Board of Commissioners must be given in writing and signed. Decisions taken in this way have the same force as decisions taken at a meeting of the Board of Commissioners.

In 2024, the Company's Board of Commissioners held 4 meetings, with the attendance level of members of the Board of Commissioners reaching an average of 100 percent. Details of the attendance of members of the Board of Commissioners at meetings can be seen in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Perubahan Change	%
H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE	Komisaris Utama President Commissioner	4	4	100%
Nadia Hasna Humaira	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100%



REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Recommendation of the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Ringkasan Rekomendasi Brief of Recommendation
1	1 Maret 2024	Strategi peningkatan penjualan di semester 1 tahun 2024 <i>Strategy to increase sales in 1st semester 2024</i>
2	1 Maret 2024	Pembahasan tentang regulasi industri properti di tahun 2024 <i>Discussion on Property Industry Regulations in 2024</i>

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Decision of the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Nomor Keputusan No. of Decree	Ringkasan Keputusan Brief of Decree
1	18 Juli 2024	06/DEKOM/VII/2024	Inventarisasi legalitas proyek <i>Project legality inventory</i>
2	27 Oktober 2024	08/DEKOM/XI/2024	Penyesuaian Harga Jual sebagai persiapan untuk pembebasan PPN <i>Selling Price Adjustment in preparation for VAT exemption</i>

Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Bersama Direksi sebanyak 4 (empat) kali di tahun 2024. Adapun rata-rata kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar 100 persen. Tabel berikut adalah Laporan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat:

The Board of Commissioners will hold 4 (four) joint meetings with the Board of Directors in 2024. The average attendance of members of the Board of Commissioners and Directors is 100 percent. The following table is a report on the attendance of the Board of Commissioners and Directors at meetings:



Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Frekuensi Rapat <i>Meeting Frequency</i>	Jumlah Kehadiran <i>Attendance</i>	%
H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	4	4	100%
Nadia Hasna Humaira	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	4	4	100%
Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak	Direktur Utama <i>President Director</i>	4	4	100%
Rachmat Yaktihadi	Direktur <i>Director</i>	4	4	100%

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI

Decision of the Board of Directors

No	Tanggal <i>Date</i>	Nomor Keputusan <i>No. of Decree</i>	Ringkasan Keputusan <i>Brief of Decree</i>
1	22 Maret 2024	02/DIR-TPG/III/2024	Pembahasan mengenai desain baru fasad perumahan dan pemaksimalan pembuatan sarana dan prasarana perumahan. <i>Discussion on new designs for housing facades and maximizing the creation of housing facilities and infrastructure.</i>
2	2 Agustus 2024	10/DIR-TPG/VIII/2024	Segera merealisasikan produk baru untuk tipe 40/84 dengan 2 lantai untuk promo Kemerdekaan <i>Immediately realizing new products for type 40/84 with 2 floors for the Independence promo</i>
3	4 Oktober 2024	15/DIR-TPG/X/2024	Melakukan penyesuaian harga jual dengan program pembebasan PPN dari pemerintah <i>Adjust the selling price according to the government's VAT exemption program</i>



Pelatihan Dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris perlu mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya serta terus mengikuti perkembangan terbaru dalam industri. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Ketika seorang Komisaris baru diangkat, dia juga diharuskan untuk mengikuti program orientasi yang dirancang untuk mempercepat pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris, serta untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan.

Penilaian Terhadap Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, setiap anggota Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi mandiri (self-assessment) dan juga evaluasi sesama (peer-assessment) terhadap kinerja mereka. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi ini meliputi pencapaian indikator kinerja kunci, kehadiran dalam rapat, dan pengembangan kompetensi. Hasil dari evaluasi ini menunjukkan kinerja yang memuaskan, di mana semua anggota Dewan Komisaris telah bekerja secara optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing.

Penilaian Direksi Dan Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Pada tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sebagaimana tercermin dari pemenuhan indikator kunci kinerja, kehadiran dalam rapat, dan pengembangan kompetensi. Penilaian ini tercermin dalam Laporan Dewan Komisaris yang terdapat dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Direksi didukung oleh dua komite, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Audit telah

Training And Competence Improvement Of The Board Of Commissioners

Members of the Board of Commissioners need to maintain and improve their competence and continue to follow the latest developments in the industry. Therefore, each member of the Board of Commissioners is required to take part in a competency development program in accordance with their respective areas of expertise. When a new Commissioner is appointed, he is also required to take part in an orientation program designed to accelerate understanding of his duties and responsibilities as a Commissioner, as well as to adapt to the values espoused by the Company.

Assessment Of The Performance Of Members Of The Board Of Commissioners

In 2024, each member of the Board of Commissioners has carried out a self-assessment and also a peer evaluation of their performance. The criteria used in this evaluation include achievement of key performance indicators, meeting attendance, and competency development. The results of this evaluation show satisfactory performance, where all members of the Board of Commissioners have worked optimally in accordance with their respective roles and responsibilities.

Assessment Of The Board Of Directors And Committees Under The Board Of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible for supervision of the management of the Company carried out by the Board of Directors. In 2024, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has carried out their duties well, as reflected in the fulfillment of key performance indicators, meeting attendance and competency development. This assessment is reflected in the Board of Commissioners' Report contained in the Company's Annual Report.

The supervision and guidance carried out by the Board of Commissioners towards the Board of Directors is supported by two committees, namely the Audit Committee and the Nomination and



menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk membantu dalam merekomendasikan Akuntan Publik sebagai auditor laporan keuangan Perseroan, memberikan rekomendasi terkait kesesuaian pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku, serta mengeksekusi tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sementara itu, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan Dewan Komisaris. Komite ini secara berkala meninjau metode nominasi dan remunerasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan praktik terbaik dalam industri. Selain itu, komite ini juga memberikan rekomendasi terkait remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan.

Remuneration Committee. The Audit Committee has carried out its duties well, including assisting in recommending Public Accountants as auditors of the Company's financial reports, providing recommendations regarding the conformity of financial reporting with applicable regulations, as well as executing other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Meanwhile, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its functions in accordance with the expectations of the Board of Commissioners. This committee periodically reviews nomination and remuneration methods to ensure they comply with industry best practices. Apart from that, this committee also provides recommendations regarding remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners based on the performance evaluation carried out.

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Nomination And Remuneration Of Board Of Directors And Commissioner

Prosedur Nominasi

Perseroan telah menetapkan prosedur nominasi yang dimulai dengan penerapan kriteria minimum, seperti karakter, integritas, dan dedikasi terhadap kinerja serta keberlanjutan Perseroan. Selanjutnya, calon kandidat akan melalui evaluasi reputasi mereka, terutama terkait dengan aktivitas bisnis dan aspek hukum. Komite Nominasi dan Remunerasi juga akan mempertimbangkan pengalaman, keterampilan, serta pemahaman khusus yang dimiliki oleh calon agar sesuai dengan kebutuhan Perseroan saat ini dan di masa depan.

Semua pertimbangan ini akan dibahas bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi juga akan mempertimbangkan sejauh mana calon kandidat dapat beradaptasi dengan budaya dan tata kelola Perseroan. Setelah penetapan keputusan, seluruh calon yang dianggap memenuhi syarat dan sesuai akan diajukan untuk dipilih oleh Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.

Nomination Procedure

The Company has established a nomination procedure which begins with the application of minimum criteria, such as character, integrity and dedication to the Company's performance and sustainability. Next, prospective candidates will go through an evaluation of their reputation, especially related to business activities and legal aspects. The Nomination and Remuneration Committee will also consider the special experience, skills and understanding possessed by the candidate to suit the Company's current and future needs.

All these considerations will be discussed together with the Board of Directors and Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee will also consider the extent to which prospective candidates can adapt to the Company's culture and governance. After the decision is made, all candidates who are deemed to meet the requirements and are suitable will be submitted for election by the Board of Commissioners together with the Board of Directors.

Prosedur Remunerasi

Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang melibatkan struktur remunerasi yang terdiri dari gaji, insentif, dan tunjangan. Nilai remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dicapai. Pada tahun 2024, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris mencapai Rp 570 juta, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya adalah sebesar Rp 490 juta.

Manajemen operasional untuk mencapai misi dan visi Perseroan merupakan tanggung jawab yang diemban oleh Direksi. Sebagai organ inti Perseroan, Direksi bertugas mewakili Perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar. Peran penting ini menuntut Direksi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan hati-hati, serta mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Keberadaan dan fungsi Direksi Perseroan diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pengelolaan Perseroan dilakukan secara kolegial oleh Direksi, di mana keputusan diambil melalui rapat Direksi dan dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Setiap tindakan yang diambil oleh anggota Direksi di luar keputusan rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi mereka sampai disetujui oleh rapat Direksi.

Remuneration Procedure

Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners follows the provisions stated in the Company's Articles of Association, which involve a remuneration structure consisting of salary, incentives and allowances. The remuneration value for each member of the Board of Commissioners and Directors is determined based on the performance evaluation that has been achieved. In 2024, the amount of remuneration received by the Board of Commissioners will reach IDR 570 million, while in 2023 the amount will be IDR 490 million.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Operational management to achieve the Company's mission and vision is the responsibility carried out by the Board of Directors. As the core organ of the Company, the Board of Directors is tasked with representing the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions stated in the Articles of Association. This important role requires the Board of Directors to carry out their duties and responsibilities in good faith, responsibly and carefully, and comply with all applicable regulations.

The existence and functions of the Company's Directors are regulated in the Law on Limited Liability Companies, the Law on Capital Markets, and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014. In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the provisions contained in the Articles of Association as well as the Directors' Work Guidelines and Regulations. Management of the Company is carried out collegially by the Board of Directors, where decisions are taken through Board of Directors meetings and implemented in accordance with the division of duties and authority that has been determined. Every action taken by members of the Board of Directors outside the decision of the Board of Directors meeting is their personal responsibility until approved by the Board of Directors meeting.



Komposisi Direksi Perseroan per akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama: **Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak**
Direktur: **Rachmat Yaktihadi**

Informasi lebih lanjut mengenai profil Direksi dapat ditemukan pada bagian Profil Perusahaan, sub-bagian Profil Direksi.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesionalisme, Direksi diwajibkan untuk mengikuti semua prinsip GCG, terutama yang terkait dengan independensi. Hal ini termasuk dalam upaya untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjaga agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham harus memastikan bahwa tidak ada transaksi afiliasi atau kepentingan yang bertentangan, serta selalu:

1. Memprioritaskan kepentingan Perseroan dan tidak mengorbankan situasi keuangan Perseroan dalam kasus terjadinya benturan kepentingan.
2. Menghindari terlibat dalam pengambilan keputusan saat ada situasi atau kondisi yang memunculkan benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan secara jelas mengenai hubungan keluarga, keuangan, manajemen, atau kepemilikan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama Perseroan, atau pihak lain yang terlibat dalam bisnis Perseroan.
4. Mengungkapkan informasi terkait pengambilan keputusan yang tetap harus dilakukan ketika terdapat situasi benturan kepentingan.

The composition of the Company's Board of Directors as of the end of 2024 is as follows:

*President Director: **Hj. Indriati, S.E. M.Si, Ak**
Director: **Rachmat Yattihadi***

Further information regarding the Directors' profile can be found in the Company Profile section,

Management Of Conflicts Of Interest Of The Board Of Directors

Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners follows the provisions stated in the Company's Articles of Association, which involve a remuneration structure consisting of salary, incentives and allowances. The remuneration value for each member of the Board of Commissioners and Directors is determined based on the performance evaluation that has been achieved. In 2022, the amount of remuneration received by the Board of Commissioners will reach IDR 490.1 million, while in 2021 the amount will be IDR 490.1 million.

1. *Prioritize the interests of the Company and not sacrifice the Company's financial situation in the case of a conflict of interest.*
2. *Avoid being involved in decision making when there are situations or conditions that give rise to a conflict of interest.*
3. *Make clear disclosures regarding family, financial, management or ownership relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, major shareholders of the Company, or other parties involved in the Company's business.*
4. *Disclose information related to decision making that must still be made when there is a conflict of interest situation.*

Keberagaman Komposisi Direksi

Proses pengambilan keputusan oleh Direksi harus dilakukan dengan objektif, menyeluruh, dan optimal, sejalan dengan visi, misi, strategi, dan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal ini, pentingnya keberagaman dalam komposisi Direksi sangat ditekankan, di mana perhatian khusus diberikan pada keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota Direksi. Dengan cara ini, keberagaman karakteristik di antara anggota Direksi menjadi esensial untuk memastikan proses pencalonan dan penunjukan anggota Direksi, baik secara individu maupun kolektif, dapat dilakukan dengan tepat.

Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Direksi

Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman serta Tata Tertib Kerja Direksi mengatur tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dengan mencapai tujuan dan maksud yang telah ditetapkan.
2. Setiap anggota Direksi diwajibkan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan hati-hati, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Tugas utama Direksi mencakup:
 - a. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan dan maksudnya serta berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Mengelola dan menjaga kekayaan Perseroan;
 - c. Merencanakan kegiatan tahunan yang mencakup anggaran Perseroan dan harus disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum memasuki tahun buku berikutnya.

Diversity In The Composition Of The Board Of Directors

The decision-making process by the Board of Directors must be carried out objectively, comprehensively and optimally, in line with the established vision, mission, strategy and business plan. To achieve this, the importance of diversity in the composition of the Board of Directors is emphasized, where special attention is given to the skills, knowledge and experience relevant to the duties and functions of each member of the Board of Directors. In this way, the diversity of characteristics among members of the Board of Directors is essential to ensure that the process of nominating and appointing members of the Board of Directors, both individually and collectively, can be carried out appropriately.

Duties, Responsibilities And Authorities Of The Board Of Directors

The provisions in the Company's Articles of Association and the Board of Directors' Guidelines and Work Rules regulate the duties, responsibilities and authority of the Board of Directors as follows:

1. *The Board of Directors is responsible for managing the Company for the interests of the Company by achieving the stated goals and objectives.*
2. *Each member of the Board of Directors is required to carry out their duties and responsibilities in good faith, responsibly and carefully, by complying with applicable laws and regulations and the provisions in the Articles of Association.*
3. *The main duties of the Board of Directors include:*
 - a. *Lead, manage and control the Company in accordance with its goals and objectives and strive to increase the efficiency and effectiveness of the Company;*
 - b. *Manage and safeguard the Company's assets;*
 - c. *Plan annual activities that include the Company's budget and must be approved by the Board of Commissioners before entering the next financial year.*



4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara kolektif atas kerugian yang ditimbulkan kepada Perseroan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, anggota Direksi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut jika dapat membuktikan hal-hal berikut:
 - a. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh tindakan mereka atau kelalaian dalam tugas mereka.
 - b. Mereka telah menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan hati-hati, sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
 - c. Mereka tidak memiliki konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut.
 - d. Mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah munculnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 5. Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan terkait dengan pengelolaan dan kepemilikan, dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam industri Pasar Modal di Indonesia.
 6. Tindakan-tindakan yang diperbolehkan bagi Direksi meliputi:
 - a. Melakukan peminjaman atau pemberian pinjaman atas nama Perseroan, kecuali dalam konteks kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. Mendirikan atau terlibat dalam pendirian usaha baru, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung atas suatu kewajiban;
 - d. Melakukan penjualan atau pelepasan hak atas properti yang dimiliki Perseroan,
4. *Each member of the Board of Directors is collectively responsible for losses caused to the Company due to errors or negligence in carrying out their duties. However, members of the Board of Directors will not be responsible for these losses if they can prove the following:*
 - a. *The loss was not caused by their actions or negligence in their duties.*
 - b. *They have carried out their duties in good faith, responsibly and carefully, in accordance with the interests and objectives of the Company.*
 - c. *They have no conflict of interest, either directly or indirectly, related to the actions that caused the loss.*
 - d. *They have taken steps to prevent the occurrence or continuation of such losses.*
 5. *The Board of Directors has the authority to represent the Company inside and outside the court in all matters, bind the Company with other parties, and carry out all actions related to management and ownership, taking into account the limits that have been determined, and in accordance with statutory regulations and the provisions that apply in the Capital Markets industry in Indonesia.*
 6. *Permitted actions for the Board of Directors include*
 - a. *arrying out loans or providing loans on behalf of the Company, except in the context of daily operational activities;*
 - b. *Establishing or being involved in the establishment of new businesses, both at home and abroad;*
 - c. *Binding the Company as guarantor or guarantor for an obligation;*
 - d. *Sell or dispose of rights to property owned by the Company, with a value of less than*



dengan nilai kurang dari 50% dari total aset Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

50% of the Company's total assets, in accordance with established provisions;

- e. Menerima atau memperoleh hak atas properti, baik melalui pembelian, penerimaan hadiah, atau cara lainnya;
- f. Menjamin aset Perseroan dengan nilai yang kurang dari 50% dari total kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- g. Pengambilan keputusan yang membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- e. Receive or acquire rights to property, whether through purchase, acceptance of gifts, or other means;*
- f. Guarantee the Company's assets with a value of less than 50% of the Company's total net assets in one financial year, taking into account the applicable provisions;*
- g. Making decisions that require approval from the Board of Commissioners, taking into account the legal provisions and regulations applicable in the Capital Market sector.*

7. Untuk melaksanakan tindakan hukum sebagai berikut:

7. To carry out the following legal actions:

- a. Mengalihkan atau melepaskan hak yang nilainya lebih dari setengah dari total kekayaan bersih Perseroan atau seluruh harta Perseroan, baik dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi yang terkait dalam satu tahun buku; atau
- b. Menjadikan aset Perseroan sebagai jaminan untuk utang, dengan nilai lebih dari setengah dari total kekayaan bersih Perseroan atau seluruh harta Perseroan, baik dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi yang terkait, Direksi harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan hukum, peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan yang berlaku dalam industri Pasar Modal.

- a. Transfer or release rights whose value is more than half of the Company's total net assets or all of the Company's assets, either in one transaction or a series of related transactions in one financial year; or*
- b. Using the Company's assets as collateral for debt, with a value of more than half of the Company's total net assets or all of the Company's assets, either in one transaction or a series of related transactions, the Board of Directors must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the provisions regulated in Article 23 paragraph 1 letter c in the Articles of Association, taking into account legal regulations, regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), and applicable provisions in the Capital Market industry.*

8. Untuk melaksanakan tindakan hukum yang melibatkan transaksi dengan adanya konflik kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi membutuhkan persetujuan dari RUPS seperti yang diatur dalam Pasal 23 ayat 9 dalam Anggaran Dasar.

8. To carry out legal actions involving transactions where there is a conflict of interest between the personal economic interests of members of the Board of Directors, Board of Commissioners or shareholders and the economic interests of the Company, the Board of Directors requires approval from the GMS as regulated in Article 23 paragraph 9 of the Articles of Association.



9. a. Seorang anggota Direksi tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan jika:

- i. Terdapat perselisihan hukum di pengadilan antara Perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan;
- ii. Anggota Direksi tersebut memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
- iii. Anggota Direksi yang bersangkutan dipecat sementara sesuai dengan Pasal 15 ayat 6 dalam Anggaran Dasar, dimulai sejak keputusan sementara penghapusan oleh Dewan Komisaris hingga:
 01. Ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memperkuat atau membatalkan penghapusan sementara tersebut; atau
 02. Berakhirnya periode waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat 8 dalam Anggaran Dasar.

b. Dalam situasi yang disebutkan di atas dalam poin a, orang yang berhak untuk mewakili Perseroan (tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar) adalah:

- i. Anggota Direksi lain yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan;
- ii. Dewan Komisaris jika seluruh anggota Direksi memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan; atau
- iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS jika seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan.

c. Ketentuan dalam poin 8.a dan 8.b tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 23 ayat 9 dalam Anggaran Dasar.

9. a. A member of the Board of Directors does not have the authority to represent the Company if:

- i. There is a legal dispute in court between the Company and the member of the Board of Directors concerned;
- ii. The member of the Board of Directors has interests that conflict with the interests of the Company;
- iii. The relevant member of the Board of Directors is temporarily dismissed in accordance with Article 15 paragraph 6 in the Articles of Association, starting from the temporary decision to remove him by the Board of Commissioners until:
 01. There is a decision from the General Meeting of Shareholders (GMS) which strengthens or cancels the temporary deletion; or
 02. The end of the time period as stated in Article 15 paragraph 8 in the Articles of Association.

b. In the situation mentioned above in point a, the person entitled to represent the Company (without prejudice to the provisions in the Articles of Association) is:

- i. Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
- ii. Board of Commissioners if all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or
- iii. Other parties appointed by the GMS if all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.

c. The provisions in points 8.a and 8.b do not override the provisions of Article 23 paragraph 9 in the Articles of Association.



10. a. Pimpinan Eksekutif, memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Perseroan;

b. Jika Pimpinan Eksekutif tidak dapat hadir atau berhalangan karena alasan apa pun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Perseroan.

11. Tanpa mengurangi tanggung jawab mereka, Direksi memiliki hak untuk menunjuk satu atau lebih individu sebagai perwakilan atau kuasanya dengan memberikan mereka kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam surat kuasa, dan kekuasaan semacam itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

12. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dianggap tidak sah.

13. Pembagian tugas dan wewenang untuk setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dan RUPS dapat memberikan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris. Jika RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh keputusan Direksi.

14. Direksi wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil oleh RUPS dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan.

10. a. *Executive Chairman, has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company;*

b. If the Executive Chairman is unable to attend or is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, then the other members of the Board of Directors have the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company.

11. *Without reducing their responsibilities, the Board of Directors has the right to appoint one or more individuals as their representatives or proxies by giving them the power to carry out certain actions as regulated in the power of attorney, and such powers must be exercised in accordance with the Articles of Association.*

12. *Any action taken by a member of the Board of Directors that is contrary to the Articles of Association is considered invalid.*

13. *The division of duties and authority for each member of the Board of Directors is determined by the GMS, and the GMS can grant this authority to the Board of Commissioners. If the GMS does not determine, then the division of duties and authority of members of the Board of Directors is determined by the decision of the Board of Directors.*

14. *The Board of Directors is obliged to act in accordance with the decisions taken by the GMS in administering and/or managing the Company.*



Rapat Direksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2014 dan Panduan serta Peraturan Tata Tertib Kerja Direksi menetapkan kewajiban bagi Direksi untuk mengadakan Rapat setidaknya satu kali dalam satu bulan. Pengaturan Rapat Dewan Direksi dapat dilakukan kapan saja apabila:

1. Diperlukan oleh satu atau beberapa anggota Direksi; atau
2. Diminta secara tertulis oleh satu atau lebih anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan agenda yang akan dibahas.

Direksi dapat membuat keputusan di luar Rapat Direksi, asalkan semua anggota Direksi telah diberi pemberitahuan tertulis mengenai proposal yang diajukan. Seluruh anggota Direksi juga

harus memberikan persetujuan secara tertulis terhadap proposal tersebut dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil secara demikian memiliki kekuatan yang setara dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang sah. Keputusan dalam Rapat Direksi diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tidak tercapai melalui musyawarah, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan persetujuan lebih dari setengah dari jumlah suara yang sah dalam rapat tersebut.

Pada tahun 2024, Direksi Perseroan mengadakan rapat sebanyak 12 kali dengan anggota Direksi hadir rata-rata sebanyak 100 persen. Detail kehadiran Direksi dalam rapat dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Rachmat Yaktihadi	Direktur Director	12	12	100%

Keputusan Direksi yang merupakan hasil dari Rapat Direksi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Meeting Of The Board Of Directors

Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33 of 2014 and the Directors' Work Guidelines and Regulations stipulate the obligation for the Board of Directors to hold a meeting at least once a month. Arrangements for Board of Directors Meetings can be made at any time if:

1. Required by one or several members of the Board of Directors; or
2. Requested in writing by one or more members of the Board of Commissioners, stating the agenda to be discussed.

The Board of Directors may make decisions outside the Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been given written notification regarding the proposed

proposal. All members of the Board of Directors must also provide written approval for the proposal and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken at a valid Board of Directors Meeting. Decisions at Board of Directors Meetings are taken through deliberation to reach agreement. If an agreement is not reached through deliberation, then the decision is taken by voting, with the approval of more than half of the number of valid votes at the meeting.

In 2024, the Company's Board of Directors held 12 meetings with an average of 100 percent of the Board of Directors attending. Details of the Board of Directors' attendance at the meeting can be seen in the following table:

The Board of Directors' decisions which are the result of the Board of Directors Meeting can be seen in the following table:



No	Tanggal Date	Nomor Keputusan No. of Decree	Ringkasan Keputusan Decision Summary
1	22 Maret 2024	02/DIR-TPG/III/2024	<p>Evaluasi kinerja Perseroan pada Kuartal 1, serta faktor kendala baik secara internal maupun eksternal terhadap penjualan produk</p> <p><i>Evaluation of the Company's performance in Quarter 1, as well as internal and external constraints on product sales.</i></p>
2	2 Agustus 2024	10/DIR-TPG/VIII/2024	<p>Persiapan sarana dan prasarana penunjang lanjutan sebagai penopang penjualan, khususnya perumahan komersial</p> <p><i>Preparation of supporting facilities and infrastructure to support sales, especially commercial housing</i></p>
3	4 Oktober 2024	15/DIR-TPG/X/2024	<p>Strategi penjualan dengan memanfaatkan kebijakan dari Pemerintah dan cara memperoleh kuota penjualan perumahan subsidi</p> <p><i>Sales strategy by utilizing government policies and strategies to obtain subsidized housing sales quotas</i></p>

Pelatihan Dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Direksi menjalani evaluasi diri sendiri dan juga penilaian dari rekan-rekan sesama anggota Direksi terhadap kinerja mereka selama tahun 2024. Evaluasi ini mempertimbangkan pencapaian indikator kinerja kunci, kehadiran dalam rapat, serta upaya dalam pengembangan keterampilan. Hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang memuaskan, di mana semua anggota telah melakukan tugas mereka dengan baik sesuai dengan tanggung jawab individu masing-masing.

Training And Competence Improvement Of The Board Of Commissioners

Each member of the Board of Directors undergoes a self-evaluation as well as an assessment from fellow members of the Board of Directors regarding their performance during 2024. This evaluation takes into account the achievement of key performance indicators, attendance at meetings, as well as efforts to develop skills. The evaluation results show satisfactory performance, where all members have carried out their duties well in accordance with their individual responsibilities.



Penilaian Terhadap Kinerja Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi menjalani evaluasi diri sendiri dan juga penilaian dari rekan-rekan sesama anggota Direksi terhadap kinerja mereka selama tahun 2024. Evaluasi ini mempertimbangkan pencapaian indikator kinerja kunci, kehadiran dalam rapat, serta upaya dalam pengembangan keterampilan. Hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang memuaskan, di mana semua anggota telah melakukan tugas mereka dengan baik sesuai dengan tanggung jawab individu masing-masing.

Penilaian Terhadap Unit Pendukung Direksi

Direksi tidak membentuk komite dalam pelaksanaan GCG, tetapi mendapat dukungan dari Sekretaris Perseroan dan Unit Audit Internal. Pada tahun 2024, kinerja Sekretaris Perusahaan dinilai memuaskan, dengan menjalankan tugasnya dengan baik. Semua aspek GCG yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mulai dari mengorganisir RUPS hingga menjalin komunikasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, investor, media, dan para pemangku kepentingan lainnya, berjalan lancar.

Direksi juga menilai bahwa Unit Audit Internal telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Salah satu tugas pentingnya adalah membantu memastikan kualitas pelaporan keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat dinyatakan Wajar tanpa Pengecualian. Selain itu, Unit Audit Internal juga telah melaksanakan proses pengendalian internal secara komprehensif di Perseroan.

Assessment Of The Performance Of Members Of The Board Of Directors

Each member of the Board of Directors undergoes a self-evaluation as well as an assessment from fellow members of the Board of Directors regarding their performance during 2024. This evaluation takes into account the achievement of key performance indicators, attendance at meetings, as well as efforts to develop skills. The evaluation results show satisfactory performance, where all members have carried out their duties well in accordance with their individual responsibilities.

Assessment Of Directors' Support Units

The Board of Directors does not form a committee to implement GCG, but receives support from the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit. In 2024, the Corporate Secretary's performance is considered satisfactory, by carrying out his duties well. All aspects of GCG which are the responsibility of the Corporate Secretary, starting from organizing the GMS to establishing intensive communication with the Financial Services Authority, Indonesian Stock Exchange, investors, media and other stakeholders, run smoothly.

The Board of Directors also assesses that the Internal Audit Unit has carried out its duties and responsibilities well. One of the important tasks is to help ensure the quality of financial reporting so that Financial Reports can be declared Fair without Exceptions. Apart from that, the Internal Audit Unit has also implemented a comprehensive internal control process in the Company.



KOMITE AUDIT

Audit Committee

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan dalam POJK 55/POJK.04/2015 untuk mendukung tugas Dewan Komisaris. Komite Audit, bersama dengan Piagam Komite Audit yang menyertainya, bertugas mengawasi aspek-aspek terkait informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor internal dan eksternal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan pada tanggal 16 Juli 2020, dengan masa jabatan hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru. Hingga tanggal 31 Desember 2023, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Nadia Hasna Humaira : Ketua Komite
Hary Alamsyah : Anggota
Aditya Surya Tjahjana Putra : Anggota

Profil Komite Audit **Nadia Hasna Humaira** **Ketua**

Informasi mengenai profil Ketua Komite Audit dapat diakses melalui bagian Profil Perusahaan, bagian yang menampilkan informasi tentang Dewan Komisaris.

Harry Alamsyah **Anggota**

Usia: 53 tahun
Warga Negara dan Domisili: Warga Negara Indonesia, berdomisili di Kabupaten Tangerang

Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan tanggal 16 Juli 2020

Pendidikan: Sarjana di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP, Bandung, pada tahun 1998.

Rangkap Jabatan: Direktur pada PT Strategis Prima Konsultanindo sejak tahun 2019.

The Company has formed an Audit Committee in accordance with the provisions in POJK 55/POJK.04/2015 to support the duties of the Board of Commissioners. The Audit Committee, together with the accompanying Audit Committee Charter, is tasked with supervising aspects related to financial information, internal control systems, effectiveness of audits by internal and external auditors, risk management, and compliance with applicable laws and regulations. The formation of the Company's Audit Committee and the Audit Committee Charter are based on the Decree of the Board of Commissioners outside the Meeting regarding the Appointment of the Company's Audit Committee on July 16 2020, with a term of office until the issuance of a new Decree of the Board of Commissioners. As of December 31, 2023, the composition of the Company's Audit Committee members is as follows:

*Nadia Hasna Humaira : Chairman of the Committee
Hary Alamsyah : Member
Aditya Surya Tjahjana Putra : Member*

Audit Committee Profile **Nadia Hasna Humaira** **Ketua**

Information regarding the profile of the Chair of the Audit Committee can be accessed through the Company Profile section, a section that displays information about the Board of Commissioners.

Harry Alamsyah **Anggota**

*Age: 53 years old
Citizenship and Domicile: Indonesian citizen, domiciled in Tangerang Regency*

Basis for Appointment: Decree of the Board of Commissioners Outside the Meeting regarding the Appointment of the Company's Audit Committee dated 16 July 2020

Education: Bachelor's degree in Management from YPKP College of Economics, Bandung, in 1998.

Concurrent Position: Director at PT Strategis Prima Konsultantindo since 2019.



Pengalaman Kerja:

- Komisararis pada PT Sarana Prima Konsultanindo antara tahun 2016-2019,
- Manager di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan antara tahun 2014-2016,
- Supervisor di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan antara tahun 2011-2014,
- Ketua tim di Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan antara tahun 2009-2011,
- Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan antara tahun 2008-2009,
- Staf Auditor di Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan antara tahun 2004-2008,
- Staf Konsultan di PT Primus Sarana Artha Consult antara tahun 2000-2004.

Aditya Surya Tjahjana Putra
Anggota

Usia: 34 tahun,

Warga Negara dan Domisili: Warga Negara Indonesia, berdomisili di Depok

Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan tanggal 16 Juli 2020.

Pendidikan: Bachelor of Science di bidang Mathematics and Finance, serta Master of Accounting, dari Curtin University of Technology, Perth, Australia.

Rangkap Jabatan: Tidak ada

Pengalaman Kerja:

- Direktur Independen dan Corporate Secretary di PT Arkha Jayanti Persada Tbk pada tahun 2018,
- Supervisor di PT Bursa Efek Indonesia antara tahun 2015-2018, Senior Consultant di Colliers International Indonesia antara tahun 2014-2015,
- Senior Associate di Kantor Akuntan Publik RSM Amir Abadi Jusuf (AAJ) antara tahun 2013-2014.

Work experience:

- *Commissioner at PT Sarana Prima Kontakindo between 2016-2019,*
- *Manager at the Suganda Public Accounting Firm Akna Suhri and Partners between 2014-2016,*
- *Supervisor at Suganda Public Accounting Firm Akna Suhri and Partners between 2011-2014,*
- *Team leader at Public Accounting Firm Rama Wendra and Partners between 2009-2011,*
- *Senior Auditor at Public Accounting Firm Rama Wendra and Partners between 2008-2009,*
- *Staff Auditor at Public Accounting Firm Rama Wendra and Partners between 2004-2008,*
- *Consultant Staff at PT Primus Sarana Artha Consult between 2000-2004.*

Aditya Surya Tjahjana Putra
Member

Age: 34 years old,

Citizenship and Domicile: Citizen Indonesia, domiciled in Depok

Basis for Appointment: Decree of the Board of Commissioners Outside the Meeting regarding the Appointment of the Company's Audit Committee July 16, 2020.

Education: Bachelor of Science in Mathematics and Finance, and Master of Accounting, from Curtin University of Technology, Perth, Australia.

Concurrent Positions: None

Work experience:

- *Independent Director and Corporate Secretary at PT Arkha Jayanti Persada Tbk in 2018,*
- *Supervisor at PT Bursa Efek Indonesia between 2015-2018, Senior Consultant at Colliers International Indonesia between 2014-2015,*
- *Senior Associate at RSM Amir Abadi Jusuf (AAJ) Public Accounting Firm between 2013-2014.*

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Komite Audit mengacu pada Panduan Komite Audit dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Peran utama Komite Audit adalah memberikan pendapat independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan laporan atau informasi yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Hal ini juga termasuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan oleh Dewan Komisaris, seperti:

1. Meninjau informasi keuangan yang akan diungkapkan oleh Perseroan kepada publik, termasuk laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan keuangan Perseroan.
2. Memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatannya.
3. Memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan yang memberikan layanan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan akuntan, termasuk pertimbangan independensi, lingkup pekerjaan, dan imbalan.
5. Meninjau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut Direksi terhadap temuan tersebut.
6. Meninjau aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang terpisah.
7. Mengkaji keluhan terkait proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Mengkaji dan memberikan saran terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Memberikan laporan hasil peninjauan kepada Dewan Komisaris.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Hak akses terhadap dokumen, data, dan informasi Perseroan yang relevan untuk mengumpulkan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya lain yang diperlukan.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Audit Committee

The Audit Committee refers to the Audit Committee Guidelines in carrying out its duties, responsibilities and authority. The main role of the Audit Committee is to provide independent opinions to the Board of Commissioners regarding reports or information submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners. This also includes identifying issues that need attention from the Board of Commissioners, such as:

1. Review financial information that will be disclosed by the Company to the public, including financial reports, projections and other reports related to the Company's finances.
2. Check the Company's compliance with laws and regulations related to its activities.
3. Provide an independent opinion if there is a difference of opinion between management and the accountant providing services.
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of accountants, including considerations of independence, scope of work and compensation.
5. Reviewing the results of examinations carried out by internal auditors and supervising the Board of Directors' follow-up to these findings.
6. Review risk management activities carried out by the Board of Directors if the Company does not have a separate risk monitoring function.
7. Review complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
8. Review and provide advice regarding potential conflicts of interest of the Company.
9. Provide a report on the results of the review to the Board of Commissioners.
10. Maintain the confidentiality of Company documents, data and information.

Based on its duties and responsibilities, the Audit Committee has the following authority:

1. The right of access to relevant Company documents, data and information to collect information about employees, funds, assets and other necessary resources.
2. Communicate directly with employees,



2. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, termasuk anggota Direksi dan pihak yang bertanggung jawab atas fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu dalam pelaksanaan tugasnya atas biaya Perseroan.
4. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengatur pertemuan secara berkala minimal sekali setiap 3 bulan. Pertemuan tersebut dapat dilaksanakan jika lebih dari setengah dari total anggota hadir. Keputusan yang diambil dalam pertemuan Komite Audit berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada tahun 2024, Komite Audit mengadakan 4 (empat) pertemuan dengan kehadiran anggota mencapai 100 persen. Informasi lebih lanjut mengenai kehadiran anggota dalam pertemuan dapat ditemukan dalam tabel berikut.

including members of the Board of Directors and parties responsible for internal audit, risk management and accounting functions related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.

3. *If necessary, the Audit Committee can involve independent parties outside the Audit Committee members to assist in carrying out its duties at the Company's expense.*
4. *Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.*

Audit Committee Meeting

The Audit Committee organizes regular meetings at least once every 3 months. The meeting can be held if more than half of the total members attend. Decisions taken at Audit Committee meetings are based on mutual agreement.

In 2024, the Audit Committee will hold 4 (four) meetings with member attendance reaching 100 percent. Further information regarding member attendance at meetings can be found in the following table.

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Dece Kurniadi Januari-Mei 2024	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Committee</i>	1	1	100%
Nadia Hasna Humaira Juni-sekarang	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Committee</i>	3	3	100%
Hary Alamsyah	Anggota Member	4	4	100%
Aditya Surya Tjahjana Putra	Anggota Member	4	4	100%

LAPORAN RINGKAS KEGIATAN KOMITE AUDIT

Audit committee activities summary report

Hal-hal berikut ini merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit pada tahun 2024 yaitu:

1. Peninjauan laporan keuangan dan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.
2. Memberikan pandangan atau saran terkait ruang lingkup dan honorarium atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk periode buku 2023.
3. Menilai pelaksanaan layanan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Ini termasuk evaluasi waktu lapangan, cakupan layanan, uji petik, dan rekomendasi perbaikan.
4. Mengawasi kepatuhan terhadap Kode Etik dan merencanakan perubahan Kode Etik jika diperlukan agar sesuai dengan perkembangan saat ini.
5. Memantau pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk memastikan ketaatan oleh semua pemangku kepentingan Perseroan serta untuk mengendalikan masalah yang timbul.
6. Membahas dan mengawasi rencana pengembangan usaha Perseroan, termasuk pengawasan akuisisi lahan secara hukum dan finansial.

The following matters are the implementation of the duties and responsibilities of the Audit Committee in 2024, namely:

1. *Review of financial reports and financial information to be published.*
2. *Provide views or suggestions regarding the scope and honorarium for the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms for the 2023 financial period.*
3. *Assess the implementation of audit services by Public Accountants and Public Accounting Firms in accordance with the Public Accountant Professional Standards and Audit Standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants. This includes evaluation of field time, service coverage, test-taking, and improvement recommendations.*
4. *Oversee compliance with the Code of Ethics and plan changes to the Code of Ethics if necessary to comply with current developments.*
5. *Monitor the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) to ensure compliance by all Company stakeholders and to control problems that arise.*
6. *Discuss and supervise the Company's business development plans, including legal and financial supervision of land acquisition*

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nomination And Remuneration Committee

Dewan Komisaris Perseroan menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK 34/POJK.04/2014. Sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan masukan mengenai pencalonan untuk beberapa posisi kunci, meninjau struktur remunerasi yang dapat meningkatkan kinerja Direksi, dan meninjau usulan perubahan dalam struktur organisasi. Tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi mencakup:

The Company's Board of Commissioners carries out the functions of the Nomination and Remuneration Committee in accordance with the provisions of POJK 34/POJK.04/2014. As part of the duties of the Board of Commissioners, the function of the Nomination and Remuneration Committee is to provide input regarding nominations for several key positions, review remuneration structures that can improve the performance of the Board of Directors, and review proposed changes in the organizational structure. The responsibilities of the Board of Commissioners regarding the implementation of the Nomination and Remuneration function include:



1. Mengenai fungsi Nominasi, Dewan Komisaris bertugas:

- a. Menetapkan kebijakan terkait dengan:
 - i. Struktur jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kriteria dan kebijakan yang diperlukan dalam proses penominasian; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Melakukan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk proses evaluasi;
- c. Menyusun kebijakan terkait program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Memilih calon yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang akan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Mengenai fungsi Nominasi, Dewan Komisaris bertugas:

- a. Menyusun Kebijakan terkait:
 - i. Struktur pembayaran Remunerasi;
 - ii. Kriteria untuk pemberian Remunerasi; dan
 - iii. iumlah yang akan dibayarkan sebagai Remunerasi.
- b. Mengevaluasi kinerja dan konsistensi Remunerasi yang diterima oleh setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

1. Regarding the Nomination function, the Board of Commissioners is tasked with:

- a. Establish policies related to:
 - i. Position structure of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - ii. Criteria and policies required in the nomination process; And
 - iii. Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
- b. Evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on the criteria that have been determined for the evaluation process;
- c. Develop policies related to capacity development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
- d. Select candidates who meet the requirements to become members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, who will

2. Regarding the Nomination function, the Board of Commissioners is tasked with:

- a. Establish policies related to:
 - i. Remuneration payment structure;
 - ii. Criteria for granting Remuneration; And
 - iii. Amount to be paid as Remuneration.
- b. Evaluate the performance and consistency of Remuneration received by each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

LAPORAN RINGKAS KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nomination And Remuneration Committee Activities Summary Report

Pada tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan terhadap struktur remunerasi untuk tahun 2024.
2. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Mengusulkan skema remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan peraturan terbaru, kinerja, tanggung jawab, serta hak-hak Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2025.

In 2024, the Nomination and Remuneration Committee provides the following recommendations:

- 1. Conduct a review of the remuneration structure for 2024.*
- 2. Assessing the performance of the Board of Commissioners and Directors.*
- 3. Propose a remuneration scheme for the Board of Commissioners and Directors taking into account the latest regulations, performance, responsibilities and rights of the Board of Commissioners and Directors for 2025.*

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Peran Sekretaris Perusahaan adalah untuk menghubungkan kepentingan Perseroan dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam memelihara reputasi Perusahaan di mata publik. Tugas utama Sekretaris Perusahaan meliputi memfasilitasi komunikasi internal di dalam Perusahaan, menjalin hubungan dengan pemegang saham, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di bidang pasar modal. Kehadiran Sekretaris Perusahaan diatur oleh POJK No. 35/2014, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SK/HRGA/IV/2021 tanggal 01/4/2021, Perseroan telah menunjuk Rachmat Yaktihadi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengatur pertemuan secara berkala minimal sekali setiap 3 bulan. Pertemuan tersebut dapat dilaksanakan jika lebih dari setengah dari total anggota hadir. Keputusan yang diambil dalam pertemuan Komite Audit berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada tahun 2024, Komite Audit mengadakan 4 (empat) pertemuan dengan kehadiran anggota mencapai 100 persen. Informasi lebih lanjut mengenai kehadiran anggota dalam pertemuan dapat ditemukan dalam tabel berikut.

The role of the Corporate Secretary is to link the interests of the Company with related parties, especially in maintaining the Company's reputation in the eyes of the public. The main duties of the Corporate Secretary include facilitating internal communications within the Company, establishing relationships with shareholders, regulators and other related parties, as well as ensuring that the Company complies with all applicable regulations and laws in the capital markets sector. The presence of the Corporate Secretary is regulated by POJK No. 35/2014, and based on Directors' Decree No. 01/SK/HRGA/IV/2021 dated 01/4/2021, the Company has appointed Rachmat Yaktihadi as Corporate Secretary.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee organizes regular meetings at least once every 3 months. The meeting can be held if more than half of the total members attend. Decisions taken at Audit Committee meetings are based on mutual agreement.

In 2024, the Audit Committee will hold 4 (four) meetings with member attendance reaching 100 percent. Further information regarding member attendance at meetings can be found in the following table.



PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary Profile

Rachmat Yaktihadi
Sekretaris Perusahaan

Profil Sekretaris dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan, sub-bagian Profil Direksi.

Tugas Dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK No.35/POJK.04/2014, minimal mencakup hal-hal berikut:

1. Memantau perkembangan di Pasar Modal, terutama dalam hal peraturan-perundang-undangan yang relevan.
2. Memberikan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan di Pasar Modal.
3. Mendukung Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tata kelola perusahaan, termasuk:
 - a. Memastikan keterbukaan informasi kepada publik, termasuk keberadaan informasi di situs web Perseroan.
 - b. Menyampaikan laporan kepada OJK sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - c. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - d. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - e. Mendukung pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait Perseroan.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan, pemegang saham, OJK, dan pihak-pihak lain.
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan hukum atau ketentuan lain yang berlaku.
6. Menyusun laporan secara berkala setidaknya satu kali dalam setahun mengenai pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan kepada Direksi Perseroan dan disampaikan juga kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Rachmat Yaktihadi
Corporate Secretary

The profile of the Corporate Secretary can be seen in the Company Profile section, subsection of the Board Directors.

Duties And Responsibilities Of Corporate Secretary

The duties of the Corporate Secretary in accordance with the provisions stated in POJK No.35/POJK.04/2014, at a minimum include the following matters:

1. *Monitor developments in the Capital Market, especially in terms of relevant laws and regulations.*
2. *Provide advice to the Company's Directors and Board of Commissioners to ensure compliance with Capital Market regulations.*
3. *Support the Company's Directors and Board of Commissioners in carrying out corporate governance, including:*
 - *a. Ensure disclosure of information to the public, including the existence of information on the Company's website.*
 - *b. Submit reports to OJK according to the predetermined schedule.*
 - *c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders (GMS).*
 - *Organize and document meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
 - *Support the implementation of orientation programs for Directors and/or Board of Commissioners related to the Company.*
4. *As a liaison between the Company, shareholders, OJK, and other parties.*
5. *Maintain the confidentiality of confidential documents, data and information, except in order to fulfill obligations in accordance with law or other applicable provisions.*
6. *Prepare regular reports at least once a year regarding the implementation of the Corporate Secretary's duties to the Company's Directors and submit them also to the Company's Board of Commissioners*

Setiap pihak yang memerlukan kontak dengan Perseroan dalam konteksnya sebagai perusahaan publik, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan di alamat yang tertera di bawah ini:

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.

Alamat: Jl. H. Junaedi No.1 RT 12 RW 03,
Cipete Selatan, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410
Telepon: +62-251-8574836
E-mail: corscec.tpg@gmail.com

Pelatihan Dan Program Pengembangan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan harus senantiasa mempertahankan keahliannya dan terus memperbaharui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan terkini. Oleh karena itu, Sang Sekretaris Perusahaan diwajibkan mengikuti program-program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan bidangnya. Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan mengambil bagian dalam berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, atau seminar.

Laporan Ringkas Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengadakan 1 (satu) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 12 kali pertemuan Rapat Direksi, 12 kali Rapat Dewan Komisaris, dan 3 kali Rapat Gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan menyampaikan 1 (satu) Laporan Tahunan, 1 (satu) Laporan Keuangan yang telah diaudit, dan 3 (tiga) Laporan Keuangan yang belum diaudit.
3. Berhubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai sejumlah masalah.
4. Menyampaikan 78 kali informasi publik.
5. Melakukan komunikasi dengan investor dan perwakilan mereka.
6. Berinteraksi dengan karyawan, media, serta pemangku kepentingan lainnya.

Any party who requires contact with the Company in its context as a public company, can contact the Corporate Secretary at the address listed below:

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.

*Address: Jl. H. Junaedi No.1 RT 12 RW 03,
South Cipete, District. Cilandak,
South Jakarta, DKI Jakarta 12410
Telephone: +62-251-8574836
Email: corscec.tpg@gmail.com*

Duties And Responsibilities Of Corporate Secretary

The Corporate Secretary must always maintain his skills and continue to update his knowledge in accordance with the latest developments. Therefore, the Corporate Secretary is required to take part in skills development programs appropriate to his field. In 2024, the Corporate Secretary will take part in various training programs, workshops, conferences or seminars.

Brief Report Of Corporate Secretary Activities

During 2024, the Corporate Secretary will carry out his duties and obligations with the following details:

1. *Held 1 (one) General Meeting of Shareholders (GMS), 12 Board of Directors Meetings, 12 Board of Commissioners Meetings, and 3 Joint Meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
2. *Prepare and submit 1 (one) Annual Report, 1 (one) audited Financial Report, and 3 (three) unaudited Financial Reports.*
3. *Liaise with the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Stock Exchange (BEI) regarding a number of issues.*
4. *Conveying 78 times public information.*
5. *Communicate with investors and their representatives.*
6. *Interact with employees, media and other stakeholders.*



PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profile Of Head Of Internal Audit Unit

Supriatna, SE
Kepala Unit Audit Internal

Usia: 46 tahun,

Warga Negara dan Domisili: Warga
Negara Indonesia, berdomisili di Bogor

Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Direksi No.
95/SKD/HRD/TPG/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020
tentang Pengangkatan Auditor Internal

Pendidikan: Sarjana di bidang Akuntansi dari
Universitas Pakuan, Bogor, pada tahun 2003.

Rangkap Jabatan: Tidak ada

Pengalaman Kerja:

- Head Accounting di PT Trimitra Prawara Goldland antara tahun 2018-2020,
- Supervisor Accounting di PT Primer Globalindo antara tahun 2016-2018,
- Supervisor Finance & Accounting di PT Asia Protein antara tahun 2013-2016,
- Supervisor Finance & Accounting di PT. Sierad Produce, Tbk (Head Office) antara tahun 2008-2013,
- Supervisor Internal Audit di PT Sierad Produce, Tbk (Divisi Breeding atau Pembibitan) antara tahun 2003-2008.

Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Piagam Internal Audit Perseroan menjadi landasan dan titik awal untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam POJK No. 56/POJK.04/2015. Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memberikan dukungan kepada Direksi, Komisaris, dan Komite Audit. Pengembangan dari tanggung jawab utama tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana Audit Internal Tahunan.
2. Pengujian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan.

Supriatna, SE
Head of Internal Audit Unit

Age: 46 years old,

Citizenship and Domicile: Citizen
Indonesia, domiciled in Bogor

Basis for Appointment: Directors Decree No.
95/SKD/HRD/TPG/VII/2020 dated 16 July 2020
concerning the Appointment of Internal Auditors

Education: Bachelor's degree in Accounting from
Pakuan University, Bogor, in 2003.

Concurrent Positions: None

Work experience:

- Head Accounting at PT Trimitra Prawara Goldland between 2018-2020,
- Accounting Supervisor at PT Primer Globalindo between 2016-2018,
- Finance & Accounting Supervisor at PT Asia Protein between 2013-2016,
- Finance & Accounting Supervisor at PT. Sierad Produce, Tbk (Head Office) between 2008-2013,
- Internal Audit Supervisor at PT Sierad Produce, Tbk (Breeding Division) between 2003-2008.

Duties And Responsibilities Of The Internal Audit Unit

The Company's Internal Audit Charter is the foundation and starting point for ensuring that the Company complies with the provisions contained in POJK No. 56/POJK.04/2015. The Internal Audit Unit is directly responsible to the President Director and provides support to the Directors, Commissioners and Audit Committee. The development of these main responsibilities includes the following:

1. Preparation and implementation of the Annual Internal Audit plan.
2. Testing and evaluation of the implementation of internal control and risk management according to Company policy.



3. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang seperti keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan bidang lainnya.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada semua tingkat manajemen.
5. Penyusunan laporan hasil audit dan penyampaian kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah diajukan.
7. Berkolaborasi dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus bila diperlukan.
10. Melakukan kegiatan konsultasi atas permintaan Direksi dan/atau Manajemen Perseroan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan dengan menjalankan prinsip Good Corporate Governance.
11. Memastikan bahwa anggota Unit Audit Internal selalu memiliki kompetensi yang diperlukan melalui pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, dan sumber daya lain yang relevan.

Pelatihan Dan Program Pengembangan Unit Audit Internal

Unit Audit Internal harus memelihara keahlian mereka dan tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru. Oleh karena itu, Unit Audit Internal diharuskan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan bidang spesifik mereka.

Pada bulan Oktober 2024, Komite Audit telah menyelesaikan Pelatihan CACP (Certification in Audit Committee Practices) yang diadakan oleh IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia).

3. Examination and assessment of efficiency and effectiveness in various fields such as finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other fields.
4. Provide recommendations for improvements and objective information about inspected activities to all levels of management.
5. Preparation of audit results reports and submission to the President Director and Board of Commissioners.
6. Monitor, analyze and report follow-up on recommendations for improvements that have been submitted.
7. Collaborate with the Audit Committee.
8. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities carried out.
9. Carry out special checks if necessary.
10. Carry out consultation activities at the request of the Board of Directors and/or Company Management to support the achievement of the Company's goals by implementing the principles of Good Corporate Governance.
11. Ensure that members of the Internal Audit Unit always have the required competencies through knowledge, skills, experience, training and other relevant resources.

Internal Audit Unit Training And Development Program

The Internal Audit Unit must maintain their expertise and stay up-to-date with the latest developments. Therefore, the Internal Audit Unit is required to take part in a competency development program that is appropriate to their specific field.

In October 2024, the Audit Committee has completed the CACP (Certification in Audit Committee Practices) training organized by IKAI (Indonesian Institute of Audit Committee).



Laporan Ringkas Kegiatan Unit Audit Internal

Selama tahun 2024, Unit Audit Internal menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. Menilai laporan keuangan dan manajemen.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal.
3. Berkolaborasi dengan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan oleh manajemen dan dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh manajemen serta staf di semua tingkat organisasi. Oleh karena itu, keberadaan SPI yang efektif sangatlah penting untuk mengelola perusahaan dengan baik dan aman. Implementasi SPI di Perseroan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pelaksanaan SPI di Perseroan mencakup aspek-aspek berikut:

1. Menciptakan lingkungan pengendalian internal yang terstruktur dan berdisiplin.
2. Melakukan identifikasi, analisis, penilaian, dan manajemen risiko bisnis.
3. Menjalankan aktivitas pengendalian atas kegiatan Perseroan di semua tingkat dan unit dalam organisasi.
4. Mengelola sistem informasi dan komunikasi.
5. Menetapkan prosedur untuk mengevaluasi kualitas sistem pengendalian internal.
6. Membuat mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan salinan kepada Komite Audit jika terjadi pelanggaran dalam kualitas sistem pengendalian internal.

Direksi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif, serta telah melakukan langkah-langkah untuk

Internal Audit Unit Training And Development Program

During 2024, the Internal Audit Unit will carry out the following functions:

- 1. Assess financial and management reports.*
- 2. Evaluate the internal control system.*
- 3. Collaborate with public accountants to audit annual financial reports.*

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System (SPI) is a monitoring mechanism that has been established by management and is carried out continuously by all management and staff at all levels of the organization. Therefore, the existence of an effective SPI is very important to manage the company well and safely. Implementation of SPI in the Company is the responsibility of all parties involved, in accordance with their respective duties and responsibilities.

The implementation of SPI in the Company includes the following aspects:

- 1. Creating a structured and disciplined internal control environment.*
- 2. Carry out identification, analysis, assessment and management of business risks.*
- 3. Carrying out control activities over the Company's activities at all levels and units in the organization.*
- 4. Manage information and communication systems.*
- 5. Establish procedures for evaluating the quality of the internal control system.*
- 6. Create a reporting mechanism to the Board of Directors with a copy to the Audit Committee if violations occur in the quality of the internal control system.*

The Board of Directors is responsible for implementing a reliable and effective Internal



memperkuat budaya kesadaran risiko yang efektif di setiap tingkat organisasi.

Sementara itu, Direktur yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan aktif dalam mengawasi agar tidak ada penyimpangan dalam kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh manajemen. Hasil evaluasi secara rutin dilaporkan kepada Direksi dan unit terkait untuk ditindaklanjuti dan dipantau pelaksanaannya. Setiap masalah yang timbul diperbaiki secara sistematis dan dipantau secara terus-menerus untuk memastikan bahwa SPI berjalan dengan efektif. Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, turut aktif dalam mengevaluasi SPI dengan meninjau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Audit Internal.

Direksi menyatakan bahwa SPI Perseroan pada tahun 2024 telah cukup efektif dalam mencegah penyimpangan dan mengurangi risiko Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SPI di masa mendatang.

Sistem Manajemen Risiko

Guna menghadapi tantangan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global, serta untuk mengurangi dampak dari berbagai risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan operasi bisnisnya, Perseroan telah merancang sebuah sistem yang efektif dan terpadu untuk mengelola risiko dan modal. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak tantangan yang dihadapi Perseroan, tetapi juga untuk mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing perusahaan.

Penerapan manajemen risiko oleh Perseroan bersifat proaktif dan berorientasi ke depan untuk memastikan peningkatan nilai bagi para pemegang saham, pengelolaan modal yang komprehensif, serta menjaga profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sistem Manajemen Risiko Perseroan telah dikembangkan dengan membangun sistem

Control System (SPI), and has taken steps to strengthen an effective risk awareness culture at every level of the organization.

Meanwhile, the Director who is responsible for the compliance function is active in monitoring so that there are no deviations in policies related to the precautionary principles established by management. Evaluation results are routinely reported to the Board of Directors and related units for follow-up and implementation monitoring. Any problems that arise are systematically corrected and continuously monitored to ensure that SPI is running effectively. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, is actively involved in evaluating SPI by reviewing the results of examinations carried out by the Internal Audit Unit.

The Board of Directors stated that the Company's SPI in 2024 was quite effective in preventing irregularities and reducing the Company's risks. The Company is committed to continuing to improve the quality of SPI in the future.

Risk Management System

In order to face economic challenges, both at local and global levels, as well as to reduce the impact of various risks that may arise in carrying out its business operations, the Company has designed an effective and integrated system for managing risk and capital. This system not only aims to reduce the impact of challenges faced by the Company, but also to support the achievement of sustainable performance and increase the company's competitiveness.

The Company's implementation of risk management is proactive and forward-oriented to ensure increased value for shareholders, comprehensive capital management, and maintain profitability and sustainable business growth. The Company's Risk Management System has been developed by building an early warning system, so that each risk can be identified, evaluated and appropriate action taken to prevent company



peringatan dini, sehingga setiap risiko dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan diberikan tindakan yang sesuai untuk mencegah kerugian perusahaan dan memastikan kelangsungan operasionalnya.

Kategorisasi Risiko Perseroan

Risiko-risiko utama Perseroan dibagi menjadi tiga kategori utama, yang menjadi fokus perhatian dari Direksi dan manajemen untuk mengidentifikasi langkah-langkah penanganan yang sesuai. Kategori risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Utama:

- a. Risiko Keterbatasan Lahan untuk Pengembangan

Perseroan beroperasi sebagai pengembang utama (developer) dan oleh karena itu, ketersediaan lahan (landbank) untuk pengembangan merupakan faktor kunci dalam aktivitas bisnisnya.

Saat ini, Perseroan masih memiliki ketersediaan lahan yang memadai di wilayah Bogor. Namun, jika lahan di wilayah Bogor telah habis dikembangkan dan Perseroan belum memperoleh lahan baru, maka ini berpotensi berdampak negatif terhadap operasional, pendapatan, dan prospek bisnis Perseroan. Faktor ini diperparah oleh kenaikan harga lahan setiap tahunnya, yang dapat memberikan beban tambahan bagi Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya. Selain itu, ketersediaan tanah yang dapat diperoleh untuk perumahan terbatas karena peraturan tata ruang dan proses pembebasan lahan yang memakan waktu yang lama.

Untuk mengurangi dampak risiko ini, Perseroan secara konsisten berusaha mencari lahan strategis

losses and ensure the continuity of its operations.

Company Risk Categorization

The Company's main risks are divided into three main categories, which are the focus of attention of the Board of Directors and management to identify appropriate handling steps. These risk categories are as follows:

1. Main Risks:

- a. *Risk of Limited Land for Development*

The Company operates as a major developer (developer) and therefore, the availability of land (landbank) for development is a key factor in its business activities.

Currently, the Company still has adequate land availability in the Bogor area. However, if the land in the Bogor area has been completely developed and the Company has not acquired new land, then this has the potential to have a negative impact on the Company's operations, income and business prospects. This factor is exacerbated by the increase in land prices every year, which can provide additional burdens for the Company in developing its business. In addition, the availability of land that can be obtained for housing is limited due to spatial planning regulations and the land acquisition process which takes a long time.

To reduce the impact of this risk, the Company consistently tries to find new strategic land at affordable prices for development, especially



baru dengan harga yang terjangkau untuk pengembangan, terutama di wilayah Bogor, sebelum lahan yang dimiliki Perseroan habis terpakai.

b. Risiko Penurunan Permintaan Pasar Properti

Salah satu risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah potensi penurunan permintaan properti di pasar. Perseroan utamanya terlibat dalam pengembangan proyek perumahan di wilayah Bogor dan sekitarnya, serta di kota-kota terdekat yang sedang mengalami pertumbuhan pesat sebagai kota satelit. Meskipun wilayah tersebut padat penduduk dan memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, ada kemungkinan bahwa permintaan properti dapat menurun bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan calon pembeli rumah untuk tinggal atau investasi beralih ke sektor lain, mengakibatkan penurunan permintaan properti. Risiko ini dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan, dengan potensi penurunan pendapatan dan laba. Meskipun demikian, Perseroan tetap fokus pada pengembangan bisnisnya di sekitar wilayah Bogor. Di masa depan, risiko penurunan permintaan properti, baik dari konsumen yang mencari tempat tinggal maupun investor, tetap menjadi perhatian utama Perseroan.

in the Bogor area, before the land owned by the Company is used up.

b. Risk of Declining Property Market Demand

One of the risks faced by the Company is the potential decline in demand for property in the market. The company is primarily involved in developing housing projects in the Bogor area and its surroundings, as well as in nearby cities which are experiencing rapid growth as satellite cities. Even though the area is densely populated and has quite high economic activity, there is a possibility that property demand may decline depending on economic growth and people's purchasing power. This can cause prospective home buyers to stay or invest in other sectors, resulting in a decrease in property demand. This risk can have an impact on the Company's financial performance, with the potential to reduce revenue and profits. Despite this, the Company remains focused on developing its business around the Bogor area. In the future, the risk of decreasing demand for property, both from consumers looking for a place to live and investors, remains the Company's main concern.



2. Risiko Usaha

a. Risiko Persaingan Bisnis

Persaingan di industri properti, khususnya untuk segmen perumahan kelas menengah ke bawah, sangatlah sengit. Seiring dengan perlambatan penjualan rumah kelas menengah ke atas dalam beberapa tahun terakhir, banyak pengembang yang sebelumnya fokus pada segmen tersebut kini juga memasuki pasar perumahan kelas menengah ke bawah dan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Hal ini meningkatkan persaingan di pasar. Persaingan yang ketat ini mendorong Perseroan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk promosi dan infrastruktur awal guna menarik minat konsumen. Ada potensi penurunan pendapatan jika konsumen lebih memilih properti dari pesaing.

Untuk tetap kompetitif di pasar yang kompetitif ini, Perseroan terus mempertahankan standar kualitas yang tinggi untuk setiap proyek perumahan yang dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk memelihara tingkat kepercayaan dan kepuasan pelanggan Perseroan, serta menjaga posisi kompetitif di pasar.

b. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Pemerintah memiliki komitmen untuk menyediakan perumahan yang layak bagi semua Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk mendukung

2. Business Risk

a. Business Competition Risk

Competition in the property industry, especially for the lower middle class housing segment, is very fierce. Along with the slowdown in upper middle class housing sales in recent years, many developers who previously focused on this segment are now also entering the lower middle class housing market and the FLPP (Housing Financing Liquidity Facility) program. This increases competition in the market. This intense competition encourages the Company to allocate more resources for promotions and initial infrastructure to attract consumer interest. There is a potential decrease in income if consumers prefer properties from competitors. To remain competitive in this competitive market, the Company continues to maintain high quality standards for every housing project it develops. This is done to maintain the level of trust and satisfaction of the Company's customers, as well as maintain a competitive position in the market.

b. Risk of Changes in Government Policy Regarding Housing Financing Liquidity Facilities (FLPP)

The government is committed to providing adequate housing for all Low Income Communities (MBR). To support this goal, the Government has implemented



tujuan ini, Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pendukung, termasuk:

01. Kebijakan Ekonomi XIII terkait perumahan bagi MBR.
02. Program FLPP khusus untuk MBR, yang mencakup:
 - i. Penetapan bunga tetap sebesar 5% per tahun selama masa kredit.
 - ii. Batas waktu kredit maksimal 25 tahun.
 - iii. Uang muka sebesar 1%.
 - iv. Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp4.000.000,- untuk menutupi biaya KPR, notaris, BPHTB, dan sebagainya.

03. Rencana Pemerintah untuk mengembangkan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

Dengan diberlakukannya kebijakan FLPP, Perseroan melihat potensi untuk mengembangkan bisnisnya sambil turut mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan program sejuta rumah. Sebagai hasilnya, Perseroan kini lebih berfokus pada proyek-proyek pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain karena peluang bisnis yang menjanjikan, kebijakan Pemerintah yang mendukung dengan penyederhanaan proses perizinan juga menjadi faktor penentu. Namun, untuk menjaga kelancaran pelaksanaan, konsistensi dari Pemerintah sangatlah penting. Perseroan,

various supporting policies, including:

01. Economic Policy XIII regarding housing for MBR.
02. FLPP program specifically for MBR, which includes:
 - i. Fixed interest rate of 5% per year during the credit period.
 - ii. The maximum credit period is 25 years.
 - iii. Down payment of 1%.
 - iv. Down Payment Assistance (BUM) of IDR 4,000,000 to cover KPR, notary, BPHTB and so on costs.

03. Government plans to develop Public Housing Savings (TAPERA).

With the implementation of the FLPP policy, the Company sees the potential to develop its business while supporting the Government's efforts to realize the one million houses program. As a result, the Company is now focusing more on housing development projects for Low Income Communities (MBR). Apart from promising business opportunities, Government policies that support the simplification of the licensing process are also a determining factor. However, to maintain smooth implementation, consistency from the Government is very important. The Company, in order to keep up to date with



guna tetap memperbarui informasi terkait perubahan regulasi dan kebijakan, menjalin kerjasama dengan bank yang menjadi penyedia kredit FLPP. Selain itu, Perseroan juga menjadi anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (ASPERUMNAS).

c. Risiko Keterbatasan Pendanaan dan Penundaan Proyek

Dalam menjalankan proyek konstruksi, Perseroan membutuhkan jumlah dana yang besar untuk menyelesaikan proyek tersebut. Terkadang, selama proyek berlangsung, ada kemungkinan bahwa dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tidak tersedia tepat waktu. Situasi ini dapat menghambat atau bahkan menunda penyelesaian proyek, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan pendapatan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu melakukan perencanaan dan analisis yang cermat sebelum memulai pembangunan proyek, termasuk dalam hal pendanaan.

d. Risiko Investasi

Sebagai pengembang perumahan, Perseroan terus mencari cadangan tanah untuk meningkatkan aset dan portofolio perusahaan. Namun, kebutuhan akan investasi untuk mendapatkan landbank semakin sulit karena semakin langkanya tanah yang tersedia. Oleh karena itu, Manajemen Perseroan harus memiliki strategi yang efektif untuk mendapatkan lokasi-lokasi strategis dengan harga yang

information regarding changes in regulations and policies, collaborates with banks that provide FLPP credit. In addition, the Company is also a member of the Indonesian Housing and Settlement Developers Association (ASPERUMNAS).

c. Risk of Funding Limitations and Project Delays

In carrying out construction projects, the Company requires large amounts of funds to complete the project. Sometimes, during the course of a project, it is possible that the funds necessary to complete the project may not be available on time. This situation can hamper or even delay project completion, which in the end can result in a decrease in the Company's income. Therefore, the Company always carries out careful planning and analysis before starting project construction, including in terms of funding.

d. Investment Risk

As a housing developer, the Company continues to look for land reserves or land banks to increase the company's assets and portfolio. However, the need for investment to obtain landbank is increasingly difficult because available land is increasingly scarce. Therefore, Company Management must have an effective strategy to obtain strategic locations at affordable prices. There is no guarantee



terjangkau. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan selalu berhasil mendapatkan landbank dengan lokasi strategis di masa depan, sehingga situasi ini dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan. Untuk itu, Perseroan terus berinvestasi dan aktif mencari landbank yang strategis untuk mendukung proyek-proyeknya.

- e. Risiko Ketersediaan Bahan Baku Sebagai pengembang properti, Perseroan harus memastikan kelancaran proses konstruksi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perseroan mengandalkan pihak kontraktor eksternal untuk melaksanakan konstruksi, yang dipilih melalui proses seleksi dan standarisasi bahan bangunan yang telah ditetapkan. Terutama untuk proyek rumah FLPP, Perseroan menjamin penggunaan bahan bangunan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, jika terjadi kelangkaan atau kehabisan bahan bangunan, hal ini dapat menghambat dan menunda proyek pembangunan.

Untuk mengurangi risiko ketidakterediaan bahan bangunan, Perseroan secara teratur melakukan diversifikasi pemasok bahan bangunan yang akan digunakan. Dengan demikian, Perseroan dapat lebih memastikan ketersediaan bahan bangunan yang diperlukan untuk proyek-proyeknya.

that the Company will always be successful in obtaining a landbank with a strategic location in the future, so this situation could have an impact on the Company's profitability. For this reason, the Company continues to invest and is actively looking for strategic land banks to support its projects.

- e. *Raw Material Availability Risk* As a property developer, the Company must ensure the smooth construction process and quality in accordance with established standards. The Company relies on external contractors to carry out construction, which are selected through a predetermined selection and standardization process for building materials. Especially for the FLPP house project, the Company guarantees the use of building materials that meet established standards. However, if there is a shortage or running out of building materials, this can hamper and delay development projects.

To reduce the risk of unavailability of building materials, the Company regularly diversifies suppliers of building materials to be used. In this way, the Company can better ensure the availability of building materials needed for its projects.



3. Risiko Bisnis

- a. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Legalitas, dan Perizinan

Pengembangan properti terkait dengan aspek legalitas dan perizinan merupakan faktor krusial dalam operasional Perseroan. Setiap perubahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dapat memengaruhi jalannya operasional bisnis Perseroan, dengan potensi dampak material yang merugikan terhadap pendapatan dan prospek usaha. Risiko ini mencakup perubahan regulasi terkait dengan legalitas dan perizinan, di antaranya:

01. Hak Guna Bangunan (HGB)
Saat ini, Perseroan memiliki kepemilikan atas tanah dalam bentuk HGB. Awalnya, HGB diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 tahun. Setelah masa berlaku HGB berakhir, perpanjangan HGB dapat diajukan untuk jangka waktu tambahan maksimal 20 tahun dengan permohonan kepada Pemerintah. Namun, jika permohonan perpanjangan HGB tidak disetujui oleh Pemerintah, maka hak atas tanah tersebut dapat hilang. Kehilangan hak atas tanah ini dapat berdampak pada operasional, pendapatan, dan prospek usaha Perseroan.
02. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Untuk properti yang telah selesai dibangun atau sedang dalam tahap konstruksi, Perseroan telah memperoleh

3. Business Risk

- a. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Legalitas, dan Perizinan

Pengembangan properti terkait dengan aspek legalitas dan perizinan merupakan faktor krusial dalam operasional Perseroan. Setiap perubahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dapat memengaruhi jalannya operasional bisnis Perseroan, dengan potensi dampak material yang merugikan terhadap pendapatan dan prospek usaha. Risiko ini mencakup perubahan regulasi terkait dengan legalitas dan perizinan, di antaranya:

01. Building Use Rights (HGB)
Currently, the Company has ownership of land in the form of HGB. Initially, HGB was granted for a maximum period of 30 years. After the HGB validity period ends, an extension of the HGB can be submitted for an additional period of up to 20 years by requesting the Government. However, if the HGB extension application is not approved by the Government, the right to the land may be lost. Loss of land rights could impact the Company's operations, income and business prospects.
02. Building Construction Permit (IMB)

For properties that have been completed or are currently under construction, the Company has obtained an IMB from the government according



IMB dari pemerintah sesuai dengan lokasi masing-masing properti. Proyek pembangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB akan menghadapi risiko penyegehan oleh pemerintah setempat. Jika terjadi perubahan kebijakan perizinan dari pemerintah terkait izin-izin yang telah dimiliki, hal ini dapat berdampak pada operasional dan pendapatan Perseroan jika Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan baru tersebut

03. Izin Lingkungan Hidup (A M D A L / U U P L)

Hingga saat Prospektus ini disusun, baik untuk properti yang sudah selesai dibangun maupun yang sedang dalam tahap konstruksi, Perseroan secara konsisten mengurus perizinan lingkungan hidup dari Pemerintah sesuai dengan lokasi masing-masing properti. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu mematuhi semua persyaratan yang diatur dalam izin-izin tersebut. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan atau adanya perubahan kebijakan lingkungan hidup yang belum dapat dipenuhi oleh Perseroan, hal ini dapat berdampak pada operasional dan pendapatan Perseroan.

to the location of each property. Development projects that are not equipped with an IMB will face the risk of being sealed by the local government. If there is a change in licensing policy from the government regarding existing permits, this could have an impact on the Company's operations and income if the Company cannot fulfill the new requirements.

03. Environmental Permit (A M D A L / U U P L)

Until the time this Prospectus was prepared, both for properties that have been completed and are currently under construction, the Company has consistently taken care of environmental permits from the Government according to the location of each property. In carrying out its business activities, the Company always complies with all the requirements stipulated in these permits. However, if there is a violation of the stipulated provisions or there are changes to environmental policies that the Company cannot fulfill, this could have an impact on the Company's operations and income.



b. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik terkait dengan kondisi pemerintahan, situasi politik, dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang stabil sangat penting bagi perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil, jika berlangsung secara terus menerus, dapat berdampak negatif secara langsung atau tidak langsung pada kinerja keuangan Perseroan.

c. Risiko Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro adalah risiko yang timbul akibat perubahan, perlambatan, atau resesi dalam kondisi perekonomian secara keseluruhan. Penurunan pertumbuhan PDB, kenaikan volatilitas nilai tukar, dan laju inflasi yang meningkat akan berdampak langsung pada bisnis dan usaha di suatu negara. Bagi Perseroan yang bergerak dalam industri perumahan, kondisi perekonomian secara makro memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan harga dan permintaan perumahan.

d. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Perseroan beroperasi di sektor pengembangan perumahan, di mana pendanaannya berasal dari pinjaman bank dengan tingkat suku bunga tertentu yang digunakan untuk kegiatan operasional. Selain jumlah pendanaan, jangka waktu pendanaan dan tingkat suku bunga yang ditetapkan juga memainkan peran penting. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga, beban bunga dapat meningkat lebih cepat dari pendapatan usaha Perseroan, yang dapat memiliki dampak negatif

b. Risks of Indonesian Political Conditions

Political risk is related to the condition of government, political situation and security in a country. Stable political conditions are very important for business and business development. Unstable political conditions, if they persist continuously, could have a direct or indirect negative impact on the Company's financial performance.

c. Macroeconomic Risk

Macroeconomic risk is the risk that arises from changes, slowdowns or recessions in overall economic conditions. Decreasing GDP growth, increasing exchange rate volatility, and increasing inflation rates will have a direct impact on business and enterprises in a country. For companies operating in the housing industry, macro economic conditions have a significant impact on the growth of housing prices and demand.

d. Risk of Increase in Interest Rates

The Company operates in the housing development sector, where funding comes from bank loans at certain interest rates which are used for operational activities. Apart from the funding amount, the funding period and the interest rate set also play an important role. If there is an increase in interest rates, interest expenses could increase faster than the Company's operating income, which could have a material negative impact on the Company's



secara material pada kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

e. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Nilai tukar mata uang asing mengacu pada nilai tukar antara dua mata uang dari negara yang berbeda, dan dapat mempengaruhi pembayaran saat ini maupun di masa mendatang. Jika Perseroan memiliki hutang kepada pihak ketiga yang menggunakan Dolar Amerika Serikat (USD), penguatan Dolar Amerika Serikat dan pelemahan Rupiah dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

f. Risiko Bencana Alam dan Wabah Penyakit Seperti Covid-19 dan Lainnya

Perseroan beroperasi di Indonesia, di mana sebagian wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, atau peristiwa-peristiwa lainnya. Beberapa dari bencana-bencana yang disebutkan sebelumnya telah terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam memiliki potensi untuk merusak bangunan dan proyek, khususnya yang terkait dengan pembangunan properti yang sedang dikerjakan oleh Perseroan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja operasional dan, akhirnya, pada kinerja keuangan Perseroan.

operational performance, financial condition and business prospects.

e. *Risk of Changes in Foreign Currency Exchange Rates*

Foreign exchange rates refer to the exchange rate between two currencies from different countries, and can affect current and future payments. If the Company has debts to third parties using United States Dollars (USD), the strengthening of the United States Dollar and the weakening of the Rupiah could have a negative impact on the Company's financial performance.

f. *Risk of Natural Disasters and Disease Outbreaks Such as Covid-19 and Others*

The Company operates in Indonesia, where some areas are vulnerable to natural disasters such as earthquakes, tsunamis, floods, volcanic eruptions, droughts or other events. Some of the disasters mentioned previously have occurred in several locations in Indonesia. The emergence of natural disasters has the potential to damage buildings and projects, especially those related to property development being carried out by the Company, so that it can have a negative impact on operational performance and, ultimately, on the Company's financial performance.



4. Risiko Terkait Pengelolaan Perusahaan dan Kepemilikan Saham Perseroan

- a. Risiko Likuiditas Saham Penawaran Kurangnya Saham pada Saham Perdana

Meskipun Perseroan berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan akan berkembang, atau jika pasar berkembang, saham Perseroan akan aktif atau likuid. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa sebagian besar pemegang saham mungkin tidak berpartisipasi dalam perdagangan saham di pasar sekunder, dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

- b. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan dan dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditetapkan selama penawaran awal, berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini dapat disebabkan oleh:

4. Risks Related to Company Management and Ownership of Company Shares

- a. Risk of Lack of Stock Liquidity in Initial Stock Offerings

Although the Company plans to list its shares on the Indonesia Stock Exchange, there is no guarantee that the market for the Company's traded shares will develop, or that if the market does develop, the Company's shares will be active or liquid. This is due to the possibility that the majority of shareholders may not participate in share trading on the secondary market, and/or the purpose of purchasing shares is as a long-term investment.

- b. Company Share Price Fluctuations

The Company's share price after the Initial Public Offering may experience significant fluctuations and may be traded at a price below the Offer Price determined during the initial offering, based on an agreement between the Company and the Managing Underwriter. This can be caused by:



01. Perbedaan antara kinerja finansial dan operasional yang terealisasi oleh Perseroan dengan harapan dan prediksi yang dipegang oleh investor dan analis.
02. Perubahan dalam pandangan atau saran yang diberikan oleh para analis terhadap Perseroan dan situasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
03. Tingkat transparansi atas transaksi yang dianggap signifikan yang diumumkan oleh Perseroan kepada publik.
04. Perubahan dalam kondisi pasar modal Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor baik di dalam negeri maupun di pasar modal global.
05. Perubahan dalam situasi ekonomi makro Indonesia dan industri properti secara spesifik, serta perubahan dalam situasi politik dan sosial secara keseluruhan di Indonesia.
06. Keterlibatan Perseroan dalam proses hukum atau konflik yang sedang berlangsung.

c. Risiko dalam Pembagian Dividen

Keputusan pembagian dividen akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, dan investasi modal yang dibutuhkan oleh Perseroan di masa depan. Jika terdapat kerugian yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan, ini dapat menjadi alasan untuk menunda atau tidak membagikan dividen. Sebagai gantinya, laba yang telah terakumulasi mungkin akan digunakan sebagai dana internal untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

01. The difference between the financial and operational performance realized by the Company and the expectations and predictions held by investors and analysts.
02. Changes in views or suggestions provided by analysts regarding the Company and the overall Indonesian economic situation.
03. The level of transparency regarding transactions deemed significant that are announced by the Company to the public.
04. Changes in Indonesian capital market conditions which are influenced by factors both domestically and in the global capital market.
05. Changes in Indonesia's macroeconomic situation and the property industry specifically, as well as changes in the overall political and social situation in Indonesia.
06. The Company's involvement in ongoing legal processes or conflicts.

c. Risks in Dividend Distribution

The decision to distribute dividends will be decided by the General Meeting of Shareholders (GMS) by considering several factors, including income, financial condition, cash flow, working capital requirements and capital investment required by the Company in the future. If there is a loss recorded in the Company's consolidated financial statements, this could be a reason to postpone or not distribute dividends. Instead, the accumulated profits may be used as internal funds to support the Company's business development.



Perkara Penting Yang Dihadapi Perseroan

Secara keseluruhan, Perseroan bersama manajemen dan karyawannya tidak terlibat dalam pelanggaran atau subjek dari sanksi administratif dari otoritas terkait, termasuk otoritas pasar modal, sepanjang tahun buku 2024. Tidak ada insiden pelanggaran atau tindakan yang mengakibatkan dikenakannya sanksi oleh otoritas terkait terhadap bisnis Perseroan maupun aktivitas pasar modal pada tahun tersebut.

Kode Etik Dan Budaya Perseroan

Kode Etik Perseroan adalah pilar utama dalam memastikan bahwa seluruh anggota tim Perseroan bertindak dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam setiap aspek kerja mereka. Didasarkan pada Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan, Kode Etik ini mencerminkan budaya organisasi yang kuat yang berlaku untuk seluruh jajaran, mulai dari Dewan Komisaris hingga karyawan biasa.

Setiap karyawan diharapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik ini, yang dilakukan melalui sosialisasi berkala dan penandatanganan kesepakatan oleh karyawan baru untuk mematuhi ketentuan tersebut. Selain itu, Kode Etik menjadi pedoman dalam menjaga hubungan baik secara internal maupun eksternal, serta sebagai landasan dalam penyampaian informasi kepada publik. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik diharapkan untuk dilaporkan kepada Direksi, sehingga menjaga kepatuhan dan kualitas lingkungan kerja Perseroan.

Important Matters Disrupting The Company

Overall, the Company together with its management and employees were not involved in any violations or were the subject of administrative sanctions from the relevant authorities, including the capital market authority, throughout the 2024 financial year. There were no incidents of violations or actions that resulted in the imposition of sanctions by the relevant authorities on the Company's business or market activities. capital for that year.

Corporate Code Of Ethics And Culture

The Company's Code of Ethics is the main pillar in ensuring that all members of the Company's team act with high integrity and professionalism in every aspect of their work. Based on the Company's Vision, Mission and Values, this Code of Ethics reflects a strong organizational culture that applies to all levels, from the Board of Commissioners to ordinary employees.

Every employee is expected to internalize the values contained in this Code of Ethics, which is done through regular socialization and the signing of an agreement by new employees to comply with these provisions. In addition, the Code of Ethics serves as a guideline for maintaining relationships both internally and externally, as well as a basis for conveying information to the public. Any violation of the Code of Ethics is expected to be reported to the Board of Directors, thereby maintaining compliance and the quality of the Company's work environment.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System (WBS) menjadi instrumen penting dalam mendeteksi dini pelanggaran di lingkungan Perseroan yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial dan merusak reputasi Perusahaan. Implementasinya mencerminkan komitmen Perseroan untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan berintegritas, dengan mengajak partisipasi aktif karyawan dalam melaporkan pelanggaran.

Proses pelaporan yang telah disusun memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan jaminan kerahasiaan bagi pelapor baik dari internal maupun eksternal Perusahaan. Tindak lanjut yang tepat dan terukur akan diambil untuk setiap laporan yang diterima, sehingga menjamin keberlangsungan integritas di lingkungan kerja. Selama tahun 2022, dilakukan evaluasi terhadap pelaporan yang masuk melalui WBS, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai bagi pelanggaran yang terbukti.

Kebijakan Perdagangan Orang Dalam

Perusahaan, sesuai dengan regulasi pasar modal yang berlaku, mematuhi kebijakan terkait perdagangan orang dalam. Esensi dari kebijakan ini adalah larangan bagi pihak-pihak di dalam Perusahaan yang memiliki informasi material untuk menyalahgunakan posisinya demi keuntungan pribadi dengan mengungkapkan informasi tersebut, yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi pihak lainnya. Mereka diminta untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.

Whistleblowing System

The Whistleblowing System (WBS) is an important instrument in early detection of violations within the Company that have the potential to result in financial losses and damage the Company's reputation. Its implementation reflects the Company's commitment to creating a work environment that is transparent and has integrity, by inviting active employee participation in reporting violations.

The reporting process that has been prepared ensures that every violation will be handled in accordance with applicable procedures, with guaranteed confidentiality for reporters both internal and external to the Company. Appropriate and measurable follow-up will be taken for every report received, thereby ensuring continued integrity in the work environment. During 2022, an evaluation will be carried out on reports submitted through the WBS, which will then be followed up with appropriate sanctions for proven violations

Insider Trading Policy

The Company, in accordance with applicable capital market regulations, complies with policies regarding insider trading. The essence of this policy is the prohibition of parties within the Company who have material information from abusing their position for personal gain by disclosing that information, which may influence the investment decisions of other parties. They are required to report any violations committed by employees.



Kebijakan Seleksi Untuk Pemasok Dan Vendor

Perusahaan telah menetapkan kebijakan yang menegaskan bahwa dalam proses penunjukan pemasok dan vendor, langkah pertama yang harus diambil adalah melalui proses tender yang ketat. Proses tender ini dirancang untuk memastikan bahwa pemilihan pemasok dan vendor dilakukan secara adil dan transparan, dengan fokus pada mendapatkan hasil terbaik yang memenuhi kebutuhan Perusahaan. Dengan demikian, setiap vendor atau pemasok yang berminat untuk bekerja sama dengan Perusahaan akan memiliki kesempatan yang sama untuk menawarkan produk atau layanan mereka. Selain itu, proses tender ini juga memungkinkan Perusahaan untuk memilih pemasok atau vendor yang tidak hanya menawarkan harga yang kompetitif, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Perusahaan. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk memastikan bahwa kemitraan dengan pemasok dan vendor didasarkan pada prinsip transparansi, integritas, dan efisiensi.

Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Saat ini, Perusahaan belum merumuskan secara resmi kebijakan yang secara khusus menangani pemenuhan hak-hak kreditur. Namun, dalam menjaga integritas dan tanggung jawabnya, Perusahaan secara konsisten berkomitmen untuk mematuhi semua perjanjian yang telah disepakati dengan para kreditur. Dalam hal ini, Perusahaan mengutamakan untuk tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap terjaga dengan baik.

Selection Policy For Suppliers And Vendors

The company has established a policy that emphasizes that in the process of appointing suppliers and vendors, the first step that must be taken is through a strict tender process. This tender process is designed to ensure that the selection of suppliers and vendors is carried out fairly and transparently, with a focus on obtaining the best results that meet the Company's needs. Thus, every vendor or supplier who is interested in collaborating with the Company will have the same opportunity to offer their products or services. In addition, this tender process also allows the Company to select suppliers or vendors who not only offer competitive prices, but also meet the quality standards set by the Company. Thus, this policy reflects the Company's commitment to ensuring that partnerships with suppliers and vendors are based on the principles of transparency, integrity and efficiency.

Policy For Fulfillment Of Creditors' Rights

Currently, the Company has not officially formulated a policy that specifically addresses the fulfillment of creditor rights. However, in maintaining its integrity and responsibility, the Company is consistently committed to complying with all agreements agreed with creditors. In this case, the Company prioritizes continuing to fulfill its obligations in accordance with the agreements that have been made, as an effort to ensure that creditor rights are well maintained.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam upaya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan telah mengadopsi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/2015. Pedoman tata kelola yang diterapkan mencakup lima aspek utama, delapan prinsip inti, dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tersebut. Perseroan secara konsisten menerapkan dan terus meningkatkan kualitas implementasi rekomendasi tersebut seiring berjalannya waktu. Detail rekomendasi yang diadopsi meliputi:

Implementation Of Corporate Governance

In an effort to implement corporate governance principles that are transparent and in accordance with applicable regulations, the Company has adopted the standards set out in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/2015 and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/2015. The governance guidelines implemented include five main aspects, eight core principles, and 25 recommendations for implementing these aspects and principles. The Company consistently implements and continues to improve the quality of implementation of these recommendations over time. Detailed recommendations adopted include:

NO	Prinsip <i>Principle</i>	Rekomendasi <i>Recommendation</i>	Implementasi <i>Implementation</i>
----	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

1st Aspect: Relationship between Public Company and Shareholders in Guaranteeing the Rights of Shareholders

1	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS <i>1st Principle Improve the Organizing Value of the GMS</i>	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. <i>The Public Company has technical means or procedures for voting both openly and closed which prioritizes the independence and shareholders interests</i>	yes
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. <i>All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.</i>	yes
			yes



2	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	yes
		<i>A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.</i>	yes
	<i>2nd Principle Improve the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.</i>	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	yes
		<i>The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.</i>	yes
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	yes
		<i>The Public Company discloses the communication policy of the Public Company with shareholders or investors on the Website.</i>	yes

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

2nd Aspect: Functions and Roles of the Board of Commissioners

3	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	yes
		<i>Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Company</i>	yes
	3rd Principle Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	yes
		<i>Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.</i>	yes
4	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	yes
		<i>The Board of Commissioners has a Self Assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</i>	yes
	Principle 4 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	yes
		<i>A Self Assessment Policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report of the Public Company.</i>	yes



	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	yes
	<i>The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes.</i>	yes
	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan sukses dalam proses nominasi anggota Direksi.	yes
	<i>The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function composes a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors.</i>	yes

III Aspek 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI

3rd Aspect: Functions and Roles of the Board of Directorst

5	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. <i>5th Principle Strengthening the Membership and Composition of the Board of Director</i>	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	yes
		<i>Determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company and the effectiveness in decision making.</i>	yes
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	yes
		<i>Determination of the composition of members of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.</i>	yes



6	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. <i>6th Principle Improving the Quality of the Duties and Responsibilities of the Directors.</i>	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	yes
		<i>The Board of Directors has a Self Assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</i>	yes
		Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka	yes
		<i>Self assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the annual report of the Public Company.</i>	yes
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	yes
		<i>The Board of Directors has policies related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.</i>	yes



IV Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan

4th Aspect: Stakeholder Participation

7	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. <i>Principle 7 Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.</i>	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. <i>Public Companies have policies to prevent insider trading.</i>	yes yes
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti Fraud. <i>The Public Company has an anti- corruption and anti-fraud policy.</i>	yes yes
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. <i>The Public Company has a policy regarding the selection and improvement of the ability of suppliers or vendors.</i>	yes yes
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak- hak kreditur. <i>The Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditor rights.</i>	Tidak No
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. <i>The Public Company has a whistleblowing system policy.</i>	yes yes
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan <i>The Public Company has a policy of providing long-term incentives to Directors and Employees.</i>	yes yes

V Aspek 5 : KETERBUKAAN INFORMASI

5th Aspect: Information Disclosure

<p>8</p>	<p>Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.</p> <p><i>8th Principle Improving the Implementation of Information Disclosure.</i></p>	<p>Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p><i>Public companies utilize the use of information technology more broadly than the Website as a media for information disclosure.</i></p>	<p>yes</p> <p>yes</p>
		<p>Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p><i>The Annual Report of the Public Company reveals the owner of the final benefit in the ownership of the Public Company at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the shareholding of the Public Company through the main and controlling shareholders.</i></p>	<p>yes</p> <p>yes</p>





06

BAB

LAPORAN

KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY REPORT



TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About The Sustainability Report

Keberlangsungan bisnis suatu perusahaan ditopang oleh sistem Tata Kelola yang efektif, tidak hanya mengatur operasional bisnis tetapi juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi katalisator untuk memastikan keselarasan antara visi-misi perusahaan, praktik bisnis bertanggung jawab, dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

Struktur Organisasi yang Sinergis

Setiap unit dalam organisasi memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang terdefinisi jelas untuk menjamin proses pengambilan keputusan yang akuntabel, implementasi praktik bisnis berstandar tertinggi, dan transparansi dalam seluruh tahapan operasional. Detail mekanisme kerja dan hubungan antar organ perusahaan tercantum dalam Kebijakan Tata Kelola Perseroan.

Adapun struktur Tata Kelola Keberlanjutan Perseroan berlandaskan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta regulasi pendukung lainnya yang menjamin operasional bertanggung jawab, mencakup aspek:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

The sustainability of a company's business is supported by an effective Governance system, not only regulating business operations but also integrating sustainability principles. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a catalyst to ensure alignment between the company's vision and mission, responsible business practices, and the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) targets.

Synergistic Organizational Structure

Each unit in the organization has a clearly defined role, authority, and responsibility to ensure an accountable decision-making process, implementation of the highest standard business practices, and transparency in all stages of operations. Details of the working mechanisms and relationships between company organs are stated in the Company's Governance Policy.

The Company's Sustainable Governance structure is based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and other supporting regulations that guarantee responsible operations, covering the following aspects:

- 1. Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health;*
- 2. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection*
- 3. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower;*
- 4. Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System;*
- 5. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;*
- 6. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation*
- 7. Government Regulation no. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies*
- 8. Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies*



PROFIL SINGKAT PT. TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND TBK

Brief Profile of PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk

PT. Trimitra Prawara Goldland, Tbk selaku salah satu perusahaan pengembang properti nasional yang fokus pada pembangunan dan pengembangan kawasan hunian subsidi dan kelas menengah, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komitmen kami tidak hanya terletak pada penyediaan rumah, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kami selalu berupaya menghadirkan kawasan residensial yang terintegrasi secara harmonis dengan komponen hunian, komersial, dan wisata, semuanya dipertimbangkan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Melalui inovasi produk dan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan, kami bertekad mewujudkan visi perusahaan kami untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Identitas Perseroan

Dalam upaya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan telah mengadopsi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/2015. Pedoman tata kelola yang diterapkan mencakup lima aspek utama, delapan prinsip inti, dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tersebut. Perseroan secara konsisten menerapkan dan terus meningkatkan kualitas implementasi rekomendasi tersebut seiring berjalannya waktu. Detail rekomendasi yang diadopsi meliputi:

PT. Trimitra Prawara Goldland, Tbk as one of the national property development companies that focuses on building and developing subsidized and middle class residential areas, has the aim of improving the quality of life of the community. Our commitment lies not only in providing homes, but also in creating an environmentally friendly and sustainable environment. We always strive to present residential areas that are harmoniously integrated with residential, commercial and tourist components, all considered with sustainability principles. Through product innovation and sustainable area management, we are determined to realize our company vision to make a positive contribution to society and the environment.

Company Identity

In an effort to implement corporate governance principles that are transparent and in accordance with applicable regulations, the Company has adopted the standards set out in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/2015 and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/2015. The governance guidelines implemented include five main aspects, eight core principles, and 25 recommendations for implementing these aspects and principles. The Company consistently implements and continues to improve the quality of implementation of these recommendations over time. Detailed recommendations adopted include:



Sambutan Direktur Utama

Salam sejahtera untuk para pemangku kepentingan yang terhormat,
Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks, komitmen PT. Trimitra Prawara Goldland, Tbk. terhadap prinsip keberlanjutan tidak pernah surut. Laporan Keberlanjutan ini menjadi bukti konkret bahwa pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab sosial-lingkungan bukanlah dua hal yang bertolak belakang, melainkan fondasi yang saling memperkuat. Kami telah mengintegrasikan prinsip environmental, social, governance (ESG) ke dalam DNA operasional kami—mulai dari pengembangan hunian ramah lingkungan berbasis energi terbarukan hingga inisiatif pemberdayaan masyarakat sekitar. Setiap langkah kami dirancang untuk selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), sekaligus menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham, mitra, dan generasi mendatang.

Tahun 2024 menjadi tonggak penting dengan diluncurkannya proyek percontohan green industrial estate di Jawa Barat dan kolaborasi strategis dengan pelaku UMKM lokal untuk ekonomi sirkular. Kami meyakini bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang mengurangi jejak karbon, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan tahan guncangan. Kedepannya, Trimitra akan terus memperkuat inovasi berbasis teknologi dan memperluas kemitraan multidimensi untuk memastikan transisi yang adil menuju ekonomi hijau. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda—karena masa depan yang berkelanjutan hanya bisa diwujudkan bersama.

Remarks From The President Director

Greetings to our esteemed stakeholders, Amidst global economic shifts and increasingly complex environmental challenges, PT. Trimitra Prawara Goldland, Tbk.'s commitment to sustainability remains unwavering. This Sustainability Report reflects our conviction that business growth and socio-environmental responsibility are not opposing forces, but mutually reinforcing pillars. We have embedded environmental, social, and governance (ESG) principles into our operational DNA—from developing renewable energy-powered eco-friendly housing to community empowerment initiatives. Every step we take aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs), ensuring long-term value creation for shareholders, partners, and future generations.

2024 marked a pivotal year with the launch of our pilot green industrial estate in West Java and strategic collaborations with local MSMEs to advance circular economy practices. We believe sustainability extends beyond reducing carbon footprints; it requires building inclusive, resilient business ecosystems. Moving forward, Trimitra will deepen technology-driven innovation and expand multidimensional partnerships to ensure a just transition toward a green economy. Thank you for your trust and support—a sustainable future can only be realized collectively.

Strategi Keberlanjutan

Perseroan memperkuat komitmen keberlanjutannya untuk memajukan dan melindungi nilai seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini tidak hanya mencakup program tanggung jawab sosial (CSR), tetapi juga posisi Perseroan sebagai kontributor aktif dalam mencapai 17 target global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Prinsip keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari setiap aspek operasi sejak pendirian Perseroan, dengan evaluasi rutin dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan dan implementasi. Selain itu, produk hunian yang dihadirkan telah memenuhi dan secara konsisten mempertahankan standar kesehatan lingkungan hidup yang berlaku.

Sustainability Strategy

The Company has reinforced its sustainability commitment to advance and safeguard the interests of all stakeholders. This commitment extends beyond corporate social responsibility (CSR) initiatives to encompass its role as an active contributor toward achieving the 17 global Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainability principles have been embedded into every operational aspect since the Company's inception, supported by regular assessments and continuous improvements to ensure alignment between policies and on-the-ground execution. Furthermore, the residential offerings provided not only meet established environmental health standards but are also consistently maintained to uphold these benchmarks.

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance Highlights

Aspek Ekonomi Economic Aspect		
Rumah Terjual Sold House	71 unit	-21,11%
Nilai Penjualan Sales Value	Rp 13.780.837.839	-40,93%
Jumlah Karyawan Number of employees	43 orang	Tetap
Pembayaran Pajak Payment of Taxes	Rp 648.841.374	-32,49%



Aspek Lingkungan
Environmental Aspect

Bahan Baku <i>Raw material</i>	100 % ramah lingkungan <i>100% eco-friendly</i>
Pengelolaan Limbah <i>Waste Management</i>	0 % diolah <i>0 % processed</i>
Target Nihil - Kematian Akibat Kecelakaan Kerja <i>Target Zero - Deaths Due to Work Accidents</i>	0 orang <i>0 people</i>
Target Nihil - Kecelakaan Kerja <i>Target Zero - Work Accidents</i>	0 orang <i>0 people</i>
Target Nihil - Kehilangan Waktu Kerja <i>Target Zero - Lost Work Time</i>	0 orang <i>0 people</i>

Aspek Sosial
Social Aspect

Komparasi Upah Terendah Karyawan <i>Comparison of Lowest Wage Employees</i>	100 % terhadap Upah Minimum <i>100 % of the Minimum Wage</i>
Kesetaraan Gender <i>Gender Equality</i>	18,75% karyawan wanita <i>18.75% female employees</i>
Tenaga Kerja Paksa <i>Forced Labor</i>	0 orang <i>0 people</i>
Tenaga Kerja Anak <i>Child Labor</i>	0 orang <i>0 people</i>



TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Sustainability Governance

Penanggung Jawab

Direksi Perseroan, yang dipimpin oleh Direktur Utama sebagai kepala eksekutif, bertanggung jawab secara bersama-sama dan kolektif atas manajemen Perseroan. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan implementasi dan pemantauan Tata Kelola Berkelanjutan di seluruh organisasi.

Visi, Misi, dan Strategi Keberlanjutan yang disusun oleh Direksi menjadi pedoman utama dalam aktivitas bisnis Perseroan. Perseroan telah secara konsisten mematuhi standar industri terbaik yang berlaku, dengan menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam praktik bisnis sehari-hari. Kebijakan dan prosedur operasional standar telah dikembangkan secara cermat untuk memastikan keselarasan dengan Tata Kelola Berkelanjutan, sehingga setiap karyawan memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab penuh.

Manajemen Risiko

Perseroan telah mengadopsi kebijakan dan prosedur operasional standar sebagai sarana untuk mengelola risiko-risiko yang terkait dengan bisnisnya. Sistem Manajemen Risiko telah diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan secara berkala mengevaluasi risiko-risiko tersebut guna memastikan bahwa tingkat risiko Perseroan tetap rendah. Melalui penilaian risiko yang terperinci, Perseroan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko yang mengancam bisnisnya, sambil juga memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin muncul.

Informasi lebih lanjut tentang Sistem Manajemen Risiko Perseroan dapat ditemukan dalam bagian Tata Kelola Perseroan.

Responsibility

The Company's Board of Directors, led by the President Director as chief executive, is jointly and collectively responsible for the management of the Company. They play a critical role in ensuring the implementation and monitoring of Sustainable Governance across the organization.

The Vision, Mission and Sustainability Strategy prepared by the Board of Directors are the main guidelines for the Company's business activities. The Company has consistently complied with the best applicable industry standards, by translating this commitment into daily business practices. Standard operational policies and procedures have been carefully developed to ensure alignment with Sustainable Governance, so that every employee has clear guidance in carrying out their duties with integrity and full responsibility.

Risk Management

The Company has adopted standard operational policies and procedures as a means of managing risks related to its business. A Risk Management System has been implemented to identify, analyze and periodically evaluate these risks to ensure that the Company's risk level remains low. Through a detailed risk assessment, the Company can take the necessary steps to reduce risks that threaten its business, while also taking advantage of opportunities that may arise.

Further information about the Company's Risk Management System can be found in the Corporate Governance section.



Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan

Perseroan telah mengenali berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, termasuk pemahaman mengenai hubungan dan kepentingan mereka terhadap Perseroan. Informasi detail mengenai keterkaitan antara para pemangku kepentingan dan Perseroan dapat ditemukan dalam bagian Tata Kelola Perseroan.

Masalah Dan Tantangan

Perseroan, sebagai sebuah badan usaha, menyadari bahwa memenuhi standar bisnis terbaik adalah suatu keharusan. Upaya investasi dan inovasi terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan operasional. Namun, biaya yang tinggi terkait inovasi memerlukan investasi yang substansial dari Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan harus menjaga pengeluaran agar tetap efisien, sekaligus mempertahankan kualitas produk atau layanan, guna mencegah penurunan profitabilitas dalam jangka panjang.

Kinerja Berkelanjutan

Perseroan menerbitkan Laporan Terintegrasi, yang mencakup Laporan Keberlanjutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dokumen ini merupakan bagian integral dari Laporan Tahunan Perseroan yang melaporkan komitmen berkelanjutan Perseroan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023.

Budaya Berkelanjutan

Visi Perseroan menegaskan komitmen kepada para pemangku kepentingan, dan diwujudkan melalui dedikasi untuk menjalin serta mempertahankan kemitraan bisnis jangka panjang yang andal dan tepat waktu. Budaya keberlanjutan ini perlu meresap ke dalam budaya perusahaan secara menyeluruh, dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pencapaian.

Kebijakan dan prosedur operasional standar Perseroan merupakan elemen teknis yang mendukung terwujudnya budaya keberlanjutan. Setiap proses dan tugas karyawan diarahkan secara tertulis, memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat terpantau dan diukur dengan akurat sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Relationship With Stakeholders

The Company has identified various parties who have an interest in the company, including understanding their relationships and interests in the Company. Detailed information regarding the relationship between stakeholders and the Company can be found in the Corporate Governance section.

Problems And Challenges

The Company, as a business entity, realizes that meeting the best business standards is a must. Investment and innovation efforts continue to be made to ensure operational sustainability. However, the high costs associated with innovation require substantial investment from the Company. Therefore, the Company must maintain efficient expenditure, while maintaining product or service quality, in order to prevent a decline in profitability in the long term

Sustainable Performance

The Company publishes an Integrated Report, which includes a Sustainability Report in accordance with the provisions stipulated in the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. This document is an integral part of the Company's Annual Report which reports on the Company's ongoing commitment for the period January 1 to December 31, 2023.

Sustainable Culture

The Company's vision emphasizes its commitment to stakeholders, and is realized through dedication to establishing and maintaining long-term business partnerships that are reliable and timely. This culture of sustainability needs to permeate the company culture as a whole, with continuous efforts to improve the quality of achievements.

The Company's standard operational policies and procedures are technical elements that support the realization of a culture of sustainability. Every employee process and task is directed in writing, ensuring that the targets set can be monitored and measured accurately in accordance with the expected results.



Kinerja Ekonomi

Detail mengenai kinerja ekonomi, yang mencakup aspek operasional dan keuangan Perseroan, dapat ditemukan dalam bagian Analisis dan Diskusi Manajemen.

Kinerja Sosial

Rekrutmen dan Komposisi Karyawan

Perusahaan berkomitmen untuk memelihara potensi terbaik dari para karyawan, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah mereka secara berkelanjutan. Upaya ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan, serta mempromosikan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Mulai dari tahap rekrutmen hingga masa pensiun, perusahaan berupaya untuk memastikan bahwa karyawan merasa didukung dan diberdayakan.

Proses perekrutan karyawan dijalankan dengan prinsip-prinsip anti diskriminasi dan kesetaraan gender. Setiap kesempatan pekerjaan disediakan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, atau agama. Perlakuan yang adil diberikan kepada semua karyawan, baik dalam penerimaan maupun pelaksanaan tugas mereka.

Komposisi karyawan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sambil memastikan keadilan dalam lingkungan kerja. Meskipun mayoritas karyawan adalah laki-laki, ini sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan, dan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender. Perusahaan juga menegaskan larangan terhadap eksploitasi anak, dengan memastikan tidak ada karyawan di bawah usia produktif 18 tahun. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada tenaga kerja paksa, dan perusahaan juga mendorong mitra kerja untuk mengikuti prinsip-prinsip serupa.

Economic Performance

Details regarding economic performance, which includes operational and financial aspects of the Company, can be found in the Management Analysis and Discussion section.

Social Performance

KETENAGAKERJAAN

Employment

Employee Recruitment and Composition

The company is committed to nurturing the best potential of its employees, with the aim of increasing their productivity and added value on an ongoing basis. This effort also includes meeting employee needs and welfare, as well as promoting harmonious and dynamic industrial relations. From the recruitment stage to retirement, the company strives to ensure that employees feel supported and empowered.

The employee recruitment process is carried out with the principles of anti-discrimination and gender equality. Every employment opportunity is provided without distinction of gender, ethnicity, race or religion. Fair treatment is given to all employees, both in accepting and carrying out their duties.

The composition of employees is adjusted to the company's needs, while ensuring fairness in the work environment. Although the majority of employees are men, this is in line with the company's business needs, and there is no discrimination based on gender. The company also emphasizes its prohibition against child exploitation, ensuring that there are no employees under the productive age of 18 years. Efforts are made to ensure that there is no forced labor, and the company also encourages partners to follow similar principles



<p>Komparasi Upah Terendah Karyawan <i>Comparative Lowest Wages of Employees</i></p>	<p>100 % terhadap Upah Minimum <i>100 % of the Minimum Wage</i></p>
<p>Kesetaraan Gender <i>Gender Equality</i></p>	<p>18,75 % karyawan wanita <i>18.75 % female employees</i></p>
<p>Tenaga Kerja Paksa <i>Forced Labor</i></p>	<p>0 orang <i>0 people</i></p>
<p>Tenaga Kerja Anak <i>Child Labor</i></p>	<p>0 orang <i>0 people</i></p>

Pelatihan Dan Pendidikan

Setelah bergabung dengan Perseroan, karyawan diberikan kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan pribadi. Mereka terlibat dalam berbagai inisiatif dan proyek internal yang merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi. Program pelatihan dan pengembangan khusus juga diselenggarakan secara internal, termasuk pelatihan untuk memperdalam pemahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Paket Remunerasi yang Kompetitif

Kebijakan remunerasi Perseroan didesain dengan mempertimbangkan prinsip keadilan internal serta daya saing Perseroan dalam industri. Setiap tingkat jabatan dan fungsi diatur dengan jelas dalam struktur upah, yang mengacu pada standar minimum upah dan faktor-faktor seperti pengalaman kerja dan kontribusi individual. Perseroan juga memberikan kompensasi tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek. Selain itu, Perseroan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka melalui program pelatihan dan pendidikan, serta mengikutsertakan sejumlah karyawan dalam pelatihan bersertifikasi sebagai bagian dari dukungan Perseroan terhadap pertumbuhan profesional mereka.

Penekanan pada keseimbangan antara keadilan internal dan kompetitivitas industri tercermin dalam kebijakan remunerasi Perseroan. Dengan

Training And Education

After joining the Company, employees are given the opportunity to improve and develop their competencies in accordance with business needs and personal development. They are involved in various internal initiatives and projects that are part of the competency development program. Special training and development programs are also held internally, including training to deepen understanding of the products and services offered by the Company

Competitive Remuneration Package

The Company's remuneration policy is designed by considering the principles of internal justice and the Company's competitiveness in the industry. Each level of position and function is clearly regulated in the wage structure, which refers to minimum wage standards and factors such as work experience and individual contribution. The company also provides additional compensation in accordance with applicable regulations, including social security such as BPJS Health and BP Jamsostek. In addition, the Company provides opportunities for employees to develop their skills through training and education programs, as well as involving a number of employees in certified training as part of the Company's support for their professional growth.

The emphasis on a balance between internal justice and industry competitiveness is reflected in the Company's remuneration policy. By paying attention to aspects such as minimum wage level,

memperhatikan aspek-aspek seperti tingkat upah minimum, masa kerja, dan kontribusi individu, Perseroan menetapkan struktur upah yang adil untuk setiap tingkat jabatan dan fungsi. Selain itu, Perseroan juga memberikan tambahan kompensasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk jaminan sosial yang wajib dan program pelatihan untuk pengembangan karyawan. Melalui pendekatan ini, Perseroan berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan karyawan dan mendukung perkembangan karir mereka dalam lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Perseroan menegaskan pentingnya aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai prioritas tertinggi dalam operasinya. Perseroan menganggapnya sebagai tanggung jawab utama untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari kecelakaan. Lingkungan kerja, dalam konteks laporan ini, mencakup semua faktor di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka dengan Perseroan.

Semua pihak yang terlibat dalam operasional Perseroan, mulai dari karyawan hingga kontraktor pihak ketiga, diharuskan untuk mematuhi dan mengimplementasikan Sistem Manajemen K3. Tujuannya adalah untuk mencapai target nol kecelakaan di Perseroan, dengan memastikan bahwa setiap prosedur dan tahapan kerja dilakukan sesuai dengan aturan dan panduan K3 yang berlaku.

length of service and individual contribution, the Company determines a fair wage structure for each level of position and function. Apart from that, the Company also provides additional compensation in accordance with applicable regulations, including mandatory social security and training programs for employee development. Through this approach, the Company is committed to ensuring employee welfare and supporting their career development in a fair and sustainable environment.

Occupational Health And Safety (K3)

The Company emphasizes the importance of Occupational Health and Safety (K3) aspects as the highest priority in its operations. The Company considers it its primary responsibility to provide a work environment that is safe, comfortable and free from accidents. The work environment, in the context of this report, includes all factors surrounding employees that can influence the implementation of their duties with the Company.

All parties involved in the Company's operations, from employees to third party contractors, are required to comply with and implement the K3 Management System. The aim is to achieve the target of zero accidents in the Company, by ensuring that every procedure and work stage is carried out in accordance with applicable K3 rules and guidelines.

<p>Target Nihil - Kematian Akibat Kecelakaan Kerja <i>Target Zero - Deaths Due to Work Accidents</i></p>	<p>0 orang <i>0 people</i></p>
<p>Target Nihil - Kecelakaan Kerja <i>Target Zero - Work Accidents</i></p>	<p>0 orang <i>0 people</i></p>
<p>Target Nihil - Kehilangan Waktu Kerja <i>Target Zero - Lost Work Time</i></p>	<p>0 orang <i>0 people</i></p>



Perseroan juga mengupayakan kesejahteraan karyawan melalui pendekatan preventif dengan melaksanakan medical check-up secara rutin, menyediakan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan kerja, dan menyediakan fasilitas perawatan khusus. Selain itu, Perseroan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk pemeriksaan tingkat kebisingan fasilitas produksi secara berkala, penggunaan masker yang wajib bagi karyawan, pemeriksaan suhu tubuh, penyediaan sarana cuci tangan dan hand sanitizer di area kerja, penerapan physical distancing, penyemprotan desinfektan secara berkala, dan pelaksanaan program vaksinasi bagi karyawan.

The Company also strives for employee welfare through a preventive approach by carrying out regular medical check-ups, providing first aid when work accidents occur, and providing special care facilities. In addition, the Company implements strict health protocols, including regular inspection of noise levels in production facilities, mandatory use of masks for employees, body temperature checks, provision of hand washing facilities and hand sanitizers in work areas, implementation of physical distancing, regular spraying of disinfectants, and implementing a vaccination program for employees.

KETERLIBATAN MASYARAKAT

Community Engagement

Perseroan aktif mengambil langkah untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja dan memperkuat komunitas secara keseluruhan. Melalui program-program pengembangan sosial dan masyarakat yang berkelanjutan, Perseroan berupaya menciptakan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal yang tinggal di sekitar fasilitas Perseroan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta mempererat hubungan dengan komunitas setempat.

The Company actively takes steps to improve the comfort of the work environment and strengthen the community as a whole. Through sustainable social and community development programs, the Company strives to create prosperity and empower society as a whole, both from an economic, social and cultural perspective. One of the concrete steps taken is to prioritize the recruitment of local workers who live around the Company's facilities, supporting local economic growth and strengthening relationships with local communities.

Aktivitas pengembangan masyarakat yang dijalankan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Community development activities carried out in 2024 are as follows:



Publik Expose 2024



coaching Sales



RUPS 2024



coaching Sales



*Peresemian mesjid
raya citoh dan dkm*



*Peresemian mesjid
raya citoh dan dkm*



Sholat idul fitri di mesjid raya citoh



Mutu Produk Dan Keselamatan Pelanggan

Kualitas produk yang unggul adalah jaminan Perseroan untuk memberikan manfaat terbaik kepada pelanggan. Perseroan menekankan standar produksi yang tinggi untuk menghasilkan produk berkualitas terbaik yang memenuhi harapan konsumen. Selain itu, keselamatan dan kesehatan pelanggan juga menjadi fokus utama. Perseroan memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengunjungi lokasi perumahan sebelum melakukan pembelian, dengan harapan hal ini dapat signifikan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Pengaduan Masyarakat

Dalam upaya untuk mewujudkan keterbukaan dan transparansi, Perseroan menyediakan saluran pengaduan masyarakat terkait isu-isu sosial melalui surat atau email ke:

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

Jl. H. Junaedi No. 1
RT 12 RW 03,
Cipete Selatan, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410
Telepon : +62251 8574836
E-mail : corscec.tpg@gmail.com

Di sepanjang tahun 2023, tidak ada laporan keluhan terkait aspek sosial yang diterima oleh Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan tetap memperhatikan setiap umpan balik yang diterima sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas produk.

Kinerja Lingkungan

Perseroan menegaskan pentingnya pelestarian lingkungan dengan menjadikannya sebagai prioritas utama. Komitmen Perseroan adalah memastikan bahwa keberadaannya memberikan dampak positif yang signifikan pada lingkungan. Informasi tentang pencapaian aspek sosial keberlanjutan Perseroan dan langkah-langkah pemenuhan ESG (Environmental, Social, and Governance) tersedia dalam penjelasan berikut.

Product Quality And Customer Safety

Superior product quality is the Company's guarantee to provide the best benefits to customers. The Company emphasizes high production standards to produce the best quality products that meet consumer expectations. Apart from that, customer safety and health is also the main focus. The Company provides the opportunity for consumers to visit residential locations before making a purchase, with the hope that this can significantly increase customer satisfaction and loyalty.

Public Complaints

In an effort to realize openness and transparency, the Company provides a channel for public complaints regarding social issues via letter or email to:

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

Jl. H. Junaedi No. 1
RT 12 RW 03,
Cipete Selatan, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410
Phone : +62251 8574836
E-mail : corscec.tpg@gmail.com

Throughout 2023, there were no reports of complaints related to social aspects received by the Company. Nevertheless, the Company continues to pay attention to every feedback received as an opportunity to improve product quality.

Environmental Performance

The Company emphasizes the importance of environmental preservation by making it a top priority. The Company's commitment is to ensure that its existence has a significant positive impact on the environment. Information about achieving the social aspects of the Company's sustainability and steps to fulfill ESG (Environmental, Social, and Governance) is available in the following explanation.



Bahan Baku

Perseroan memverifikasi bahwa bahan bangunan yang digunakan untuk rumah serta fasilitas umum dan sosial tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan penghuni atau lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Perseroan memastikan bahwa pasokan bahan bangunan berasal dari sumber yang terpercaya dan aman.

Energi

Persediaan energi di fasilitas produksi Perseroan utamanya berasal dari pasokan listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perseroan menjamin ketersediaan pasokan listrik untuk semua rumah yang dibangun. Selain itu, untuk kantor Perseroan dan fasilitas umum serta sosial, Perseroan memastikan penggunaan energi listrik dilakukan dengan efisien agar tidak terjadi pemborosan. Sebagai langkah antisipasi, Perseroan memiliki generator set untuk menyediakan pasokan listrik dalam keadaan darurat jika pasokan listrik dari PLN terganggu.

Raw Material

The Company verifies that the building materials used for houses and public and social facilities do not contain hazardous materials that could harm residents or the surrounding environment. Therefore, the Company ensures that the supply of building materials comes from trusted and safe sources.

Energy

The energy supply at the Company's production facilities mainly comes from the electricity supply provided by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). The company guarantees the availability of electricity supply for all houses built. In addition, for the Company's offices and public and social facilities, the Company ensures that electrical energy is used efficiently to avoid waste. As an anticipatory measure, the Company has a generator set to provide electricity supply in an emergency if the electricity supply from PLN is disrupted.

Penggunaan Energi <i>Energy Uses</i>	2024	2023
Listrik PLN (KWh) <i>PLN Electricity (KWh)</i>	34.314,69 Kwh	31.790,75 Kwh
Energi Air (m3) <i>Waters Energy</i>	2.002.208 m3	2.224.675 m3

Emisi

Perseroan menetapkan standar emisi yang rendah untuk operasinya dan memastikan bahwa semua kontraktor proyek mematuhi regulasi emisi yang berlaku. Perseroan juga melakukan pengawasan internal terhadap tingkat emisi yang dihasilkan oleh kegiatan operasionalnya.

Air Dan Efluen

Perseroan menggunakan sumber air permukaan dan tanah untuk keperluan produksinya melalui sumur dalam yang dimilikinya. Limbah cair yang dihasilkan, termasuk air limbah dari dapur, dikelola dengan hati-hati. Sistem saluran air telah dipasang dengan baik untuk mencegah pembuangan limbah cair yang berbahaya bagi penghuni, karyawan, dan lingkungan sekitar.

Emission

Perseroan menetapkan standar emisi yang rendah untuk pengoperasiannya dan memastikan bahwa semua kontraktor proyek mematuhi regulasi emisi yang berlaku. Perseroan juga melakukan pengawasan internal terhadap tingkat emisi yang dihasilkan oleh kegiatan operasionalnya.

Water And Effluent

The Company uses surface air and ground sources for its production needs through its deep wells. The liquid waste produced, including waste water from the kitchen, is managed carefully. The air duct system has been properly installed to prevent the discharge of liquid waste which is dangerous for residents, employees and the surrounding environment.

Kriteria Pemanfaatan Volume Terambil (Ribuan M3) <i>Criteria for Utilization of Volume Taken (Thousand M3)</i>	2024	2023
Air Tanah <i>Groundwater</i>	Dimanfaatkan <i>Utilized</i>	Dimanfaatkan <i>Utilized</i>
Air Permukaan <i>Surface water</i>	Tidak dimanfaatkan <i>Not utilized</i>	Tidak dimanfaatkan <i>Not utilized</i>
Air Tadah Hujan <i>Rainfed Water</i>	Tidak dimanfaatkan <i>Not utilized</i>	Tidak dimanfaatkan <i>Not utilized</i>
Sumber Air Lain (PDAM) <i>Other Water Sources (PDAM)</i>	n/a	n/a
Jumlah <i>Total</i>	2.002.208 m3	2.021.553 m3



Limbah

Perseroan menghadapi kemungkinan risiko dari limbah domestik dan jenis limbah lainnya, termasuk limbah yang tercampur dengan air. Pengelolaan limbah domestik dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait. Sementara itu, limbah cair dikelola melalui water poolder, sehingga air yang telah bebas dari limbah dapat kembali dialirkan ke sungai.

Pengaduan Masyarakat

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

Jl. H. Junaedi No. 1
RT 12 RW 03,
Cipete Selatan, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410
Telepon : +62251 8574836
E-mail : corscec.tpg@gmail.com

Di sepanjang tahun 2023, tidak ada laporan keluhan terkait aspek lingkungan yang diterima oleh Perseroan.

Waste

The Company faces possible risks from domestic waste and other types of waste, including waste mixed with water. Domestic waste management is carried out in collaboration with relevant government agencies. Meanwhile, liquid waste is managed through a water poolder, so that water that is free from waste can be returned to the river.

Public Complaints

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

Jl. H. Junaedi No. 1
RT 12 RW 03,
Cipete Selatan, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410
Phone : +62251 8574836
E-mail : corscec.tpg@gmail.com

Throughout 2023, there were no reports of complaints related to environmental aspects received by the Company.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Stakeholder Engagement

Dalam menyusun Laporan Keberlanjutan, Perseroan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan. Identifikasi ini memungkinkan kami menentukan fokus isi dan topik yang relevan. Berdasarkan hasil identifikasi, kami dapat menetapkan sasaran pelaporan yang sesuai dengan kebijakan dan program perusahaan. Berikut adalah hasil identifikasi pemangku kepentingan dan rencana strategis yang kami jelaskan:

In preparing the Sustainability Report, the Company pays attention to the needs of stakeholders. This identification allows us to determine the content focus and relevant topics. Based on the identification results, we can set reporting targets that are in accordance with company policies and programs. The following are the results of stakeholder identification and the strategic plan that we explain:



Pemangku Kepentingan Stakeholders	Metode Pelibatan Engagement Method	Isu Penting Important Issues	Rencana Strategis Perseroan Company's Strategic Plans
<p>Pemegang Saham dan Investor <i>Shareholders and Investors</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Paparan publik; Akses informasi melalui situs web. <i>General Meeting of Shareholders (GMS);</i> <i>Public Expose;</i> <i>Access to information through a website.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan kinerja keuangan dan non-keuangan; Arah dan kebijakan strategis; Keberlanjutan usaha. <i>Financial and non-financial performance development;</i> <i>Strategic directives and policies;</i> <i>Business sustainability.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa; Pemutakhiran informasi kinerja operasional dan keuangan secara berkala; Penyusunan Laporan Tahunan; Pemutakhiran informasi perusahaan yang terdapat di situs web Perseroan; Penyelenggaraan investor gathering sesuai kebutuhan. <i>Organizing Annual GMS and Extraordinary GMS;</i> <i>Regularly updating the operational and financial performance information;</i> <i>Preparing Annual Report;</i> <i>Updating Company information on the Company's website;</i> <i>Organizing investor gatherings as needed.</i>
<p>Pemerintah dan Regulator <i>Government and Regulators</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan kinerja dan kepatuhan Perseroan; Melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. <i>Delivering the Company's performance and compliance reports;</i> <i>Making payments and tax reporting.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; Pemenuhan kewajiban perpajakan. <i>Compliance with the applicable regulations;</i> <i>Fulfillment of taxation obligations.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian laporan kinerja dan laporan kepatuhan; Pembayaran dan pelaporan pajak dan penerimaan negara bukan pajak



- *Submission of performance report and compliance report;*
- *Payment and reporting of taxes and non-tax state revenues.*

Karyawan
Employees

- Praktik kerja yang adil;
- Pengembangan kompetensi dan karier;
- Pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan kerja
- *Fair work practices;*
- *Competency development and career;*
- *Fulfillment of occupational health and safety aspect.*

- Pemenuhan hak ketenagakerjaan;
- Pemenuhan aspek K3;
- Pengembangan kompetensi dan karier;
- Kepuasan kerja.
- *Fulfillment of employees' rights;*
- *Fulfillment of OHS aspect*
- *Competency development and career;*
- *Job satisfaction.*

- Pemenuhan kontrak kerja dan perjanjian kerja bersama;
- Pemastian kecukupan sarana dan prasarana K3;
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pengembangan karier;
- Pemberian remunerasi yang kompetitif;
- Penyediaan sistem pengaduan pelanggaran sebagai sarana pelaporan terkait praktik tidak adil atau tidak sesuai dengan peraturan di lingkungan kerja;
- Penyampaian kebijakan terbaru perusahaan kepada seluruh karyawan.
- *Fulfilling work contracts and collective labor agreements;*
- *Ensuring the adequacy of OHS facilities and infrastructure;*
- *Conducting competency development, performance assessment, and career development;*



			<ul style="list-style-type: none">• <i>Providing competitive remuneration;</i>• <i>Setting up a whistleblowing system as a reporting channel related to unfair practices or not in accordance with the regulations in the work environment;</i>• <i>Conveying the latest Company policies to all employees.</i>
<p>Pelanggan <i>Customers</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Survei kepuasan pelanggan;</i>• <i>Sarana pengaduan pelanggan</i>• <i>Customer satisfaction survey;</i>• <i>Customer complaint channel</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Keandalan produk dan layanan;</i>• <i>Kesehatan dan keselamatan pelanggan;</i>• <i>Keamanan data/ informasi Pelanggan.</i>• <i>Product and service reliability;</i>• <i>Customer health and safety;</i>• <i>Customer data/ information security.</i>• <i>Business sustainability.</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Inovasi produk dan layanan yang menarik dan kompetitif;</i>• <i>Penyediaan situs web perusahaan yang informatif dan sarana pemasaran digital;</i>• <i>Pengelolaan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan;</i>• <i>Pengelolaan laporan pengaduan atas produk dan layanan.</i>• <i>Attractive and competitive product and service innovation;</i>• <i>Providing informative Company website and digital marketing tools;</i>• <i>Management of customer health and safety aspects;</i>• <i>Management of complaint reports on products and services.</i>



Mitra Usaha
Community

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- Penanganan dampak sosial;
- Penanganan dampak lingkungan.
- *Community economic empowerment;*
- *Managing social impact;*
- *Managing environmental impact*

- Informasi aktivitas Perseroan;
- Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal.
- *Information on the Company's activities;*
- *Improving the economic and social welfare of local communities.*

- Pemutakhirkan informasi pada situs web Perseroan secara berkala;
- Penggunaan tenaga kerja lokal;
- Pelaksanaan program CSR;
- Penyediaan sarana komunikasi dan pengaduan bagi masyarakat.
- *Updating information on the Company's website regularly;*
- *Use of local workers;*
- *Implementation of CSR programs;*
- *Providing communication and complaint channel for the community.*

Media Massa
Mass Media

- Paparan publik;
- Media gathering; serta
- Keterbukaan informasi pada situs web.
- *Public expose;*
- *Media gathering; and*
- *Disclosure of information on the website*

- Kinerja dan aktivitas Perseroan.
- *The Company's performance and activities*

- Pelaksanaan paparan publik dan media gathering sesuai kebutuhan;
- Pemutakhirkan informasi pada situs web Perseroan secara berkala;
- Penyampaian informasi pada media harian berperedaran nasional.
- *Implementation of public expose and media gathering as needed;*
- *Regularly updating information on the Company's website;*
- *Publishing information on daily nationwide media.*



Target Dan Pengembangan Di 2025

Untuk tahun 2025, Perseroan menetapkan target pertumbuhan pendapatan sekitar Rp 49 miliar lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya, yang setara dengan kenaikan sebesar 200% dari jumlah tahun 2024 atau mencapai Rp 73 miliar. Sementara itu, diharapkan laba bersih juga akan mengalami peningkatan lebih dari 25%, sejalan dengan target penjualan Perseroan yang diperkirakan melebihi 100%.

Komitmen Keberlanjutan

Perseroan menganggap keberlanjutan sebagai kesinambungan operasional yang berkesinambungan meskipun dihadapkan pada tantangan. Untuk mencapai hal ini, Perseroan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya selalu berjalan sejalan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Dengan menganalisis isu-isu krusial yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis, Perseroan merumuskan tanggapan yang sesuai untuk memenuhi tuntutan mereka.

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan guna memberikan nilai maksimal kepada Pemegang Saham. Ini dicapai melalui inovasi produk, diversifikasi, ekspansi pasar, dan penggunaan sumber daya yang efisien di seluruh bisnisnya. Fokusnya adalah menjaga kualitas produk dan layanan kepada pelanggan, memberdayakan tenaga kerja dengan adil, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua karyawan. Perseroan juga memprioritaskan keterlibatan karyawan dan pemasok lokal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di area operasional.

Target And Development In 2025

For 2025, the Company has set a revenue growth target of around IDR 49 billion, higher than the previous year's achievement, which is equivalent to an increase of 200% from the amount in 2024 or reaching IDR 73 billion. Meanwhile, it is hoped that net profit will also increase by more than 25%, in line with the Company's sales target which is estimated to exceed 100%.

Commitment To Sustainability

The Company considers sustainability as continuous operational continuity even when faced with challenges. To achieve this, the Company implements appropriate strategies to ensure that its business activities always run in line with the needs of stakeholders. By analyzing crucial issues that can affect business sustainability, the Company formulates appropriate responses to meet their demands.

The Company is committed to improving operational and financial performance in order to provide maximum value to Shareholders. This is achieved through product innovation, diversification, market expansion and efficient use of resources across its business. The focus is on maintaining the quality of products and services to customers, empowering the workforce fairly, and creating a safe and comfortable work environment for all employees. The Company also prioritizes the involvement of local employees and suppliers to encourage community welfare in operational areas.



Pengembangan Teknologi Informasi

I. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TI

- Peningkatan Security Data Center Perseroan dengan implementasi Redundant Server.
- Peningkatan skalabilitas akses data Perseroan dengan Private Cloud.
- Peningkatan Aplikasi ERP (Enterprise Resources Planning) Perseroan.

II. PENGEMBANGAN SDM

- Peningkatan Kompetensi Karyawan dengan Pelatihan Aplikasi ERP E-IPRO & CRM.
- Peningkatan pengetahuan karyawan dengan Mengikuti Seminar & Training Teknologi Informasi terkini yang relevan.

Pengembangan Aset Dan Fasilitas

Selama tahun 2024 Perseroan melaksanakan pengembangan aset dan fasilitas sebagai berikut:

- Pembukaan cluster baru di kawasan Cibungbulang Town Hills, pada segmentasi komersial 2 lantai.
- Peluncuran konsep baru perumahan subsidi dengan spesifikasi di atas standar.
- Peresmian fasilitas umum di kawasan Cibungbulang Town Hills berupa rumah ibadah.

KEANGGOTAAN ASOSIASI

Laporan Keberlanjutan ini tidak dimintakan verifikasi oleh pihak independen.

Formulir Umpan Balik telah disediakan pada bagian akhir dari Laporan Tahunan dan Keberlanjutan ini.

Information Technology Development

I. IT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

- *Increasing the Company's Security Data Center with the implementation of Redundant Server.*
- *Increasing the Company's data access scalability with a private cloud.*
- *Improving the Company's ERP (Enterprise Resources Planning) application.*

II. HR DEVELOPMENT

- *Improving employees' competencies with E-IPRO & CRM ERP Application Training.*
- *Increasing employee knowledge by attending relevant information technology seminars & training.*

Assets And Facilities Development

During 2024, the Company has carried out the following asset and facility developments:

- *Opening of a new cluster in the Cibungbulang Town Hills area, in the 2-story commercial segmentation.*
- *Launching a new concept of subsidized housing with above-standard specifications.*
- *Inauguration of public facilities in the Cibungbulang Town Hills area in the form of houses of worship.*

ASSOCIATION MEMBERSHIP

This Sustainability Report is not requested verification by an independent party.

A Feedback Form has been provided at the end of this Annual and Sustainability Report.

Daftar Referensi Silang dengan POJK NO.51/POJK.03/2017

List of Cross References with POJK NO.51/POJK.03/2017

No. Indeks Indeks No.	Aspek Keberlanjutan Aspect of Sustainability	Halaman Page
A. Strategi Keberlanjutan / Sustainability Strategy		
A.1.	Penjelasan Strategi Keberlanjutan / Explanation of Sustainability Strategy	145
B. Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan / Sustainability Performance Overview		
B.1.	Aspek Ekonomi / Economic Aspect	145
B.2.	Aspek Lingkungan Hidup / Environmental Aspect	146
B.3.	Aspek Sosial / Social Aspect	146
C. Profil Perusahaan / Company Profile		
C.1.	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan / Sustainability Vision, Mission and Values	34
C.2.	Alamat Perusahaan / Company Address	28
C.3.	Skala Usaha / Business Scale	31
C.4.	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan / Products, Services, and Business Activities Executed	35
C.5.	Keanggotaan pada Asosiasi / Membership in the Association	37
C.6.	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan / Significant Changes in Issuers and Public Companies	N/A
D. Penjelasan Direksi / Explanation of the Board of Directors		
D.1	Penjelasan Direksi / Explanation of the Board of Directors	22-25
E. Tata Kelola Keberlanjutan / Sustainability Governance		
E.1.	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan / Responsible for Implementing Sustainable Finance	147
E.2.	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan / Competency Development Related to Sustainable Finance	147
E.3.	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan / Risk Assessment of the Implementation of Sustainable Finance	118
E.4.	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan / Relations with Stakeholders	138
E.5.	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan / Problems Against the Implementation of Sustainable Finance	N/A
F. Kinerja Keberlanjutan / Sustainability Performance		
F.1.	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan / Culture Building Activities	N/A
Kinerja Ekonomi / Economic Performance		
F.2.	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi / Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Financing Targets, or Investment, Income and Profit and Loss	N/A
F.3.	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan / Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects in Line with Sustainable Finance	N/A
Kinerja Lingkungan Hidup / Environmental Performance		
Aspek Umum / General Aspect		
F.4.	Biaya Lingkungan Hidup / Environmental Costs	156
Aspek Material / Material Aspect		
F.5.	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan / Use of Environmentally Friendly Materials	146
Aspek Energi / Energy Aspect		
F.6.	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan / Total and Intensity of Energy Used	156
F.7.	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan / Efforts and Achievements of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy	156
Aspek Air / Water Aspect		
F.8.	Penggunaan Air / Water Usage	157
Aspek Keanekaragaman Hayati / Aspects of Biodiversity		
F.9.	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati / Impacts from Operational Areas that are Near or Located in Conservation Areas or Having Biodiversity	156
F.10.	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati / Biodiversity Conservation Business	156
Aspek Emisi / Emission Aspect		
F.11.	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya / Total and Intensity of Emissions Generated by Type	157
	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan / Efforts and Achievements of Emission Reduction	



No .indeks Indeks No.	Aspek Keberlanjutan Aspect of Sustainability	Halaman Page
Aspek Limbah Dan Efluen / Aspects of Waste and Effluent		
F.13.	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis / Total Waste and Effluent Generated by Type	158
F.14.	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen / Waste and Effluent Management Mechanism	158
F.15.	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) / Occurring Spills (if any)	158
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup / Aspects of Complaints Related to the Environment		
F.16.	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan. / Number and Material of Environmental Complaints Accepted and Completed.	N/A
Kinerja Sosial / Social Performance		
F. 17.	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen / Commitment to Provide Services on Equal Products and/or Services to Consumers Employment Aspect	163
Aspek Ketenagakerjaan / Employment Aspect		
F.18.	Kesetaraan Kesempatan Bekerja / Equal Employment Opportunity	163
F.19.	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa / Child Labor and Forced Labor	150
F.20.	Upah Minimum Regional / Regional minimum wage	151
F.21.	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman / Decent and Safe Work Environment	151
F.22.	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai / Employee Capability Training and Development Community Aspect	44
Aspek Masyarakat / Community Aspect		
F.23.	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar / Impact of Operations on Surrounding	97
F.24.	Pengaduan Masyarakat / Community Complaints	100
F.25.	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) / Environmental Social Responsibility Activities (TJSL)	44
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan / Sustainable Product/Service Development		
F.26.	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan / Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services	150
F.27.	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan / Products/Services That Have Been Evaluated For Safety For Customers	55
F.28.	Dampak Produk/Jasa / Product/Service Impact	60
F.29.	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali / Number of Product Recalls	44
F.30.	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan / Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services	28
G. Lain-lain: / Others		
G.1.	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) / Written Verification from Independent Party (if any)	N/A
G.2.	Lembar Umpan Balik / Feedback Sheet	168
G.3.	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya / Responses to Feedback on the Previous Year's Sustainability Report	168
G.4.	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. / List of Disclosures According to the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.	165

**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan 2024
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND TBK**

**Statement Letter from Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the 2024 Annual and Sustainability Report
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Keberlanjutan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk tahun 2024 telah dibuat secara benar dan lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan ini.

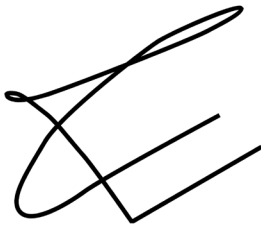
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

We, the undersigned, declare that all information in the 2024 Annual and Sustainability Report of PT Trimitra Prawara Goldland Tbk has been prepared correctly and completely, and we are fully responsible for the correctness of the contents of this report.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 28 April 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE
Komisaris Utama
President Commissioner



Nadia Husna Humaira
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors



Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak
Direktur Utama
President Director



Rachmat Yaktihadi
Direktur
Director



Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya
Response to Feedback of Previous Year's Sustainability Report

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak mendapatkan umpan balik atas Laporan Keberlanjutan Tahun 2023.

Throughout 2023, the Company did not receive any feedback regarding the 2022 Sustainability Report.

Lembar Umpan Balik Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Tahun 2024
Feedback Form of Annual and Sustainability Report 2024

Setelah membaca Laporan Tahunan dan Keberlanjutan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, kami mohon dengan hormat kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik dengan mengirim e-mail atau mengirim formulir ini melalui fax / pos.

After reading the Annual and Sustainability Report of PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, we kindly request the willingness of stakeholders to provide feedback by sending an e-mail or sending this form by fax / post.

<p>Pertanyaan <i>Questions</i></p>	<p>Setuju <i>Agree</i></p>	<p>Tidak Setuju <i>Disagree</i></p>
<p>Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan. <i>This Report has provided useful information on the economic, social, and environmental performances of the Company.</i></p>		
<p>Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang. <i>The disclosed data and information are easy to understand, complete, transparent, and balanced.</i></p>		
<p>Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan. <i>The presented data and information are useful in making decisions.</i></p>		
<p>Laporan ini menarik dan mudah dibaca <i>This report is interesting and easy to read.</i></p>		



Mohon berikan nilai mengenai aspek yang terdapat dalam laporan ini (nilai 1 = paling penting, 2 = penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting).

Please rate the aspects contained in this report (1 = most important, 2 = important, 3 = not important, 4 = very unimportant).

() | **Kinerja Ekonomi**
Economic Performance

() | **Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan**
Customer Health and Safety

() | **Produk dan Jasa**
Products and Services

() | **Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan**
Use of Environmentally-Friendly Materials

() | **Anti Korupsi dan Anti Fraud**
Anti-Corruption and Anti-Fraud

() | **Penggunaan Energi**
Energy Use

() | **Ketenagakerjaan**
Employment

() | **Penggunaan Air**
Water Use

() | **Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
Occupational Health and Safety

() | **Pengelolaan Limbah**
Waste Management

() | **Pengembangan Masyarakat**
Community Development

() | **Pengurangan Emisi**
Emission Reduction

Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi laporan ini

Please provide comments/suggestions/recommendations for this report.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Profil Anda
Your Profile

Nama :

Name

Pekerjaan :

Occupation

Institusi/Perusahaan :

Institution/Company

Kontak (telepon, e-mail) :

Contact (telephone, e-mail)

Kategori Pemangku Kepentingan
Stakeholders Category

Pemerintah / *Government*

Media

Pelanggan / *Customer*

Masyarakat / *Community*

Karyawan / *Employee*

LSM / *NGO*

Mitra Usaha / *Business Partners*

Lain-Lain / *Others, _____*

Mohon kirimkan saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini kepada:

Please send your suggestions and comments on the information presented in this report to:

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.
Jl. H. Junaedi No.1 RT 12 RW 03,
Cipete Selatan, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410
Telepon: +62-251-8574836
E-mail: corscec.tpg@gmail.com





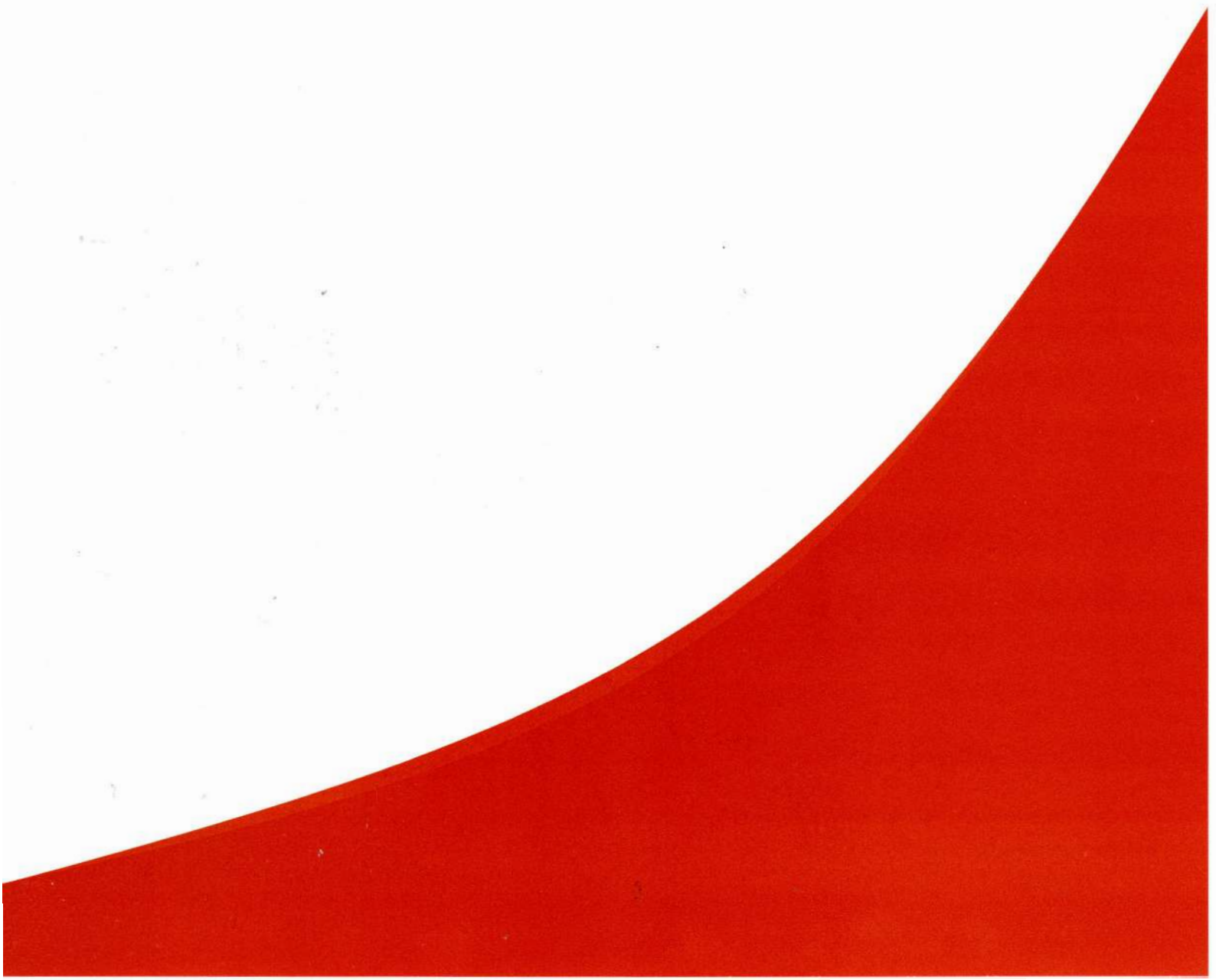
MASJID RAYA CITO H

BAB **07**
LAPORAN
KEUANGAN
FINANCIAL REPORT

**LAPORAN KEUANGAN
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND, Tbk.

**Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023**





PT. TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND, Tbk.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Indriati SE. M.Si, Ak
Alamat kantor : Jl. H Junaedi, Komp Pertamina No.1, RT12, RW 003
Nomor telepon : (021) 8574836
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Rachmat Yaktihadi
Alamat kantor : Jl. Taman Cimanggu Selatan No. 12A, Kel. Kedung Waringin
Kec. Tanah Sereal Kota Bogor

Nomor telepon : (021)
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar,
b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2025

Direktur Utama

Direktur

Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak

Rachmat Yaktihadi

Prawara
Tbk.

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	i-v
Laporan Posisi Keuangan	1a-1b
Laporan Laba Rugi Komprehensif	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5-47

Laporan Auditor Independen

No : 00010/3.0360/AU.1/03/1806-3/1/II/2025

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Trimitra Prawara Goldland, Tbk.**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk., yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan tahun ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan Pendapatan

Lihat ke Catatan 2n – Kebijakan Akuntansi Material atas Pengakuan Pendapatan dan Catatan 24 – Pendapatan Usaha.

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 14,19 miliar. Pendapatan Perusahaan terutama berasal dari penjualan persediaan rumah tinggal sebesar Rp 13,78 miliar atau sebesar 97,08% dari jumlah pendapatan.

Kami menganggap proses, kebijakan dan prosedur pengakuan penjualan rumah tinggal signifikan bagi audit kami karena hal ini melibatkan penerapan pertimbangan dan estimasi signifikan dalam aspek-aspek berikut: a) penentuan harga transaksi; dan b) pengakuan pendapatan pada suatu titik waktu berdasarkan pengalihan pengendalian aset pada suatu titik waktu tertentu (pemenuhan kewajiban pelaksanaan pada suatu titik waktu tertentu).

Dalam penentuan harga transaksi, Perusahaan mempertimbangkan apakah harga jual dari persediaan real estat termasuk komponen pembiayaan yang signifikan.

Perusahaan juga mengevaluasi kapan pengendalian atas persediaan telah dialihkan ke pelanggan sebagai dasar penentuan pengakuan penjualan, yakni pengakuan pada suatu titik waktu atau sepanjang waktu. Pendapatan dari penjualan persediaan diakui pada suatu titik waktu pada saat persediaan diserahkan kepada pelanggan. Penentuan waktu pengakuan penjualan membutuhkan pertimbangan apakah Perusahaan telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan persediaan secara signifikan kepada pelanggan dan apakah Perusahaan masih memiliki keterlibatan yang berkelanjutan atas persediaan.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

- Kami menilai keseluruhan proses penjualan serta sistem dan desain pengendalian yang relevan atas perolehan dan pencatatan transaksi pendapatan. Kami telah menguji keefektifan pengendalian utama pada proses yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan melakukan pengujian rinci atas sampel transaksi penjualan.
- Kami membaca kontrak penjualan dan menerapkan pemahaman kami tentang kontrak ini dalam menilai kelengkapan dan akurasi pendapatan. Secara khusus, pemahaman kami juga memungkinkan kami untuk mengevaluasi pertimbangan yang digunakan dalam menentukan waktu pengakuan pendapatan.
- Dalam penentuan harga transaksi, kami memilih sampel kontrak dari data kontrak penjualan dan mengidentifikasi ketentuan pembayaran. Kami menelusuri kontrak terpilih ini ke perhitungan komponen pembiayaan yang disiapkan oleh manajemen, yang meliputi perhitungan apakah komponen pembiayaan dari kontrak Perusahaan dengan pelanggan adalah signifikan. Kami menguji perhitungan komponen pembiayaan yang disiapkan oleh manajemen.

Penilaian Persediaan

Lihat ke Catatan 2e – Kebijakan Akuntansi Material atas Persediaan, dan Catatan 6 – Persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah persediaan Perusahaan sebesar Rp 69,60 miliar. Persediaan rumah tinggal dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Pada tanggal 31 Desember 2024, tanah kavling dan bangunan yang siap dijual masing-masing sejumlah Rp 56,05 miliar dan Rp 8,04 miliar dan bangunan yang sedang dalam penyelesaian sejumlah Rp 5,51 miliar.

Kami fokus pada area ini karena penentuan estimasi nilai realisasi bersih dari persediaan sangat tergantung pada ekspektasi Perusahaan atas harga jual persediaan di masa mendatang. Fluktuasi pada harga properti dan perubahan dari permintaan atas properti dapat menghasilkan penurunan signifikan pada nilai realisasi bersih. Selain itu, klasifikasi lancar dan tidak lancar atas persediaan membutuhkan pertimbangan manajemen.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

- Kami mereviu penelaahan manajemen mengenai apakah terdapat indikasi penurunan nilai persediaan Perusahaan. Kami melakukan diskusi mendetail dengan manajemen kunci Perusahaan dan mempertimbangkan pandangan mereka tentang kemungkinan penurunan nilai persediaan Perusahaan sehubungan dengan lingkungan ekonomi saat ini.

- Kami fokus pada persediaan dengan penjualan yang lebih lambat dan membandingkan harga jual dengan harga transaksi terbaru dari properti sebanding yang terletak di lokasi yang sama dengan proyek Perusahaan.
- Kami mengunjungi lokasi persediaan, berdasarkan uji petik untuk memastikan keberadaan persediaan.
- Kami memahami kebijakan Perusahaan dan mengevaluasi proses identifikasi atas klasifikasi lancar dan tidak lancar atas persediaan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain dan kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

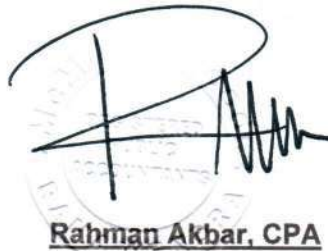
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
RAMA WENDRA



Rahman Akbar, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. : AP.1806



Tangerang, 28 Februari 2025



PT. TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND, Tbk.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	2c, 4, 31a, 32d	8.035.323.770	10.962.350.659
Aset keuangan lancar lainnya - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	2d, 2p, 5, 32d	4.530.072.511	8.730.514.159
Persediaan real estat	2e, 6	69.608.341.015	66.326.375.332
Pajak dibayar dimuka	2o, 12a	1.654.250	1.914.000
Uang muka	7	16.056.272.567	14.798.158.446
Jumlah Aset Lancar		98.231.664.113	100.819.312.596
Aset Tidak Lancar			
Tanah yang belum dikembangkan	2f, 8	-	3.602.233.092
Properti investasi	2g, 9	818.157.633	864.957.633
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2h, 10	7.706.794.865	8.144.943.599
Aset tak berwujud	2i, 11	187.852.291	341.216.041
Jumlah Aset Tidak Lancar		8.712.804.789	12.953.350.365
JUMLAH ASET		106.944.468.902	113.772.662.961

Jakarta, 28 Februari 2025

Direvisi oleh


Manager FAT

Disetujui oleh


**PT. Trimitra Prawara
Goldland, Tbk.**
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PT. TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND, Tbk.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	2j, 13, 32c, 32d	934.155.688	703.738.123
Utang bank jangka pendek	14, 33c, 32d	12.650.000.000	14.650.000.000
Utang lain-lain pihak ketiga	2j, 15, 32d	121.622.221	63.726.745
Utang pajak	2o, 12b	5.086.541	420.263.791
Pendapatan diterima dimuka	2l, 16	2.149.491.227	3.439.319.847
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		15.860.355.677	19.277.048.506
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
- Utang bank	17, 32c	13.288.800.000	14.441.900.000
Utang pihak berelasi	2k, 18, 31a	-	195.345.291
Liabilitas imbalan pasca kerja	2p, 19	140.390.467	268.060.031
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		13.429.190.467	14.905.305.322
Jumlah Liabilitas		29.289.546.144	34.182.353.828
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal Rp40 per saham pada 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal dasar sebanyak 4.000.000.000 saham pada 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.250.000.000 saham pada 31 Desember 2024 dan 2023			
	2m, 20	50.000.000.000	50.000.000.000
Tambahan modal disetor	21	12.227.500.000	12.227.500.000
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya	22b	500.000.000	400.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	22a	14.682.520.312	16.891.849.593
Pendapatan komprehensif lainnya:			
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	23	244.902.446	70.959.540
Jumlah Ekuitas		77.654.922.758	79.590.309.133
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		106.944.468.902	113.772.662.961

Jakarta, 28 Februari 2025

Direvisi oleh

Manager FAT

Disetujui oleh

PT. Trimitra Prawara
Goldland, Tbk.
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PT. TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND, Tbk.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PENDAPATAN USAHA	2n, 24	14.195.032.272	23.653.459.265
BEBAN POKOK PENJUALAN	2n, 25	(8.753.382.196)	(14.604.926.534)
LABA KOTOR		5.441.650.076	9.048.532.731
Beban penjualan	2n, 26	(515.848.462)	(961.665.303)
Beban umum dan administrasi	2n, 27	(4.505.236.293)	(5.158.805.279)
Beban pajak penghasilan final	2o, 12d	(280.810.666)	(535.724.868)
Beban pajak	2o, 12d	(368.030.708)	(425.420.095)
Beban keuangan	2n, 29	(2.280.731.446)	(1.798.964.958)
Pendapatan (beban) lain-lain	2n, 28	399.678.218	(5.128.499)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(2.109.329.281)	162.823.729
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN			
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(2.109.329.281)	162.823.729
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
- Keuntungan/(kerugian) aktuarial imbalan pasca kerja	2p, 19	173.942.906	(40.794.780)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		173.942.906	(40.794.780)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(1.935.386.375)	122.028.949
Laba (rugi) bersih per saham dasar	2r, 30	(1,69)	0,13

Jakarta, 28 Februari 2025

Direviu oleh


Manager FAT

Disetujui oleh


PT. Trimitra Prawara Goldland, Tbk.
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PT. TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Saham	Tambahhan Modal Disetor	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
					Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Saldo per 1 Januari 2023	20, 21, 22, 23	50.000.000.000	12.227.500.000	111.754.320	300.000.000	16.979.025.864	79.618.280.184
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	162.823.729	162.823.729
Dividen kas		-	-	-	-	(150.000.000)	(150.000.000)
Pembentukan cadangan umum		-	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-
Penghasilan komprehensif lain		-	-	(40.794.780)	-	-	(40.794.780)
Saldo per 31 Desember 2023	20, 21, 22, 23	50.000.000.000	12.227.500.000	70.959.540	400.000.000	16.891.849.593	79.590.309.133
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	(2.109.329.281)	(2.109.329.281)
Pembentukan cadangan umum		-	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-
Penghasilan komprehensif lain		-	-	173.942.906	-	-	173.942.906
Saldo per 31 Desember 2024	20, 21, 22, 23	50.000.000.000	12.227.500.000	244.902.446	500.000.000	14.682.520.312	77.654.922.758

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PT. TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND, Tbk.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi:			
Penerimaan dari pelanggan		17.105.645.298	25.634.326.759
Pengembangan dan pembelian tanah		(3.364.884.646)	(6.133.150.655)
Pembayaran untuk konstruksi dan pemasok		(9.698.159.789)	(14.526.369.882)
Pembayaran beban operasi		(1.546.521.227)	(5.421.078.786)
Pembayaran bunga pinjaman		(2.280.731.446)	(1.798.964.958)
Pembayaran untuk pajak		(1.063.758.874)	(1.153.590.056)
Penerimaan/(pembayaran) lainnya		1.091.521.849	(35.338.855)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		243.111.165	(3.434.166.433)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:			
Perolehan aset tetap		(21.538.054)	(46.102.500)
Penjualan aset tetap		4.500.000	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(17.038.054)	(46.102.500)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:			
Penerimaan pinjaman bank		-	5.113.700.000
Pembayaran pinjaman bank		(3.153.100.000)	(5.094.900.000)
Pembayaran deviden		-	(150.000.000)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		(3.153.100.000)	(131.200.000)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		(2.927.026.889)	(3.611.468.933)
Kas dan setara kas pada awal tahun		10.962.350.659	14.573.819.592
Kas dan setara kas pada akhir tahun	2c, 4, 31a, 32d	8.035.323.770	10.962.350.659

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No.13 tanggal 23 Maret 2015 di hadapan Dede Munajat, S.H notaris di Bogor. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014092.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0036507.AH.01.011 Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 39 dan Tambahan Berita Negara No. 27165 Tahun 2015.

Berdasarkan Akta No. 138 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Christina S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat antara lain menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan, menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan dan menyetujui penggunaan sebagian laba ditahan (saldo laba) Perusahaan sampai dengan tahun buku 2019, yaitu sebesar Rp27.500.000.000 (dua tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen saham kepada para pemegang saham secara proporsional.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 139 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Christina S.H., M.Hum., M.Kn. notaris di Jakarta Barat, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0048003.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Juli 2020, serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU AH.01.03-0288988 tanggal 14 Juli 2020. Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain mengenai persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui dan merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp12.500.000.000 menjadi sebesar Rp160.000.000.000, dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp12.500.000.000 menjadi sebesar Rp40.000.000.000, serta merubah nilai nominal masing-masing saham dari sebesar Rp1.000.000 menjadi sebesar Rp40. Dalam peningkatan modal tersebut telah menerbitkan sebanyak 687.500.000 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp40, sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,00, yang merupakan dividen saham yang berasal dari sebagian laba ditahan (saldo laba) Perseroan sampai dengan tahun buku 2019.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha real estat yang dimiliki atau disewa. Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri, pembagian real estat menjadi tanah kavling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2015. Pada saat ini, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah bergerak di bidang pengembangan properti.

Perusahaan memiliki satu proyek yang sedang berjalan yaitu proyek Perumahan Cibungbulang Town Hill yang berlokasi di Desa Cibatok dan Desa Cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Perusahaan berdomisili di Jl. H.Junaedi Komp. Pertamina Nomor 1, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Entitas induk Perusahaan per 31 Desember 2024 adalah PT Trimitra Prawara.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 susunan entitas langsung dan tidak langsung perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Perseroan	Domisili	Persentase kepemilikan
PT Trimitra Prawara ¹	Palangkraya	76%

1. Dimiliki masing-masing oleh Ny. Indriati sebesar 95% dan Tn. Yoyo Sugeng Triyogo Sebesar 5%

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan telah menyelesaikan Penawaran Umum Perdana atas 250.000.000 saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp40 (Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran sebesar Rp100 (Rupiah penuh) per saham, serta mulai efektif berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-279/D.04/2020 tanggal 30 November 2020. Pencatatan penawaran umum saham tersebut dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Desember 2020.

c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Berdasarkan akta No. 146 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn. notaris di Jakarta Selatan dan akta No. 139 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Christina S.H., M.Hum., M.Kn. notaris di Jakarta Barat, susunan dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris	: Tn. Yoyo Sugeng Triyogo	Tn. Yoyo Sugeng Triyogo
Komisaris Independen	: Nn. Nadia Hasna Humaira	Tn. Dece Kurniadi
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	: Ny. Indriati	Ny. Indriati
Direktur	: Tn. Rachmat Yaktihadi	Tn. Rachmat Yaktihadi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 001/SK-Dekom/TPG/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang pengangkatan Komite Audit dengan susunan komite audit dan anggota komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Nadia Hasna Humaira
Anggota	: Aditya Surya Tjahjana Putra
Anggota	: Hary Alamsyah

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing berjumlah 6 dan 6 orang.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan berjumlah Rp564.000.000 dan Rp Rp570.000.000.

d. Tanggung Jawab Manajemen atas Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Manajemen menyelesaikan laporan tersebut pada tanggal 28 Februari 2025.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi – Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia – dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (lanjutan)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 201 (Revisi 2024), "Penyajian Laporan Keuangan".

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

Standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen dan penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, namun tidak berdampak secara material terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 : "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"; dan "Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan";
- Amendemen PSAK. 116 : "Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik";
- Amendemen PSAK 207 : "Laporan Arus Kas" dan Amendemen PSAK 107 : "Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok".

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya

c. Kas dan Setara Kas

Berdasarkan PSAK No. 207 : Laporan Arus Kas, kas dan setara kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposit*) dan investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

d. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang diperoleh dari bank melalui metode penjualan Kredit Pemilikan Rumah ("KPR") yang dibatasi penggunaannya oleh Perusahaan sampai dengan pengakuan konstruksi tahap-tahap tertentu dicapai tergantung pada kesepakatan pada bank terkait.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Persediaan Real Estat

Persediaan real estat, yang terutama terdiri dari tanah yang akan dikembangkan, unit bangunan siap jual dan unit bangunan dalam penyelesaian, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perolehan atas tanah dalam pengembangan termasuk biaya pengembangan dan pematangan tanah.

Properti yang diperoleh atau yang sedang dalam penyelesaian untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, tidak untuk sewa atau kenaikan nilai, merupakan persediaan.

Biaya perolehan tanah sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan, biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada kegiatan pengembangan real estat serta biaya-biaya pinjaman. Tanah yang sedang dikembangkan dipindahkan ke tanah yang tersedia untuk dijual pada saat pengembangan tanah telah selesai. Semua biaya proyek dialokasikan secara proporsional ke tanah yang dapat dijual berdasarkan luas area masing-masing.

Biaya pengembangan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai jalan dan prasarana atau area yang tidak dapat dijual lainnya, dialokasikan menggunakan luas area yang dapat dijual.

Biaya perolehan bangunan dalam penyelesaian dipindahkan ke rumah, bangunan komersial (*strata title*) tersedia untuk dijual pada saat pembangunan telah selesai.

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah:

- Biaya praperolehan tanah;
- Biaya perolehan tanah;
- Biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat;

Biaya yang dialokasikan sebagai beban proyek adalah:

- Biaya pra-perolehan tanah atas tanah yang tidak berhasil diperoleh;
- Kelebihan biaya dari hasil yang diperoleh atas pembangunan sarana umum yang dikomersilkan, yang dijual atau dialihkan, sehubungan dengan penjualan unit.

Pengkajian atas estimasi dan alokasi biaya dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan sampai proyek selesai secara substansial. Jika terjadi perubahan mendasar Perusahaan akan melakukan revisi dan relokasi biaya.

Beban yang diakui di laba rugi pada saat terjadinya adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proyek real estat.

Tanah yang dimiliki oleh Perusahaan untuk pengembangan di masa yang akan datang, disajikan sebagai "Tanah yang belum dikembangkan" di bagian aset di laporan posisi keuangan. Pada saat dimulainya pengembangan dan pembangunan infrastruktur, nilai tanah tersebut akan diklasifikasikan sebagai persediaan, properti investasi atau aset tetap, mana yang lebih sesuai.

Selisih lebih nilai tercatat persediaan atas estimasi jumlah terpulihkannya diakui sebagai rugi penurunan nilai sebagai "Penyisihan atas Penurunan Nilai Persediaan" dalam laba rugi.

f. Tanah yang Belum Dikembangkan

Tanah yang belum dikembangkan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan, yang terdiri dari biaya pra-perolehan dan perolehan tanah, dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pengembangan tanah akan dimulai dan konstruksi dilakukan.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Properti Investasi

Perusahaan menerapkan PSAK 240: Properti Investasi. Properti investasi Perusahaan merupakan properti yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif, atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Perusahaan telah memilih metode biaya untuk pengukuran properti investasinya. Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat ekonomis properti investasi sampai 20 tahun, kecuali untuk tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Perusahaan mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat bukti atas perubahan penggunaan. Perubahan penggunaan terjadi ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi. Bukti yang mendukung perubahan penggunaan yang akan mengarah untuk pengalihan kepada properti investasi, antara lain, dengan penghentian penggunaan pemilik atau dimulainya suatu sewa operasi kepada pihak lain. Selanjutnya, bukti yang mendukung perubahan penggunaan yang akan mengarah untuk pengalihan dari properti investasi, antara lain, dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik maupun dimulainya rencana penjualan properti. Jika properti yang dimiliki oleh Perusahaan dijadikan sebagai properti investasi, Perusahaan memperhitungkan properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang dinyatakan dalam aset tetap sampai dengan tanggal perubahan penggunaannya.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

h. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK 216: Aset Tetap.

Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Estimasi awal biaya pembongkaran atau pemindahan aset tetap ditambahkan sebagai biaya perolehan.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Masa Manfaat	% Penyusutan
Inventaris Kantor	4 - 8 Tahun	25% - 12,5%
Kendaraan	8 Tahun	12,5%
Bangunan	20 Tahun	5%

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, metode penyusutan dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika perlu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu pelayanan atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset dalam Pembangunan

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Biaya pinjaman, termasuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing sejauh bahwa selisih kurs adalah penyesuaian terhadap biaya bunga yang dikeluarkan khusus untuk mendanai pembangunan, dikapitalisasi selama periode sampai selesai. Setelah pembangunan selesai, biaya yang dikapitalisasi tersebut dipindahkan ke aset tetap.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 236 (Revisi 2024), "Penurunan Nilai Aset". PSAK revisi menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba atau rugi.

i. Aset Tak Berwujud

Perusahaan menerapkan PSAK 238: Aset Tak Berwujud. Aset tak berwujud yang dianggap memiliki masa manfaat ekonomis terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan ekspektasi masa manfaat.

Amortisasi dimulai pada saat aset tersedia untuk digunakan dan dicatat sebagai beban amortisasi, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase amortisasi tahunan dari harga perolehan atau nilai wajar sebagai berikut:

	<u>Masa Manfaat</u>	<u>% Penyusutan</u>
Software	8 Tahun	12,5%

j. Utang Usaha dan Utang Lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Utang Usaha dan Utang Lain-lain (lanjutan)

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Utang lain dari pihak berelasi merupakan saldo utang yang terkait dengan pinjaman yang di dapat dari pihak berelasi Perusahaan.

k. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 224: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Pihak berelasi adalah orang atau Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas Pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas Pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas Pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci Entitas Pelapor atau Entitas Induk, Entitas Pelapor.
- b. Suatu Entitas Berelasi dengan Entitas Pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan Entitas Pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk, Entitas Anak dan Entitas Anak berikutnya terkait dengan Entitas lain);
 - ii. Suatu Entitas adalah Entitas Asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas Asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Suatu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas Asosiasi dari Entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas Pelapor atau Entitas yang terkait dengan Entitas Pelapor. Jika Entitas Pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka Entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas Pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Perusahaan mengungkapkan jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan kunci sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PSAK No.224 (Revisi 2024) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Kompensasi yang diungkapkan mencakup imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

l. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka ditangguhkan pengakuannya dan akan dibukukan sebagai pendapatan sesuai dengan masa manfaat pendapatan tersebut.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Modal Saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas.

Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan dari penjualan real estat diakui dengan menggunakan PSAK 115: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" yang diadopsi dari IFRS 15.

Berdasarkan PSAK 115, Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria terpenuhi:

- a) Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- b) Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
- c) Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
- d) Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
- e) Kemungkinan besar (*probable*) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektabilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variable karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan.

Berdasarkan standar baru ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak (*over the time*) atau pada titik tertentu (*at a point of time*). Jika suatu kontrak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, pendapatan kontrak itu baru bisa diakui saat terjadi penyerahan aset (*at a point of time*).

Kriteria pendapatan diakui secara *over the time* adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja Entitas saat Entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaan tersebut;
2. Kinerja Entitas menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan;
3. Kinerja Entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap Entitas dan Entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan untuk pembayaran kinerja yang diselesaikan sampai suatu tanggal tertentu.

Metode yang digunakan untuk menentukan persentase penyelesaian adalah berdasarkan biaya aktual yang telah dikeluarkan dibandingkan dengan estimasi jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembangan proyek real estate tersebut.

Beban pokok penjualan tanah meliputi harga perolehan tanah ditambah pengeluaran-pengeluaran lain untuk pengembangan tanah. Beban pokok penjualan rumah tinggal, apartemen, dan sejenisnya meliputi tanah dan seluruh beban pembangunan rumah tinggal sampai siap ditempati / digunakan.

Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Perpajakan

Pajak penghasilan final

Peraturan pajak di Indonesia menentukan bahwa jenis pendapatan tertentu dikenakan pajak final. Pajak final yang berlaku atas nilai bruto transaksi diterapkan meskipun pihak-pihak yang melakukan transaksi mengakui kerugian.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71/2008 tanggal 4 November 2008 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Pendapatan dari penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak final sebesar 5% dari nilai penjualan atau pemindahan, yang telah digantikan oleh peraturan pemerintah No. 34/2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang berlaku efektif pada tanggal 8 September 2016. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak final sebesar 2,5% dari nilai penjualan atau pemindahan.

Beban pajak final ditentukan berdasarkan jumlah pengakuan penjualan yang dihitung berdasarkan tarif pajak final dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak penghasilan tidak final

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan *balance sheet liability method*, perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan dan yang akan diterapkan pada saat aset pajak tangguhan yang bersangkutan direalisasi atau pada saat liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

p. Imbalan Kerja

Perusahaan menerapkan PSAK No. 219: Imbalan Kerja.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003") Perusahaan disyaratkan untuk memberikan imbalan pensiun sekurang-kurangnya sama dengan imbalan pensiun yang diatur dalam UU 13/2003 yang adalah program pensiun imbalan pasti. UU 13/2003 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun.

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dengan penyesuaian biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal laporan posisi keuangan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial segera diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

q. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 33d.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan selain aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau pinjaman dan piutang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan. Selanjutnya aset keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dan akumulasi Revaluasi Investasi AFS di ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada Revaluasi Investasi AFS, direklasifikasi ke laba rugi.

Investasi dalam instrumen ekuitas pada perusahaan non-publik dengan kepemilikan kurang dari 20% diukur dengan biaya perolehan dikurangi penurunan nilai karena saham tidak memiliki kuotasi di pasar aktif atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang Perusahaan tidak dapat ditagih.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pengeluaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang diterima.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relative dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer.

Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui pada laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Liabilitas Keuangan

Klasifikasi sebagai liabilitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, biaya masih harus dibayar, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak – pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar pengungkapan terkait dalam dan diantara entitas pelaporan, Perusahaan melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki dengan hirarki berikut yang dikategorikan menjadi tiga tingkat input ke teknik penilaian:

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika;

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

r. Laba per Saham

Sesuai dengan PSAK 233: Laba per Saham, laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, terlepas dari estimasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki dampak signifikan dari jumlah yang tercantum di dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Properti

Perusahaan menentukan apakah suatu properti diklasifikasikan sebagai properti investasi atau persediaan:

- Properti investasi terdiri atas tanah dan bangunan yang tidak digunakan secara substansial untuk digunakan oleh, atau dalam operasional Perusahaan, maupun untuk dijual dalam kegiatan usaha umum, tetapi dimiliki terutama untuk mendapatkan pendapatan sewa dan kenaikan nilai modal. Bangunan ini secara substansial disewakan kepada penyewa dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha umum.
- Properti persediaan terdiri atas properti yang dimiliki untuk tujuan dijual dalam kegiatan usaha umum. Pada prinsipnya, ini adalah properti Rumah Hunian yang dikembangkan Perusahaan dan dimaksudkan untuk dijual sebelum maupun sesudah proses pembangunan selesai.

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 239 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diklasifikasi dan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti yang diungkapkan pada Catatan 2.

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi

Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya dari ketidakpastian estimasi di masa depan pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, diungkapkan sebagai berikut:

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomi aset tetap antara 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Penyusutan Properti Investasi

Biaya perolehan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomi properti investasi sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pensiun dan Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban pensiun bergantung pada faktor-faktor yang ditetapkan berdasarkan basis akrual dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan di dalam menetapkan biaya (pendapatan) bersih pensiun meliputi tingkat suku bunga diskon dan tingkat kenaikan gaji di masa depan. Semua perubahan di dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai kini kewajiban pensiun.

Perusahaan menetapkan tingkat suku bunga yang sesuai dan kenaikan tingkat gaji di masa depan pada tiap akhir periode pelaporan. Tingkat suku bunga adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menetapkan arus kas keluar masa depan yang diharapkan yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Di dalam menetapkan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasi oleh mata uang di mana manfaat tersebut akan dibayarkan dan memiliki syarat-syarat jatuh tempo yang mendekati syarat syarat kewajiban pensiun terkait.

Tingkat kenaikan gaji di masa depan ditentukan dengan mengumpulkan semua data historis terkait dengan perubahan dasar gaji dan menyesuaikannya pada rencana bisnis di masa depan.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun, imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Pengukuran Nilai Wajar

Beberapa kebijakan akuntansi dan pengungkapan Perusahaan membutuhkan pengukuran nilai wajar, baik untuk aset dan liabilitas keuangan maupun non keuangan. Ketika mengukur kewajaran aset atau liabilitas, Perusahaan menggunakan data dari penelitian di pasar sebisa mungkin. Nilai wajar dikategorikan ke beberapa tingkatan berbeda di hierarki nilai wajar berdasarkan teknik penilaian sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di dalam pasar aktif bagi aset maupun liabilitas yang identikal yang dapat diakses Kelompok Usaha pada tanggal pengukuran;

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Tingkat 2: Input selain harga kuotasian yang termasuk di dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi bagi aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivatif harga);
- Tingkat 3: Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Perusahaan mencatat aset keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda.

Perubahan nilai wajar aset keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Perusahaan memiliki instrumen keuangan yang disajikan sebesar jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

4. KAS DAN SETARA KAS

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Kas	4.009.981	4.190.428
Jumlah Kas	4.009.981	4.190.428
Bank – pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	7.290.273.824	9.889.290.125
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	347.438.389	567.463.987
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. – Syariah	178.001.106	222.673.862
PT Bank Central Asia Tbk.	83.326.474	111.125.380
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	14.265.794	30.235.175
PT Bank Artha Graha Tbk.	1.880.778	28.850.778
PT Bank CIMB Niaga Syariah	5.537.671	5.537.671
PT BRI Syariah Tbk.	10.589.753	2.983.253
Jumlah bank	7.931.313.789	10.858.160.231
Deposito		
PT BPR Syariah Mitra Amanah	100.000.000	100.000.000
Jumlah	8.035.323.770	10.962.350.659

Suku bunga jasa giro dan bagi hasil deposito per tahun yang berlaku selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Jasa Giro – Rupiah	0,25 - 5,5%	0,25 - 5,5%
Deposito (bagi hasil)	2,25 – 2,8%	2,25 – 2,8%

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi dan tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh Perusahaan.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

Rincian aset keuangan lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Jaminan KPR		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	3.046.310.475	7.482.208.210
PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero)	1.616.981.347	1.210.584.680
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero)	206.579.026	347.396.164
PT Bank Artha Graha, Tbk	136.705.000	209.095.000
PT Dana Syariah Indonesia	66.250.000	66.250.000
Tunjangan Wajib Perumahan	20.000.000	20.000.000
Jumlah	5.092.825.848	9.335.534.054
Cadangan penurunan nilai	(562.753.337)	(605.019.895)
Jaminan KPR – bersih	4.530.072.511	8.730.514.159

Penyajian saldo jaminan KPR berdasarkan umurnya disajikan sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Kurang dari 30 hari	262.152.700	252.270.709
31 hari – 60 hari	256.004.800	64.430.000
61 hari – 90 hari	-	304.025.000
Lebih dari 90 hari	4.574.668.348	8.714.808.345
	5.092.825.848	9.335.534.054
Cadangan penurunan nilai	(562.753.337)	(605.019.895)
Jaminan KPR – bersih	4.530.072.511	8.730.514.159

Rincian dari cadangan kerugian penurunan nilai atas jaminan KPR adalah sebagai berikut..

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Saldo awal	605.019.895	576.352.467
Penyisihan selama tahun berjalan	-	28.667.428
Pemulihan piutang	(42.266.558)	-
Saldo akhir	562.753.337	605.019.895

Jaminan KPR timbul sehubungan dengan adanya penjualan rumah kepada konsumen yang pembayarannya melalui KPR Bank (Kredit Pemilikan Rumah). Jaminan KPR akan terealisasi pembayarannya jika Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan yang terdapat dalam transaksi penjualan rumah melalui KPR Bank tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas jaminan KPR cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya jaminan KPR. Cadangan ditentukan berdasarkan penelaahan individual dan secara kolektif terhadap saldo jaminan KPR pada tanggal pelaporan.

6. PERSEDIAAN REAL ESTAT

Persediaan real estat terdiri dari:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Persediaan tanah kavling	56.054.736.422	54.559.273.849
Persediaan bangunan dalam penyelesaian	5.511.428.066	2.314.820.149
Persediaan bangunan siap dijual	8.042.176.527	9.452.281.334
Jumlah	69.608.341.015	66.326.375.332

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN REAL ESTAT (lanjutan)

a. Persediaan Tanah Kavling

Rincian mutasi persediaan tanah kavling pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Saldo awal	54.559.273.849	49.484.864.465
Penambahan	3.618.177.131	11.040.301.367
Pengurangan	-	-
Reklasifikasi:		
- Reklasifikasi dari tanah belum dikembangkan	3.602.233.092	-
- Reklasifikasi ke bangunan dalam penyelesaian	(5.724.947.650)	(5.965.891.983)
Saldo akhir	<u>56.054.736.422</u>	<u>54.559.273.849</u>

Rincian luas dan unit tanah kavling pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Luas tanah	60.322 m ²	66.371 m ²
Jumlah unit	684 unit	755 unit

Persediaan tanah kavling pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berlokasi di perumahan Cibungbulang Town Hill di Desa Cibatok dan Desa Cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan di perumahan Bumi Abhirama Residence yang berlokasi di Kp Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Persediaan tanah kavling sebagaimana termuat didalam Siteplan Perseroan merupakan Persediaan berupa kavling-kavling siap bangun yang terdiri dari blok Ruko, area Komersil, Unit-Unit Tipe Carani, Tipe Dahayu, Cluster Bunder, Cluster Halimun, Cluster Salak, Cluster Pangrango, Cluster Munara, Cluster Ciremai, Cluster Krakatau, Cluster Boulevard, Cluster Citarum dan Cisadane. Tanah kavling yang direklasifikasi dari uang muka merupakan lahan yang telah matang dan telah siap dibangun yang berlokasi di Cibungbulang Town Hill, di Desa Cibatok dan Desa Cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

b. Persediaan Bangunan Dalam Penyelesaian

Rincian mutasi persediaan bangunan dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Saldo awal	2.314.820.149	5.069.098.565
Penambahan		
- Pembangunan konstruksi	4.768.137.656	7.908.692.986
Reklasifikasi:		
- Reklasifikasi dari tanah kavling	5.724.947.650	5.965.891.983
- Reklasifikasi ke bangunan siap dijual	(7.296.477.389)	(16.628.863.385)
Saldo akhir	<u>5.511.428.066</u>	<u>2.314.820.149</u>

Rincian luas dan unit persediaan dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Luas tanah	3.515 m ²	2.021 m ²
Luas bangunan	2.330 m ²	958 m ²
Jumlah unit	50 Unit	29 Unit

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN REAL ESTAT (lanjutan)

b. Persediaan Bangunan Dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persediaan bangunan dalam penyelesaian pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berlokasi di perumahan Cibungbulang Town Hill di Desa Cibatok Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan di perumahan Bumi Abhirama Residence yang berlokasi di Kp Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Persediaan dalam penyelesaian tersebut terdapat dalam Cluster Munara, Cluster Citarum, Tipe Dahayu dan tipe Carani.

c. Persediaan Bangunan Siap Dijual

Rincian persediaan bangunan siap dijual pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Saldo awal	9.452.281.334	7.381.544.483
Pembebanan ke beban pokok penjualan (Catatan 25)	(8.706.582.196)	(14.558.126.534)
Reklasifikasi:		
- Reklasifikasi dari bangunan dalam penyelesaian	7.296.477.389	16.628.863.385
Saldo akhir	<u>8.042.176.527</u>	<u>9.452.281.334</u>

Rincian luas dan unit persediaan bangunan siap dijual pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Luas tanah	4.249 m ²	4.475 m ²
Luas bangunan	1.784 m ²	2.040 m ²
Jumlah unit	56 Unit	61 unit

Persediaan bangunan siap dijual pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berlokasi di perumahan Cibungbulang Town Hill yaitu di Desa Cibatok dan Desa Cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan di perumahan Bumi Abhirama Residence yang berlokasi di Kp Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Pada tanggal 31 Desember 2024, atas persediaan bangunan siap dijual tersebut terdapat dalam Cluster Bunder, Cluster Chopper, Cluster Bromo, Cluster Ciremai, Cluster Krakatau, Cluster Citarum dan tipe Carani serta Dahayu.

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan yang dimilikinya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 persediaan Perusahaan dijadikan sebagai jaminan utang bank yang dimiliki oleh Perusahaan (Catatan 14).

7. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Uang muka pembelian tanah:		
- Tanah seluas 20.302 m ²	13.399.000.000	13.399.000.000
- Tanah seluas 10.770 m ²	1.292.900.000	1.292.900.000
- Tanah seluas 2.708 m ²	1.118.396.018	-
Jumlah uang muka pembelian tanah	<u>15.810.296.018</u>	<u>14.691.900.000</u>
Uang muka operasional	245.976.549	106.258.446
Jumlah	<u>16.056.272.567</u>	<u>14.798.158.446</u>

Uang muka pembelian tanah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 merupakan sejumlah pengeluaran biaya-biaya terkait dengan adanya pembelian tanah yang sudah dilunasi Perusahaan. Uang muka pembelian lahan direklasifikasi kedalam pos Persediaan tanah kavling pada saat dan/atau seluruh perizinan/legalitas telah rampung, lahan telah dimatangkan dan sudah siap bangun.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. UANG MUKA (lanjutan)

31 Desember 2024				
No.	Lokasi	Jumlah Luas (m ²)	Nilai Transaksi (Rp)	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor	20.302	13.399.000.000	13.399.000.000
2.	Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor	10.770	1.292.900.000	1.292.900.000
3.	Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor	2.708	1.118.396.018	1.118.396.018
	Jumlah	33.780	15.810.296.018	15.810.296.018

31 Desember 2023				
No.	Lokasi	Jumlah Luas (m ²)	Nilai Transaksi (Rp)	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor	20.302	13.399.000.000	13.399.000.000
2.	Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor	10.770	1.292.900.000	1.292.900.000
	Jumlah	31.072	14.691.900.000	14.691.900.000

Atas tanah seluas 2.708 m² yang berlokasi di Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, sedang dalam proses pertimbangan teknis surat keputusan, surat ukur dan penerbitan sertifikat oleh notaris & PPAT Milasari Rokayah, S.H., M.Kn..

Berdasarkan *Covernote* nomor 05/N/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dari notaris Milasari Rokayah, S.H., M.Kn. menyampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1202/Cibatok I, yang masih atas nama SITI CHODIJAH dengan luas 10.770m² yang terletak di Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sedang dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ke atas nama PT. Trimitra Prawara Goldland berdasarkan SPH Nomor 500.17/10/X/2023.

Atas tanah seluas 20.302 m² yang berlokasi di Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, berdasarkan surat keterangan nomor : 013/AGS-Not/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 dari notaris & PPAT Andre Grafe Sandi, S.H., M.Kn atas tanah seluas 20.302 m² yang berlokasi Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor yaitu seluas 7.928 m² sedang dalam proses penurunan hak pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor dan seluas 12.374 m² sedang dalam proses pengukuran untuk peta bidang tanah, SK Pemberian Hak dan Cetak Ukur.

Biaya yang ditanggung merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan Perusahaan terkait dengan perizinan, pajak-pajak perolehan lahan dan biaya lain yang kedepannya dikapitalisasi ke dalam pos persediaan.

Uang muka operasional merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan sehubungan dengan kegiatan operasional Perusahaan yang sampai dengan akhir tanggal laporan belum dipertanggungjawabkan.

8. TANAH YANG BELUM DIKEMBANGKAN

Tanah yang belum dikembangkan sebesar Rp0 dan Rp3.602.233.092 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan tanah seluas 5.939 m² berdasarkan SHGB No. 603 atas nama Perusahaan yang berlokasi di Jalan Nasional 11 Desa Cimanggu 2, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saat ini tanah tersebut masih dalam pengurusan pecah sertifikat untuk unit-unit Cluster Munara.

Pada tahun 2023 atas tanah yang belum dikembangkan tidak dilakukan penilaian kembali oleh KJPP.

9. PROPERTI INVESTASI

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga.

Mutasi properti investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024				Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Harga perolehan					
Tanah dan Bangunan	1.023.297.633	-	-	-	1.023.297.633
Jumlah	1.023.297.633	-	-	-	1.023.297.633
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	158.340.000	46.800.000	-	-	205.140.000
Jumlah	158.340.000	46.800.000	-	-	205.140.000
Jumlah tercatat	864.957.633				818.157.633

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

	31 Desember 2023				Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Harga perolehan					
Tanah dan Bangunan	1.023.297.633	-	-	-	1.023.297.633
Jumlah	1.023.297.633	-	-	-	1.023.297.633
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	111.540.000	46.800.000	-	-	158.340.000
Jumlah	111.540.000	46.800.000	-	-	158.340.000
Jumlah tercatat	911.757.633				864.957.633

Rincian luas dan unit properti investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Luas tanah m ²	259 m ²	259 m ²
Luas bangunan	210 m ²	210 m ²
Jumlah unit	5 unit	5 unit

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, reklasifikasi dari persediaan bangunan siap dijual menjadi properti investasi dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehubungan dengan penggunaan aset tersebut yang disewakan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa. Properti investasi tersebut berlokasi di perumahan Cibungbulang Town Hill yaitu di Desa Cibatok dan Desa Cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Adapun jangka waktu sewa berkisar antara 1 sampai 3 tahun dan dapat di perpanjang.

Beban penyusutan dialokasikan ke beban pokok pendapatan sebesar Rp46.800.000 dan Rp46.800.000 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 25).

Pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas properti investasi.

10. ASET TETAP

	31 Desember 2024			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga perolehan				
Kepemilikan langsung				
Tanah	4.202.144.000	-	-	4.202.144.000
Bangunan	3.121.019.827	-	-	3.121.019.827
Kendaraan	1.235.796.482	-	6.202.500	1.229.593.982
Peralatan kantor	1.074.104.733	21.538.060	-	1.095.642.793
	9.633.065.042	21.538.060	6.202.500	9.648.400.602
Aset dalam pembangunan				
Bangunan	177.000.000	-	-	177.000.000
Jumlah	9.810.065.042	-	-	9.825.400.602
Akumulasi penyusutan				
Kepemilikan langsung				
Bangunan	750.351.105	156.050.991	-	906.402.096
Kendaraan	236.426.591	152.301.904	1.550.625	387.177.870
Peralatan kantor	678.343.747	146.682.024	-	825.025.771
Jumlah	1.665.121.443	455.034.919	1.550.625	2.118.605.737
Jumlah tercatat	8.144.943.599			7.706.794.865

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2023			Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga perolehan				
Kepemilikan langsung				
Tanah	4.202.144.000	-	-	4.202.144.000
Bangunan	3.121.019.827	-	-	3.121.019.827
Kendaraan	1.229.593.982	6.202.500	-	1.235.796.482
Peralatan kantor	1.034.204.733	39.900.000	-	1.074.104.733
	9.586.962.542	46.102.500	-	9.633.065.042
Aset dalam pembangunan				
Bangunan	177.000.000	-	-	177.000.000
Jumlah	9.763.962.542	-	-	9.810.065.042
Akumulasi penyusutan				
Kepemilikan langsung				
Bangunan	594.300.114	156.050.991	-	750.351.105
Kendaraan	85.416.874	151.009.717	-	236.426.591
Peralatan kantor	525.183.477	153.160.270	-	678.343.747
Jumlah	1.204.900.465	460.220.978	-	1.665.121.443
Jumlah tercatat	8.559.062.077			8.144.943.599

Tanah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan harga perolehan sebesar Rp4.202.144.000 merupakan tanah seluas 4.123 m² berdasarkan SHGB No. 8 atas nama Perusahaan, berlokasi diperumahan Cibungbulang Town Hill yang di atasnya berdiri bangunan Cibungbulang Food Festival dan kios.

Bangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp3.121.019.827, terdiri dari bangunan Cibungbulang Food Festival, kios, kantor pemasaran, Kantor teknik dan bangunan kantor pusat.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 aset dalam pembangunan senilai Rp177.000.000 merupakan bangunan lapangan futsal yang berlokasi di Perumahan Cibungbulang Town Hill, sampai dengan saat ini pembangunan lapangan tersebut ditangguhkan sementara dikarenakan pertimbangan adanya wabah pandemi Covid-19.

Penambahan harga perolehan peralatan kantor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.538.060 dan Rp39.900.000 merupakan pembelian peralatan kantor di antaranya yaitu laptop, dan peralatan kantor lainnya. Sedangkan penambahan harga perolehan kendaraan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6.202.500 merupakan pembelian 1 unit motor Yamaha Vixion.

Pengurangan harga perolehan kendaraan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.202.500 merupakan penjualan penjualan 1 unit motor Yamaha Vixion, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Harga Perolehan	6.202.500	-
Akumulasi Penyusutan	1.550.625	-
Nilai Buku	4.651.875	-
Harga Jual	4.500.000	-
Laba (Rugi) Pelepasan Aset	(151.875)	-

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, aset bangunan Perusahaan telah diasuransikan dari risiko kebakaran, petir, maupun ledakan kepada PT Asuransi Tri Pakarta dengan nomor polis 11901012400780 dengan total nilai pertanggungan Rp4.794.100.000 dan jangka waktu periode 15 Juli 2024 - 15 Juli 2025. Manajemen berpendapat, nilai pertanggungan tersebut telah mencukupi dari segala risiko kerugian.

Aset tetap Perusahaan berupa tanah dan bangunan, dijadikan sebagai jaminan atas perolehan fasilitas pinjaman bank. (Catatan 14)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan pada:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	455.034.919	460.220.978
Jumlah	<u>455.034.919</u>	<u>460.220.978</u>

Rincian penambahan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Pembayaran kas	21.538.060	46.102.500
Jumlah	<u>21.538.060</u>	<u>46.102.500</u>

11. ASET TAK BERWUJUD

Rincian aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>			
	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	
Harga perolehan				
<i>Software</i>	1.040.237.000	-	-	1.040.237.000
Jumlah	<u>1.040.237.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.040.237.000</u>
Akumulasi amortisasi				
<i>Software</i>	699.020.959	153.363.750	-	852.384.709
Jumlah	<u>699.020.959</u>	<u>153.363.750</u>	<u>-</u>	<u>852.384.709</u>
Jumlah tercatat	<u>341.216.041</u>			<u>187.852.291</u>
	<u>31 Desember 2023</u>			
	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo akhir</u>
Harga perolehan				
<i>Software</i>	1.040.237.000	-	-	1.040.237.000
Jumlah	<u>1.040.237.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.040.237.000</u>
Akumulasi amortisasi				
<i>Software</i>	520.519.375	178.501.583	-	699.020.959
Jumlah	<u>520.519.375</u>	<u>178.501.583</u>	<u>-</u>	<u>699.020.959</u>
Jumlah tercatat	<u>519.717.625</u>			<u>341.216.041</u>

Beban amortisasi *software* dialokasikan pada:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	153.363.750	178.501.583
Jumlah	<u>153.363.750</u>	<u>178.501.583</u>

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing merupakan lebih bayar PPh 21 dan PPN. Saldo pajak dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.654.250 dan Rp1.914.000.

b. Utang Pajak

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
PPN Keluaran	3.681.135	-
PPh Pasal 23	1.405.406	82.465
PPh Pasal 4 Ayat 2	-	395.839.217
PPh Pasal 21	-	24.342.109
Jumlah	<u>5.086.541</u>	<u>420.263.791</u>

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak):

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(2.109.329.281)	162.823.729
Beda tetap:		
Penghasilan telah dikenakan PPh Final	(14.195.032.272)	(23.653.459.265)
Beban sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final	16.281.967.112	22.524.362.074
Lainnya	22.394.441	966.273.462
Jumlah Koreksi Pajak	<u>2.109.329.281</u>	<u>(162.823.729)</u>
Penghasilan Kena Pajak	-	-
Beban Pajak	-	-

Perusahaan melaporkan pajak berdasarkan *self-assessment*. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdapat perbedaan perhitungan kewajiban pajak penghasilan badan antara SPT yang telah dilaporkan dengan perhitungan kewajiban perpajakan di atas. Perusahaan akan melakukan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dan menetapkan besarnya kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun berdasarkan UU No. 28/2007, dimana hasilnya dapat berbeda dengan perhitungan kewajiban perpajakan di atas.

d. Beban Pajak

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Pajak final	280.810.666	535.724.868
Pajak lainnya	368.030.708	425.420.095
Jumlah	<u>648.841.374</u>	<u>961.144.963</u>

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Pihak ketiga		
PT Mitra Alkhanka Bakti Tama	355.453.048	168.720.000
PT Ikatama Reka Konstruksi	104.560.000	104.560.000
Notaris	93.063.750	74.925.000
Patuh Ansori Rahman & Rekan	82.804.000	82.804.000
PT Berwin Karya Kontruksi	58.207.036	58.207.036
PT Kharisa Griya Utama	15.854.442	58.487.500
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 Juta)	224.213.412	156.034.587
Jumlah	<u>934.155.688</u>	<u>703.738.123</u>

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Belum jatuh tempo	248.817.134	117.705.000
Telah jatuh tempo:		
Kurang dari 30 hari	106.635.914	82.448.282
31 hari – 60 hari	57.870.265	26.765.000
61 hari – 90 hari	-	-
Lebih dari 90 hari	520.832.375	476.819.841
Jumlah	<u>934.155.688</u>	<u>703.738.123</u>

Atas utang usaha tersebut, tidak terdapat pemberian jaminan atas utang usaha yang diterima oleh Perusahaan.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Rincian utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	12.650.000.000	14.650.000.000
Jumlah	<u>12.650.000.000</u>	<u>14.650.000.000</u>

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 8 Januari 2024 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, menyetujui perpanjangan atas fasilitas kredit modal kerja berdasarkan perjanjian kredit nomor 021/BKM/PK-KMK/2019, dengan rincian sebagai berikut:

Limit	: Rp2.000.000.000 (R/C Terbatas)
Tujuan	: Kredit Modal Kerja dengan tujuan untuk tambahan modal usaha <i>developer</i>
Sifat Kredit	: <i>Revolving</i>
Jangka Waktu	: 12 Bulan (15 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2024)
Bunga	: 12% p.a yang dihitung dari Baki Debet
Biaya Provisi	: 0,25% dari maksimum kredit
Biaya Administrasi	: Rp2.000.000

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 8 Januari 2024 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, menyetujui perpanjangan atas fasilitas kredit modal kerja berdasarkan perjanjian kredit nomor 023/BKM/PK-KMK/2019, dengan rincian sebagai berikut:

Limit	:	Rp16.000.000.000 (R/C Terbatas)
Tujuan	:	Kredit Modal Kerja dengan tujuan untuk tambahan modal usaha <i>developer</i>
Sifat Kredit	:	<i>Revolving</i>
Jangka Waktu	:	12 Bulan (15 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2024)
Bunga	:	12% p.a yang dihitung dari Baki Debet
Biaya Provisi	:	0,25% dari maksimum kredit

Sehingga Jaminan atas pinjaman bank kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Tiga bidang tanah berikut Bangunan Ruko, *Marketing Gallery* dan *Food Hall* di atasnya yang terletak di Kelurahan Cimanggu II, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Dengan bukti kepemilikan:
 - SHGB No. 8 / Cimanggu II tanggal 14 September 2016 jatuh tempo Hak s.d 13 September 2046 atas nama Perusahaan sesuai dengan Surat Ukur No.252/Cimanggu II/2016 tanggal 13 Mei 2016. Akan diikat Hak Tanggung I sebesar Rp12.000.000.000.
 - SHGB No. 161 / Cimanggu II tanggal 17 Januari 2017 jatuh tempo Hak s.d 29 November 2046 atas nama Perusahaan sesuai dengan Surat Ukur No.267/Cimanggu II/2016 tanggal 10 November 2016. Akan diikat Hak Tanggung I sebesar Rp2.000.000.000.
 - SHGB No. 360 / Cimanggu II tanggal 24 Januari 2019 jatuh tempo Hak s.d 13 September 2046 atas nama Perusahaan sesuai dengan Surat Ukur No. 711/Cimanggu II/2019 tanggal 16 Januari 2019. Akan diikat Hak Tanggung I sebesar Rp8.500.000.000.
 - IMB No. 644/003.1.1/00471/DPMPPTSP/2018 tanggal 19 September 2018 PT Trimitra Prawara Goldland.
 - IMB No. 648/003.1.1/00691/DPMPPTSP/2018 tanggal 18 Oktober 2017 PT Trimitra Prawara Goldland.
2. Dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Cibatok I, Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan berupa:
 - SHGB No. 1125 / Cibatok I Tanggal 7 Juni 2018 jatuh tempo hak sampai dengan tanggal 29 Mei 2048 atas nama Perusahaan sesuai dengan Surat Ukur No. 171/Cibatok I/2017 tanggal 22 September 2017.
 - SHGB No. 441 / Cibatok I tanggal 13 Oktober 2017 jatuh tempo Hak s.d 17 September 2047 atas nama Perusahaan sesuai dengan Surat Ukur No.171/Cibatok I/2017 tanggal 22 September 2017 akan diikat Hak Tanggung I sebesar Rp500.000.000.
3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Taman Cimanggu Selatan 12A, Tanah Sereal, Cimanggu, Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan berupa:
 - SHGB No. 609 / Cibatok I Tanggal 9 Februari 2018 jatuh tempo hak sampai dengan tanggal 24 Januari 2048 atas nama Perusahaan sesuai dengan Surat Ukur No. 673/Cibatok I/2018 tanggal 17 November 2017.
4. Persediaan barang berupa Rumah Tinggal *Ready*, Persediaan barang berupa Rumah dalam Proses Pembangunan dan Persediaan barang berupa Material Bahan Bangunan yang berlokasi di Perumahan CITO, Jalan Raya Cibungbulang Bogor akan diikat fidusia notarial sebesar Rp1.000.618.455.
5. Piutang retensi milik Perusahaan sebesar Rp11.586.899.264.

Affirmative Covenants

1. Menyalurkan transaksi keuangan Perusahaan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet penjualan Perusahaan. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit tidak terpenuhi, maka suku bunga pinjaman dinaikkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) per annum dari suku bunga efektif saat itu.
2. Minta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak oleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Affirmative Covenants (lanjutan)

3. Penerima Kredit diharuskan memelihara dan menjaga rasio keuangan dibawah ini:
 - a. *Current Ratio* minimal 1 kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement / Audited* Perusahaan.
 - b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,5 kali
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total Hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan *Home Statement / Audited* Perusahaan.
 - c. *Debt Service Coverage* minimal 100%
Debt Service Coverage adalah perbandingan antar EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement / Audited* Perusahaan.
4. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - a.1. Apabila penyampaian laporan keuangan *audited* tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan *penalty* sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per annum dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
 - a.2. Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partnernya*) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di Otoritas Jas Keuangan (OJK) atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut.
 - b. Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - c. Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
 - d. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan selama masih menjadi jaminan ke BNI.
 - e. Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Setempat, setiap tahun.
 - f. Copy rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
5. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
6. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, *payroll* gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
7. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
 - a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Perusahaan serta barang agunan BNI.
 - b. Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - c. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perusahaan maupun harta kekayaan Perusahaan.
 - d. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - e. Pelanggaran Anggaran Dasar Perusahaan oleh pengurus Perusahaan.
 - f. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perusahaan.
8. Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh bank setiap saat untuk:
 - a. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas Perusahaan.
 - b. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi Perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan.
 - c. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban penerima kredit.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Affirmative Covenants (lanjutan)

9. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - a. Melakukan pendebitan rekening simpanan penerima kredit di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya.
 - b. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh penerima kredit untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*.
 - c. Mendiskusikan permasalahan keuangan Perusahaan penerima kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh penerima kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*.
 - d. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BNI) dalam jajaran manajemen Perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Perusahaan.
10. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Biaya bunga, propisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan,
 - b. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
11. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat dari BNI (*unconditionally cancelled any time*).
12. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
13. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK).
14. Memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada bank apabila mengubah susunan direksi dan komisaris Perusahaan penerima kredit dengan menyerahkan hasil keputusan RUPS berikut persetujuan dari instansi yang berwenang terkait perubahan tersebut.

Perusahaan telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit No. 021/BKM/1/PK-KMK/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan juga telah memperoleh perpanjangan atas fasilitas kredit tersebut sebagaimana termaktub dalam Surat No. BKM/1/284/R tanggal 12 Juli 2023 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Limit	: Rp2.000.000.000,-
Jenis Kredit	: KMK R/C Terbatas (Review)
Tujuan	: Untuk tambahan modal kerja usaha Perusahaan.
Jangka Waktu	: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2024
Suku Bunga	: 12% p.a
Provisi	: 0,25% p.a

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Perusahaan telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit No. 023/BKM/PK-KMK/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan juga telah memperoleh perpanjangan atas fasilitas kredit tersebut sebagaimana termuat dalam Surat No. BKM/1/284/R tanggal 12 Juli 2023 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Limit	:	Maksimum menjadi Rp18.000.000.000,- dari sebelumnya maksimum Rp21.000.000.000,-
Jenis Kredit	:	KMK R/C Terbatas Tanpa Cek/BG (Review)
Tujuan	:	Untuk tambahan modal kerja usaha Perusahaan.
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2024
Suku Bunga	:	12% p.a
Provisi	:	0,25% p.a

Pada tanggal 22 September 2023 Perusahaan mendapatkan Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.BKM/1//338/R terkait penarikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Atas penarikan jaminan, dilakukan penurunan maksimum Kredit Modal Kerja (KMK) R/C tanpa cek BG, dengan struktur fasilitas kredit sebagai berikut:
 - a. Maksimum : menjadi Rp16.000.000.000,- (enam belas milyar Rupiah) dari semula Rp18.000.000,- (delapan belas milyar Rupiah)
 - b. Sejak Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) ditandatangani sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 14 Oktober 2023.

Sehingga Jaminan atas pinjaman bank kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Tiga bidang tanah berikut Bangunan Ruko, *Marketing Gallery* dan *Food Hall* di atasnya yang terletak di Kelurahan Cimanggu II, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Dengan bukti kepemilikan:
 - SHGB No. 8 / Cimanggu II tanggal 14 September 2016 jatuh tempo Hak s.d 13 September 2046 atas nama Perusahaan sesuai dengan Surat Ukur No.252/Cimanggu II/2016 tanggal 13 Mei 2016. Akan diikat Hak Tanggung I sebesar Rp12.000.000.000.
 - SHGB No. 161 / Cimanggu II tanggal 17 Januari 2017 jatuh tempo Hak s.d 29 November 2046 atas nama Perusahaan sesuai dengan Surat Ukur No.267/Cimanggu II/2016 tanggal 10 November 2016. Akan diikat Hak Tanggung I sebesar Rp2.000.000.000.
 - SHGB No. 360 / Cimanggu II tanggal 24 Januari 2019 jatuh tempo Hak s.d 13 September 2046 atas nama Perusahaan sesuai dengan Surat Ukur No. 711/Cimanggu II/2019 tanggal 16 Januari 2019. Akan diikat Hak Tanggung I sebesar Rp8.500.000.000.
 - IMB No. 644/003.1.1/00471/DPMPSTSP/2018 tanggal 19 September 2018 PT Trimitra Prawara Goldland.
 - IMB No. 648/003.1.1/00691/DPMPSTSP/2018 tanggal 18 Oktober 2017 PT Trimitra Prawara Goldland.
2. Tiga bidang tanah yang terletak di Kelurahan Cibatok I, Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan berupa:
 - SHGB No. 441 / Cibatok I tanggal 13 Oktober 2017 jatuh tempo Hak s.d 17 September 2047 atas nama Perusahaan sesuai dengan Surat Ukur No.171/Cibatok I/2017 tanggal 22 September 2017 akan diikat Hak Tanggung I sebesar Rp500.000.000.
3. Persediaan barang berupa Rumah Tinggal *Ready*, Persediaan barang berupa Rumah dalam Proses Pembangunan dan Persediaan barang berupa Material Bahan Bangunan yang berlokasi di Perumahan CITO, Jalan Raya Cibungbulang Bogor akan diikat fidusia notarial sebesar Rp1.000.618.455.
4. Piutang retensi milik Perusahaan sebesar Rp7.147.966.953.

Negative Covenants

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, maka Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengadakan penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi dengan Perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga yang menggunakan dana yang bersumber dari modal kerja atau pinjaman dari Bank, sedangkan yang bersumber dari dana lainnya cukup pemberitahuan tertulis kepada Bank, dengan syarat proses akuisisi/pengambilalihan aset tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat permasalahan terkait akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga tersebut menjadi tanggung jawab debitur sendiri dan tidak menghambat pemenuhan kewajiban debitur kepada Bank.
3. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada Perusahaan lain.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Negative Covenants (lanjutan)

4. Mengizinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
5. Mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, bidang usaha, memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) kecuali atas saham yang telah dilepas ke publik cukup pemberitahuan tertulis kepada Bank dengan syarat saham yang dilepas ke publik tersebut sebesar besarnya/ maksimal sebesar 20% dari total modal yang ditempatkan dan disetor, dan tidak mengubah *ultimate ownership* yakni PT Trimitra Prawara Goldland Tbk sebesar 76%.
6. Melunasi seluruh atau sebagian utang Perusahaan kepada pemegang saham dan/ atau Perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub-Ordinated Loan*).
7. Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kecuali apabila debitur membagikan deviden dan tidak melanggar financial covenant cukup pemberitahuan tertulis pada Bank.
8. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
9. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
10. Mengambil *lease* dari Perusahaan *leasing*.
11. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh debitur kepada BNI) kepada pihak lain.
12. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang - barang agunan.
13. Membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha.
17. Melakukan interfinancing dengan Perusahaan afiliasi, induk Perusahaan dan/atau anak Perusahaan.
18. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi debitur dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha debitur.
 - b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktifitas usaha debitur dan mengancam keberlangsungan usaha debitur.
 - c. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada Perusahaan afiliasinya, dengan cara - cara yang berada diluar praktek - praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
19. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Permohonan Persetujuan Perubahan Pemegang Saham dan Perubahan Syarat Lainnya

Sehubungan dengan pelaksanaan rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan rencana IPO sebagai Perusahaan Terbuka, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau mengesampingkan ketentuan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mengubah status hukum Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka dan mengubah anggaran dasar untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
2. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham.
3. Mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Atas permohonan tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Menengah Bekasi berdasarkan Surat Persetujuan *Waiver* IPO PT Trimitra Prawara Goldland No. BKM/1/1189 tanggal 2 Juli 2020 yang menyetujui Perseroan untuk:

1. Terkait pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba), apabila Perseroan membagikan dividen dan tidak melanggar *Financial Covenant*, maka cukup pemberitahuan tertulis kepada Bank.
2. Melakukan aksi korporasi terkait Penawaran Saham Perdana (IPO) dengan mengadakan perubahan nama, bentuk atau status hukum dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Permohonan Persetujuan Perubahan Pemegang Saham dan Perubahan Syarat Lainnya (lanjutan)

3. Terkait dengan memindahtangankan saham perusahaan, Perseroan hanya diwajibkan untuk meminta persetujuan tertulis kepada Bank apabila terdapat perubahan komposisi *ultimate shareholder*.
4. Mengubah susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan dengan menyerahkan hasil keputusan RUPS berikut persetujuan dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Surat Persetujuan Penggunaan Dana IPO Perseroan No. BKM/1/1901 tertanggal 23 September 2020 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Menengah Bekasi, Perseroan wajib memberitahukan kepada Bank atas penggunaan dana hasil IPO.

15. UTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA

Utang lain-lain pihak ketiga terdiri dari:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Pihak ketiga		
Titipan SBUM	44.000.000	44.000.000
Titipan BPHTB	77.622.221	19.726.745
Jumlah	<u><u>121.622.221</u></u>	<u><u>63.726.745</u></u>

Utang lain-lain BPHTB dan PBB timbul sehubungan dengan adanya transaksi penjualan rumah dari Perusahaan ke konsumen dimana konsumen tersebut telah menitipkan uang pembayaran BPTHB dan PBB kepada Perusahaan dan akan dibayarkan oleh Perusahaan ke Dispenda setelah persetujuan perolehan KPR selesai. Lain-lain Merupakan biaya yang masih harus dibayar oleh perusahaan antara lain biaya listrik, air, telepon dan BPJS.

16. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Sewa	297.933.337	297.916.667
Uang muka penjualan rumah	1.851.557.890	3.141.403.180
Jumlah	<u><u>2.149.491.227</u></u>	<u><u>3.439.319.847</u></u>

Rincian mutasi uang muka penjualan rumah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Saldo awal	3.141.403.180	3.739.643.011
Penambahan	12.490.992.549	22.731.941.656
Pengurangan:		
- Direklasifikasi ke penjualan	(13.780.837.839)	(23.330.181.487)
Saldo akhir	<u><u>1.851.557.890</u></u>	<u><u>3.141.403.180</u></u>

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	13.288.800.000	14.441.900.000
Jumlah	<u><u>13.288.800.000</u></u>	<u><u>14.441.900.000</u></u>
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Bagian jangka panjang	<u><u>13.288.800.000</u></u>	<u><u>14.441.900.000</u></u>

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit SP2K Nomor 14/S/CBC.BKS-RM2/II/2021 tanggal 15 Februari 2022 dan Surat nomor: 878/S/CBC.BKS/RM2/III/2021 tanggal 24 Maret 2022 mengenai perubahan klausula pada SP2K atas nama PT Trimitra Prawara Goldland, Tbk. yang diterbitkan oleh Bank dan telah disetujui Debitur sebagai satu kesatuan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Plafond Pembiayaan	:	Rp24.400.000.000
Jenis Pembiayaan	:	Konstruksi BTN - <i>Non Revolving</i>
Tujuan	:	Pembiayaan Kredit konstruksi pembangunan rumah komersial sebanyak 127 unit Proyek Perumahan "Bumi Abhirama Residence" beserta sarana dan prasarananya yang berlokasi di Kp Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
Jangka Waktu	:	36 Bulan (3 Tahun)
Biaya Provisi	:	0,75% secara <i>eenmalig</i> dari Plafon Kredit
Biaya Administrasi	:	0,25% secara <i>eenmalig</i> dari Plafon Kredit

Jaminan atas pinjaman bank kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

- a. Agunan pokok berupa tanah dan bangunan yang ada dan akan ada di atas Proyek Perumahan Bumi Abhirama Residence dengan rincian sebagai berikut:

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03483/Pasir Putih berdasarkan Surat Ukur tanggal 21/03/2022 Nomor 10489/Pasir Putih/2022 seluas 19010 M² yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasir Putih.

- b. Jaminan lain:

1. *Personal Guarantee* dari keseluruhan pengurus dan pemegang saham Perusahaan.
2. *Standing Intruction (SI)* melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk.
3. *Cessie* atau piutang yang berkaitan dengan penjualan rumah perumahan Bumi Abhirama Residence.

Negative Covenants

Nasabah bersedia menerima pembatasan dan/atau tidak akan melakukan (*negative covenant*) tanpa persetujuan dari Bank, antara lain:

- a. Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain, kecuali pinjaman dari Pemegang Saham dan transaksi dagang yang lazim.
- b. Mengikat diri sebagai penjamin dan atau menjaminkan harta perusahaan yang merupakan lokasi proyek yang dibiayai Bank BTN.
- c. Mengubah Anggaran Dasar dan Pengurus Perusahaan (terkait modal, kepemilikan, dan pengurus).
- d. Melakukan *merger* atau akuisisi.
- e. Melunasi hutang kepada Pemegang Saham yang berkaitan dengan proyek yang dibiayai Bank BTN, sebelum hutang kepada Bank BTN Lunas.
- f. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.

Syarat dan Ketentuan Teknis Lainnya

- a. Apabila terjadi perubahan *site plan* tipe rumah serta spesifikasi teknis bangunan oleh PT Trimitra Prawara Goldland, Tbk maupun instansi setempat harus dengan persetujuan Bank BTN Commercial Banking Centre (CBC) Bekasi sebelum dilanjutkan ke instansi terkait.
- b. Memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan giro atas nama PT Trimitra Prawara Goldland, Tbk untuk keperluan biaya-biaya realisasi dan kewajiban terkait dengan kredit konstruksi BTN yang diterima, termasuk pembayaran pokok, bunga dan denda jika ada.
- c. PT Trimitra Prawara Goldland, Tbk bersedia dan sanggup untuk menanggung biaya-biaya yang muncul dari selisih/kekurangan biaya (*cost over run*) selama pembangunan, jika ternyata melebihi RAB yang dibiayai Bank.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (lanjutan)

Syarat dan Ketentuan Teknis Lainnya (lanjutan)

- d. PT Trimitra Prawara Goldland, Tbk menyatakan kesanggupannya untuk menyampaikan laporan prestasi proyek dan progress pemasaran/penjualannya sesuai format Bank BTN selama pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Bank.
- e. Utilitas dan fasilitas pendukung perumahan "Bumi Abhirama Residence" harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat.
- f. Apabila terdapat pembayaran deviden kepada pemegang saham, maka hasil pembayaran deviden tersebut diwajibkan untuk disampaikan kepada Bank.
- g. Menjaga rasio-rasio keuangan selalu berada didalam batas wajar yang ditentukan oleh Bank dengan melampirkan laporan keuangan jika diminta Bank.
- h. Menjaga DER selalu berada dibawah batas maksimal ketentuan Bank, yakni 500% (lima ratus persen).

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit SP2K Nomor 111/S/CBC.BKS/RM2/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Bank dan telah disetujui Debitur sebagai satu kesatuan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Plafond Pembiayaan	:	Rp19.200.000.000 yang terdiri dari:
	:	Rp15.200.000.000 (Kredit Modal Kerja Konstruksi)
	:	Rp4.000.000.000 (Kredit Pemilikan Lahan)
Jenis Pembiayaan	:	Kredit Modal Kerja dan Kredit Pemilikan Lahan
Tujuan	:	Pembiayaan Pemilikan Lahan seluas 36.416 M ² dan Pembangunan Proyek Perumahan "Cibungbulang Town Hills" sebanyak 279 unit yang terletak di Desa Cibatok I dan Cibatok II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
Jangka Waktu	:	36 Bulan (3 Tahun)
Biaya Provisi	:	0,5% secara <i>eenmalig</i> dari Plafon Kredit
Biaya Administrasi	:	0,5% secara <i>eenmalig</i> dari Plafon Kredit

Jaminan atas pinjaman bank kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

- a. Agunan pokok dengan rincian sebagai berikut:

No.	Agunan	Luas (m ²)
1.	SHGB No 330/Cibatok II atas nama Perusahaan	5.264
2.	SHGB No. 331/Cibatok II atas nama Perusahaan	10.456
3.	SHGB No. 332/Cibatok II atas nama Perusahaan	10.214
4.	SHGB No. 333/Cibatok II atas nama Perusahaan	4.543
5.	SHGB No. 603/Cibatok I atas nama Perusahaan	5.939

Jaminan atas pinjaman bank kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- b. Jaminan lain:
 1. *Personal Guarantee* dari keseluruhan pengurus dan pemegang saham Perusahaan.
 2. *Standing Intruction (SI)* melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk.
 3. *Cessie* atau piutang yang berkaitan dengan penjualan rumah perumahan Cibung Bulang Townhills

Negative Covenants

Nasabah bersedia menerima pembatasan dan/atau tidak akan melakukan (*negative covenant*) tanpa persetujuan dari Bank, antara lain:

- a. Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek yang dibiayai berdasarkan perjanjian kredit ini, terkecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim.
- b. Mengikat diri sebagai penjamin hutang.
- c. Mengubah Anggaran Dasarnya (atau susunan anggota direksinya atau dewan komisarisnya).
- d. Menjalankan penggabungan atau peleburan.
- e. Melunasi hutang kepada Pemegang Saham.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (lanjutan)

Negative Covenants (lanjutan)

- f. Melakukan pengambilalihan.
- g. Membubarkan diri atau mengajukan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang.
- h. Melakukan perubahan terhadap site plan dari proyek yang di biayai oleh Bank berdasarkan ketentuan perjanjian kredit ini.
- i. Menyewakan Perusahaan kepada pihak ketiga.
- j. Mengalihkan sebagian atau seluruh asetnya dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, kecuali pengecualian aset yang dilakukan oleh debitur sebagai bagian dari transaksi dagang yang lazim dilakukan oleh debitur dalam rangka menyelesaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini.

Syarat dan Ketentuan Teknis Lainnya

- a. Apabila terjadi perubahan *site plan* tipe rumah serta spesifikasi teknis bangunan oleh PT Trimitra Prawara Goldland, Tbk maupun instansi setempat harus dengan persetujuan Bank BTN Commercial Banking Centre (CBC) Bekasi sebelum dilanjutkan ke instansi terkait.
- b. Memberikan kuasa kepada Bank BTN untuk melakukan pendebitan Giro atas nama PT Trimitra Prawara Goldland, Tbk untuk keperluan biaya-biaya realisasi dan kewajiban terkait dengan kredit konstruksi BTN yang diterima, termasuk pembayaran pokok, bunga dan denda jika ada.
- c. Bersedia dan sanggup untuk menanggung biaya-biaya yang muncul dari selisih/kekurangan biaya (*cost over run*) selama pembangunan, jika ternyata melebihi RAB yang dibiayai Bank.
- d. Apabila terdapat pembayaran deviden kepada pemegang saham, maka hasil pembayaran deviden tersebut untuk dilaporkan kepada Bank BTN.
- e. Menjaga DER selalu berada dibawah batas maksimal ketentuan Bank, yakni 500% (lima ratus persen).

18. UTANG PIHAK BERELASI

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
PT Trimitra Prawara	-	12.845.291
Indriati	-	182.500.000
Jumlah	<u>-</u>	<u>195.345.291</u>

Utang ke PT Trimitra Prawara merupakan pinjaman yang digunakan untuk modal kerja. Sampai dengan 31 Desember 2024 pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak ditentukan jangka waktu pengembalian. Pinjaman tersebut tanpa jaminan dan tidak ada pembatasan terkait pinjaman tersebut.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja yang belum didanai untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020.

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa uang penghargaan dalam hal karyawan mengundurkan diri, meninggal, sakit/cacat, ataupun mencapai usia pensiun dini/normal yang besarnya tergantung dari masa kerja masing-masing karyawan, sesuai yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja Bersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja Perusahaan.

Metode yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja adalah metode *Projected Unit Credit*. Perhitungan liabilitas imbalan kerja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dilakukan oleh konsultan independen KKA Bambang Sudradjad dengan laporan nomor 743/TEK-BS/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 dan 763/TEK-BS/II/2024 tanggal 18 Januari 2024.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh imbalan tersebut untuk Perusahaan sebanyak 6 dan 6, karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Jumlah yang diakui dalam penghasilan sehubungan dengan imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Beban jasa kini	28.447.350	48.740.958
Beban bunga	17.825.992	11.928.275
Biaya jasa lalu – vested	-	-
Jumlah	<u>46.273.342</u>	<u>60.669.233</u>

Perubahan liabilitas bersih tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Saldo awal tahun	268.060.031	166.596.018
Jumlah yang dibebankan ke laba rugi	46.273.342	60.669.233
Penghasilan komprehensif lain	(173.942.906)	40.794.780
Saldo akhir tahun	<u>140.397.467</u>	<u>268.060.031</u>

Penilaian aktuarial telah dilakukan dengan menggunakan data dan asumsi berikut ini:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Metode perhitungan	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Projected Unit Credit</i>
Umur pensiun	55 Tahun	55 Tahun
Tingkat mortalita	TMI – 2019	TMI – 2019
Tingkat diskonto – per tahun	7,00%	7,00%
Tingkat kenaikan gaji	5%	5%
Tingkat cacat	10% dari TMI – 2019	10% dari TMI – 2019

Analisa sensitivitas untuk asumsi tingkat bunga diskonto adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>		<u>31 Desember 2023</u>	
	Kenaikan tingkat bunga diskonto 1%	Penurunan tingkat bunga diskonto 1%	Kenaikan tingkat bunga diskonto 1%	Penurunan tingkat bunga diskonto 1%
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	155.192.481	127.301.117	295.913.168	242.905.288
Beban jasa kini	31.646.113	25.633.620	54.174.012	43.872.416
Beban bunga	49.472.105	43.459.612	66.102.287	55.800.691

Durasi rata-rata liabilitas manfaat pasca kerja diakhir periode pelaporan berkisar antara 12,49 - 15,35 tahun.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada tanggal-tanggal pelaporan.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM

Susunan Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	31 Desember 2024 dan 2023		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
PT Trimitra Prawara	950.000.000	38.000.000.000	76,000
Indriati	25.040.000	1.001.600.000	2,003
Yoyo Sugeng Triyogo	24.960.000	998.400.000	1,997
Masyarakat	250.000.000	10.000.000.000	20,000
Jumlah	1.250.000.000	50.000.000.000	100,000

Perusahaan telah menyelesaikan Penawaran Umum Perdana atas 250.000.000 saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp40 per saham dan harga penawaran sebesar Rp100 per saham, serta mulai efektif berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-279/D.04/2020 tanggal 30 November 2020. Pencatatan penawaran umum saham tersebut dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Desember 2020.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian tambahan modal disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Harga saham	Rp 100 X 250.000.000 saham	=	Rp25.000.000.000
Nilai nominal saham	Rp 40 X 250.000.000 saham	=	Rp(10.000.000.000)
Agio saham			Rp15.000.000.000
Dikurangi : Biaya emisi saham			Rp(2.772.500.000)
Jumlah tambahan modal disetor			Rp12.227.500.000

Perusahaan telah menyelesaikan Penawaran Umum Perdana atas 250.000.000 saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp40 per saham dan harga penawaran sebesar Rp100 per saham, serta mulai efektif berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-279/D.04/2020 tanggal 30 Nopember 2020. Pencatatan penawaran umum saham tersebut dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Desember 2020.

22. SALDO LABA

a. Mutasi akun saldo laba belum ditentukan penggunaannya dalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo awal	16.891.849.593	16.979.025.864
Laba (rugi) periode berjalan	(2.109.329.281)	162.823.729
Dividen kas	-	(150.000.000)
Pembentukan cadangan umum	(100.000.000)	(100.000.000)
Saldo akhir	14.682.520.312	16.891.849.593

b. Mutasi akun saldo laba telah ditentukan penggunaannya dalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo awal	400.000.000	300.000.000
Pembentukan cadangan umum	100.000.000	100.000.000
Saldo akhir	500.000.000	400.000.000

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SALDO LABA (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 146 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Elizabet Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan yang meliputi Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023.
2. Menetapkan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 31 Desember 2023 Rp122.000.000 untuk pengembangan usaha Perusahaan dan memperkuat struktur permodalan sehingga tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
3. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya dan memiliki independensi.
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
5. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat, memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan dengan hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama dalam masa jabatannya masing-masing.
6. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu 27 Juni 2029, dengan rincian sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tn. Yoyo Sugeng Triyogo
- Komisaris Independen : Ny. Nadia Hasna Humaira

Dewan Direksi
- Direktur Utama : Ny. Indriati
- Direktur : Tn. Rachmat Yaktihadi
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara rapat kelima, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Nitra Reza, S.H., M.Kn. Notaris di Bogor, menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan yang meliputi Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2022.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SALDO LABA (lanjutan)

3. Menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan sebagai berikut:
- Laba bersih (laba periode berjalan) tahun buku 2022 sebesar Rp2.152.362.165 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enampuluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah), digunakan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - Sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh direksi;
 - Sisanya sebesar Rp1.902.362.165 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Enampuluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan.
4. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi/Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

23. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Akun ini terdiri dari keuntungan (kerugian) aktuarial yang merupakan hasil dari perubahan asumsi aktuarial dan penyesuaian yang timbul dari perhitungan aktuarial di laporan keuangan Perusahaan.

Mutasi akun ini adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Saldo awal	70.959.540	111.754.320
Keuntungan (kerugian) aktuarial	173.942.906	(40.794.780)
Saldo akhir	<u>244.902.446</u>	<u>70.959.540</u>

24. PENDAPATAN USAHA

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Penjualan rumah tinggal	13.780.837.839	23.330.181.487
Sewa	414.194.433	323.277.778
Jumlah	<u>14.195.032.272</u>	<u>23.653.459.265</u>

Seluruh pendapatan perusahaan diperoleh dari pihak ketiga.

Tidak terdapat penjualan kepada satu pelanggan yang memiliki presentase melebihi 10% dari total nilai Penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

25. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Beban pokok atas penjualan rumah tinggal	8.706.582.196	14.558.126.534
Penyusutan properti investasi	46.800.000	46.800.000
Jumlah	<u>8.753.382.196</u>	<u>14.604.926.534</u>

Tidak terdapat pembelian dan beban kepada pihak berelasi.

Tidak terdapat pembelian dari satu pemasok yang nilainya melebihi 10% dari total beban pokok penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. BEBAN PENJUALAN

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Komisi	324.553.828	261.946.635
Pemasaran	140.104.404	623.152.057
Iklan	51.190.230	76.566.611
Jumlah	<u>515.848.462</u>	<u>961.665.303</u>

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Gaji dan tunjangan	3.293.856.539	3.836.048.542
Penyusutan	455.034.919	460.220.978
Jasa professional	215.840.090	225.181.590
Amortisasi	153.363.750	178.501.583
Retribusi, perizinan, dan legalitas	87.981.000	127.957.000
Utilitas	46.603.106	46.910.341
Beban manfaat karyawan	46.273.342	60.669.233
Pemeliharaan	20.471.886	103.980.300
Perlengkapan kantor	19.433.604	21.975.752
Perjalanan dinas	17.699.940	18.554.218
Beban (pemulihan) penyisihan jaminan KPR	(42.266.558)	28.667.428
Lain-lain	190.944.675	50.138.314
Jumlah	<u>4.505.236.293</u>	<u>5.158.805.279</u>

28. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian pendapatan dan beban lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Jasa giro	30.453.755	37.580.386
Biaya administrasi	(42.644.461)	(16.301.567)
Rugi penjualan aset	(151.875)	-
Pendapatan (beban) lainnya	412.020.799	(26.407.318)
Jumlah	<u>399.678.218</u>	<u>(5.128.499)</u>

29. BEBAN KEUANGAN

Beban keuangan sebesar Rp2.280.731.446 dan Rp1.798.964.958 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan beban bunga atas pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. LABA (RUGI) PER SAHAM

Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh, yang beredar pada tahun bersangkutan, sebagai berikut:

	Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perseroan	Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham yang Beredar	Nilai Laba per Saham
31 Desember 2023	162.823.729	1.250.000.000	0,13
31 Desember 2024	(2.109.329.281)	1.250.000.000	(1,69)

Perusahaan tidak memiliki efek yang bersifat *dilutive* pada 31 Desember 2024 dan 2023.

31. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

Sifat hubungan dan transaksi

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah hubungan berada di bawah pengendalian bersama melalui sebagian kepemilikan yang sama dan/atau memiliki sebagian direksi dan/atau komisaris yang sama dengan Perusahaan.

Tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perusahaan, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan.

a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat transaksi
PT Trimitra Prawara	Pemegang Saham	Utang pihak berelasi
Indriati	Pemegang Saham	Utang pihak berelasi
PT BPR Syariah Mitra Amanah	Pengendalian yang sama	Deposito

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Perusahaan mengadakan transaksi signifikan dengan pihak berelasi rincian saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	Persentase terhadap jumlah liabilitas	31 Desember 2023	Persentase terhadap jumlah liabilitas
Aset				
Deposito	100.000.000	0,09%	100.000.000	0,09%
Jumlah aset	106.944.468.902		113.772.662.961	
Liabilitas				
PT Trimitra Prawara	-	-	12.845.291	0,03%
Utang pihak berelasi	-	-	182.500.000	0,53%
Jumlah liabilitas	29.289.546.144		34.182.353.828	

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dan transaksi (lanjutan)

a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Utang ke PT Trimitra Prawara merupakan pinjaman yang digunakan untuk modal kerja. Sampai dengan 31 Desember 2024 pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak ditentukan jangka waktu pengembalian. Pinjaman tersebut tanpa jaminan dan tidak ada pembatasan terkait pinjaman tersebut.

b. Kompensasi Manajemen Kunci

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024							
	Dewan Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham yang juga bagian dari manajemen		Personil manajemen kunci lainnya	
	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp
Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya	11,84	390.000.000	5,28	174.000.000	-	-	-	-
	31 Desember 2023							
	Dewan Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham yang juga bagian dari manajemen		Personil manajemen kunci lainnya	
	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp
Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya	10,17	390.000.000	4,69	180.000.000	-	-	-	-

% terhadap jumlah beban imbalan kerja

Tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh manajemen kunci untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari. Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang timbul adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu risiko harga) dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko utama, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan tata cara Perusahaan. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar produk dan praktek pasar terbaik.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga. Perusahaan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan arus kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Tabel di bawah ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

	31 Desember 2024			
	Jumlah	Jatuh Tempo 1 Tahun	1 – 5 Tahun	Diatas 5 Tahun
Utang bank	25.938.800.000	12.650.000.000	13.288.800.000	-
Utang usaha	934.155.688	688.584.652	245.571.036	-
Jumlah	26.872.955.688	13.338.584.652	13.534.371.036	-

	31 Desember 2023			
	Jumlah	Jatuh Tempo 1 Tahun	1 – 5 Tahun	Diatas 5 Tahun
Utang bank	29.091.900.000	14.650.000.000	14.441.900.000	-
Utang usaha	703.738.123	703.738.123	-	-
Jumlah	29.795.638.123	15.353.738.123	14.441.900.000	-

d. Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 113, "Pengukuran nilai wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1),

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

- b. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan
- c. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Nilai tercatat	Estimasi Nilai Wajar	Nilai tercatat	Estimasi Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Kas dan setara kas	8.035.323.770	8.035.323.770	10.962.350.659	10.962.350.659
Aset keuangan lancar lainnya	4.530.072.511	4.530.072.511	8.730.514.159	8.730.514.159
Jumlah Aset Keuangan	12.565.396.281	12.565.396.281	19.692.864.818	19.692.864.818
Liabilitas Keuangan				
Utang usaha	934.155.688	934.155.688	703.738.123	703.738.123
Utang lain-lain pihak ketiga	121.622.221	121.622.221	63.726.745	63.726.745
Pinjaman bank	25.938.800.000	25.938.800.000	29.091.900.000	29.091.900.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	26.994.577.909	26.994.577.909	29.859.364.868	29.859.364.868

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan.

Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

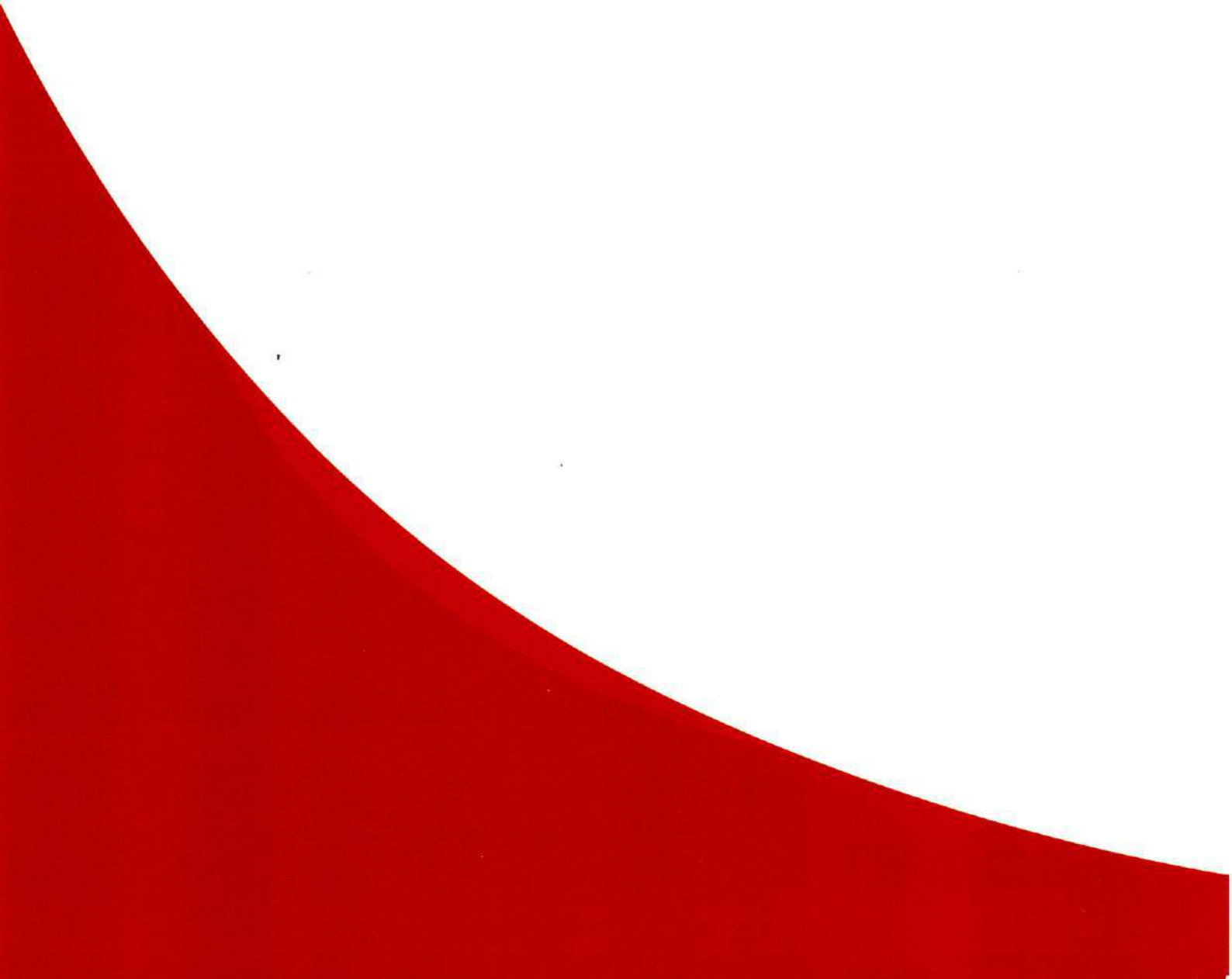
33. TRANSAKSI NON KAS

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penambahan properti investasi melalui reklasifikasi dari persediaan bangunan siap dijual	-	-

34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat pengungkapan peristiwa setelah tanggal neraca yang mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.



20 LAPORAN
24 TERINTEGRASI
INTEGRATED
REPORT



PT Trimitra Prawara Goldland Tbk

Kantor Pusat
Jl. H. Junaedi No.1, RT 12 RW 03, Cipete Selatan
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12410

021 2781 3852 

trimitraprawaraland.co.id 

corsec.tpg@gmail.com 